

**INTEGRASI PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH DALAM  
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN  
DANA PKK: STUDI TIM PENGGERAK PKK  
DESA SRUNI KECAMATAN KLAKAH  
KABUPATEN LUMAJANG**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**Latifa**

**NIM: 221105030061**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
FEBRUARI 2026**

**INTEGRASI PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH DALAM  
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN  
DANA PKK: STUDI TIM PENGGERAK PKK  
DESA SRUNI KECAMATAN KLAKAH  
KABUPATEN LUMAJANG**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh :  
Latifa  
NIM : 221105030061

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
FEBRUARI 2026**

**INTEGRASI PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH DALAM  
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN  
DANA PKK: STUDI TIM PENGGERAK PKK  
DESA SRUNI KECAMATAN KLAKAH  
KABUPATEN LUMAJANG**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:  
Latifa

NIM : 221105030061

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing



Putri Kamilatul Rohmi, S.E.Sy., M.E.

NIP. 199209142020122011

**ANALISIS PRODUK TABUNGAN SIMPANAN PENDIDIKAN  
FATHONAH DALAM MENARIK MINAT SISWA DI KSPPS  
BMT NU JAWA TIMUR CABANG TEMPUREJO**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Kamis

Tanggal : 26 Februari 2026

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I  
NIP. 197608122008011015

M. Daud Rhosyidy, S.E., M.E  
NIP. 19810702202321100

Anggota

1. Dr. Ahmad Afif, M.E.I
2. Hj. Mariyah Ulfa, M.E.I

Menyetujui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.  
NIP. 196812261996031001

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا  
يُعْطِيكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (QS. An-Nisa: 58).\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Departemen Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, QS. An-Nisa:58  
<https://quran.kemenag.go.id/> diakses 5 Februari 2026

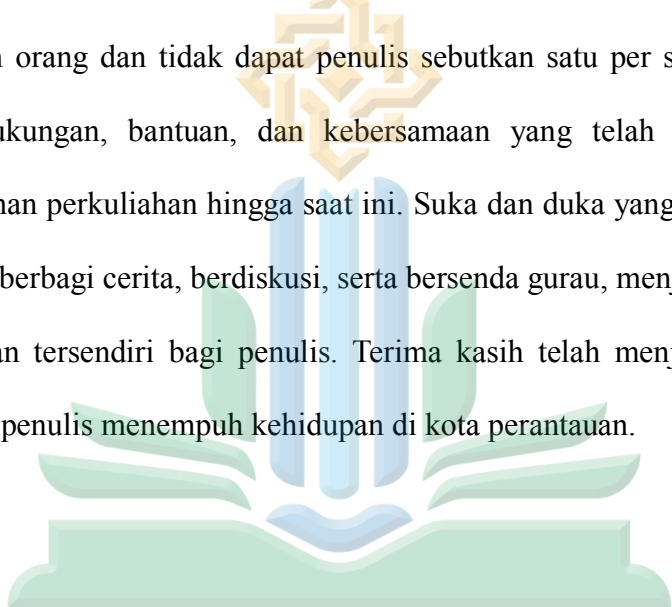
## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji Syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayahnya sehingga mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad , yang telah membimbing dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang berderang sampai saat ini. Sebagai bukti rasa hormat dan terimakasih, maka skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Mahfud dan Ibu Salama Meskipun usia Bapak dan Ibu telah lanjut, kasih sayang, kesabaran, dan perhatian yang diberikan tidak pernah berkurang hingga detik ini. Terima kasih atas segala pengorbanan, didikan, serta cinta yang senantiasa mengiringi setiap fase kehidupan penulis. Dukungan yang diberikan, baik secara langsung maupun melalui doa-doa yang tak henti dilangitkan, menjadi kekuatan hingga penulis dapat berada pada titik ini. Kepercayaan yang diberikan kepada putri bungsu ini untuk menjalani setiap suka dan duka kehidupan, termasuk dalam menempuh pendidikan, merupakan anugerah yang sangat berharga. Segala pelajaran hidup, ketulusan, dan nilai kesabaran yang diajarkan menjadi bekal penting dalam perjalanan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan usia, serta kesempatan bagi penulis untuk terus berbakti dan membahagiakan Bapak dan Ibu.
2. Kelurga besar, khususnya saudara-saudara tercinta yang senantiasa memberikan dukungan, baik secara materi maupun moril. Terima kasih atas

bantuan, perhatian, serta semangat yang tidak pernah putus, sehingga penulis dapat menjalani proses pendidikan dan penyusunan skripsi ini dengan lebih kuat dan penuh keyakinan.

3. Guru, dosen, dan ibu Camat Klakah telah memberikan nasihat dan ilmunya sehingga sampai pada titik ini.
4. Teman-teman penulis, khususnya sahabat-sahabat terdekat yang berjumlah sepuluh orang dan tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas dukungan, bantuan, dan kebersamaan yang telah diberikan selama perjalanan perkuliahan hingga saat ini. Suka dan duka yang dijalani bersama, tempat berbagi cerita, berdiskusi, serta bersenda gurau, menjadi kenangan dan kekuatan tersendiri bagi penulis. Terima kasih telah menjadi rumah kedua selama penulis menempuh kehidupan di kota perantauan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur ke hadirat Allah atas segala rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Integrasi Prinsip Akuntansi Syariah dalam Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana PKK: Studi Tim Penggerak PKK Desa Sruni Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang”.

Tidak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang berderang samapai saat ini.

Penyelesaian skripsi ini tidak luput dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang terkait, opada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor UIN KHAS

Jember yang membantu kelancaran atas terselesainya penyusunan skripsi ini.

2. Prof. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.

3. Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak selaku Ketua Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Dr. Munir Is'adi, S.E. M.Akun selaku dosen penasihat akademik yang dengan sabar meluangkan waktu dan pemikirannya untuk memberikan arahan.
5. Putri Kamilatul Rohmi, S.E.Sy., M.E. selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan selama proses skripsi ini.
6. Seluruh jajaran civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
7. Seluruh pengurus dan anggota TP PKK Desa Sruni, pemerintah desa, serta masyarakat yang menerima peneliti dengan baik dan bersedia memberikan bantuan kepada peneliti baik dalam hal waktu dan juga tenaga. Tidak lupa juga Arief Mashudi, selaku ketua TP PKK Kecamatan Klakah yang bersedia untuk meluangkan waktunya dan membantu peneliti memberikan informasi terkait.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 26, Februari 2026

Penulis

Latifa  
221105030061

## ABSTRAK

Latifa, Putri Kamilatul Rohmi, 2025: *Integrasi Prinsip Akuntansi Syariah dalam Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana PKK: Studi Tim Penggeran PKK Desa Sruni Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang*.

**Kata Kunci:** Integrasi, Akuntansi Syariah, Transparansi, Akuntabilitas, TP PKK

Pengelolaan dana TP PKK sebagai dana publik di tingkat desa menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga etis dan spiritual. Namun, praktik pengelolaan dana TP PKK Desa Sruni masih menunjukkan keterbatasan, khususnya dalam keterbukaan informasi keuangan kepada anggota. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan antara nilai-nilai yang dianut pengurus dan praktik pengelolaan dana yang dijalankan, sehingga integrasi prinsip akuntansi syariah menjadi penting untuk dikaji.

Penelitian ini difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu 1) praktik transparansi pengelolaan dana TP PKK Desa Sruni, 2) tingkat akuntabilitas pengurus dalam mempertanggungjawabkan dana organisasi kepada anggota, masyarakat, dan pemerintah desa, 3) integrasi prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan dana PKK di tingkat desa.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis praktik transparansi pengelolaan dana TP PKK Desa Sruni, 2) mengkaji tingkat akuntabilitas pengurus dalam mempertanggungjawabkan dana organisasi, 3) menelaah bagaimana prinsip-prinsip akuntansi syariah dapat diintegrasikan dalam pengelolaan dana PKK agar tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai syariah.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Serta analisis data melalui pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) transparansi pengelolaan dana TP PKK Desa Sruni belum terlaksana secara optimal karena keterbatasan keterbukaan informasi keuangan kepada anggota. 2) Akuntabilitas pengelolaan dana telah dijalankan secara administratif melalui pencatatan dan pelaporan kepada pemerintah desa, namun belum sepenuhnya mencerminkan pertanggungjawaban kepada seluruh pihak yang berkepentingan. 3) Integrasi prinsip akuntansi syariah berupa amanah, keadilan, dan kebenaran telah dipahami oleh pengurus, tetapi penerapannya masih bersifat parsial dan belum terwujud secara menyeluruh dalam praktik pengelolaan dana.

## DAFTAR ISI

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| HALAMAAN JUDUL .....                 | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN .....             | iii  |
| MOTTO .....                          | iv   |
| PERSEMBAHAN.....                     | v    |
| KATA PENGANTAR.....                  | vii  |
| ABSTRAK .....                        | ix   |
| DAFTAR ISI.....                      | x    |
| DAFTAR TABEL .....                   | xiii |
| DAFTAR GAMBAR .....                  | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN.....               | 1    |
| A. Konteks Penelitian .....          | 1    |
| B. Fokus Penelitian .....            | 6    |
| C. Tujuan Penelitian.....            | 6    |
| D. Manfaat Penelitian.....           | 7    |
| 1. Manfaat Teoritis .....            | 7    |
| 2. Manfaat Praktis .....             | 7    |
| E. Definisi Istilah.....             | 9    |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA .....          | 12   |
| A. Penelitian Terdahulu .....        | 12   |
| B. Kajian Teori.....                 | 22   |
| BAB III METODE PENELITIAN .....      | 39   |

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....        | 39         |
| B. Lokasi Penelitian .....                      | 39         |
| C. Subyek Penelitian .....                      | 40         |
| D. Teknik Pengumpulan Data .....                | 41         |
| E. Analisis Data .....                          | 43         |
| F. Keabsahan Data .....                         | 46         |
| G. Tahap- Tahap Penelitian .....                | 47         |
| <b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b> | <b>51</b>  |
| A. Gambaran Obyek Penelitian.....               | 51         |
| B. Penyajian Data dan Analisis.....             | 58         |
| C. Pembahasan Temuan .....                      | 122        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                      | <b>134</b> |
| A. Kesimpulan .....                             | 134        |
| B. Saran.....                                   | 135        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                      | <b>137</b> |
| <b>lampiran - lampiran</b>                      |            |
| Lampiran 1 Pernyataan Surat Keaslian            |            |
| Lampiran 2 Matrik Penelitian                    |            |
| Lampiran 3 Pedoman Wawancara                    |            |
| Lampiran 4 Surat Izin Penelitian                |            |
| Lampiran 5 Surat Keterangan Selesai Peneltiaan  |            |
| Lampiran 6 Jurnal Kegiatan Penelitian           |            |
| Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Plagiasi      |            |
| Lampiran 8 Surat Keterangan Selesai Bimbingan   |            |
| Lampiran 9 Surat Kelengkapan Naskah Skripsi     |            |
| Lampiran 10 Dokumentasi                         |            |
| Lampiran 11 Biodata Penulis                     |            |

## DAFTAR TABEL

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu..... | 19 |
| Tabel 2.2 Cara Pengisian Buku Keuangan.....                        | 38 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Buku Keuangan TP PKK.....                           | 37 |
| Gambar 3.1 Siklus Analisis Data .....                          | 44 |
| Gambar 4.1 Struktur TP PKK Desa Sruni.....                     | 55 |
| Gambar 4.2 Diskusi pengurus TP PKK setelah Khotmil Qur'an..... | 61 |
| Gambar 4.3 Rencana Anggaran Biaya TP PKK Desa Sruni 2024 ..... | 66 |
| Gambar 4.4 BKU TP PKK Desa Sruni 2024 .....                    | 92 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel merupakan kunci keberhasilan dan keberlanjutan organisasi di berbagai sektor. Memprioritaskan transparansi keuangan dapat membangun kepercayaan pemangku kepentingan, mengambil keputusan yang tepat, mendorong penciptaan nilai jangka panjang dan memainkan peran penting dalam memandu praktik transparansi keuangan dan menumbuhkan budaya kepercayaan dan akuntabilitas.<sup>1</sup>

Prinsip-prinsip ini tidak hanya berlaku di sektor formal, tetapi sangat relevan dalam organisasi kemasyarakatan di tingkat desa, seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). PKK merupakan organisasi masyarakat yang dikelola oleh ibu rumah tangga dan berfokus pada pembinaan kesejahteraan keluarga sesuai Permendagri No. 1 Tahun 2013. Kegiatan yang dijalankan oleh PKK mencakup berbagai aspek, seperti penghayatan serta pengamalan nilai-nilai Pancasila, penguatan semangat gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, Pendidikan dan keterampilan, peningkatan kesehatan masyarakat,

---

<sup>1</sup> Muhajir R. Hakim, *Menuju Transparansi Dan Akuntabilitas: Membangun Fondasi Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berkualitas* (Sleman: Deepublish Digital, 2024) <<https://books.google.co.id/books?id=wf8xEQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=true>>.

pengembangan sistem kehidupan berkoperasi, pelestarian lingkungan, hingga perencanaan hidup yang sehat dan sejahtera.<sup>2</sup>

Untuk menunjang kegiatan yang dilakukan oleh PKK, menurut Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri Agus Fatoni, terdapat beberapa sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk mendukung program PKK, yakni APBN, APBD, APBDes serta sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.<sup>3</sup> Secara substansi dana tersebut merupakan dana publik yang dikelola secara tertib, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, pengelolaan dana PKK tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai etika, moral, dan spiritual. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana PKK dilakukan oleh pengurus yang memiliki peran strategis dalam pengambilan Keputusan organisasi, dimana penelitian mengenai kepemimpinan Perempuan menunjukkan bahwa Perempuan mampu menjadi fondasi yang kuat dalam membangun dan mengelola organisasi.<sup>4</sup>

Akuntansi syariah hadir sebagai alternatif untuk mengatasi isu-isu dalam transaksi konvensional yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>5</sup> Integritas dalam akuntansi syariah mencerminkan nilai kejujuran, konsistensi, dan kebenaran dalam pencatatan transaksi serta penyampaian

<sup>2</sup> Tim Penggerak PKK, '10 Program Pokok PKK', 2024 <<https://tppkpusat.org/tentangkami/>>.

<sup>3</sup> Nuriwan Trihendrawan, 'Kemendagri Beberkan Sumber Pendanaan PKK Di Daerah', *Desember*, 2022, p. 1 <<https://nasional.sindonews.com/read/962109/15/kemendagri-beberkan-sumber-pendanaan-pkk-di-daerah-1670346773>>.

<sup>4</sup> Mauliyah N. I dan Sinambela, Peran Kepemimpinan dalam Pengambilan Keputusan Bisnis, *An-Nisa Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman*, 12(1), 45

<sup>5</sup> Hani Werdi Apriyanti, 'Akuntansi Syariah: Sebuah Tinjauan Antara Teori Dan Praktik', *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6.2 (2017), 131 <<https://doi.org/10.30659/jai.6.2.131-140>>.

informasi keuangan. Transparansi dalam akuntansi syariah harus memberikan informasi keuangan yang jelas, terbuka, dan mudah dipahami.<sup>6</sup> Nilai-nilai seperti *amanah* (kepercayaan), *mas'uliyah* (tanggung jawab), *shidq* (kejujuran), dan *tabligh* (keterbukaan informasi), *hisbah* (pengawasan), dan *kitabah* (pencatatan) menjadi landasan dalam setiap aktivitas pengelolaan harta, termasuk dana publik.

Al-Qur'an sendiri memberikan perhatian besar terhadap pencatatan dan pertanggungjawaban keuangan, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282: "*Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*" Ayat ini merupakan salah satu landasan utama dalam akuntansi syariah, yang menekankan pentingnya pencatatan transaksi keuangan untuk menjaga keadilan, akuntabilitas, dan kebenaran.<sup>7</sup> Dengan demikian, integrasi prinsip akuntansi sangat relevan sebagai pedoman etis dan spiritual dalam mengelola dana publik, termasuk dana yang dikelola oleh Tim Penggerak PKK.

Khususnya di Desa Sruni, Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, Sebagian besar kader PKK adalah perempuan muslimah yang berperan dalam mengelola dana publik melalui kegiatan organisasi. Pemahaman bahwa pengelolaan dana adalah bagian dari ibadah dan bentuk pertanggungjawaban kepada Allah menjadi sangat penting. Hal ini menjadi fondasi utama dalam akuntansi syariah.

---

<sup>6</sup> Menur Kusumaningtyas, *Akuntansi Syariah; prinsip, Praktik dan Perkembangan di Era Modern*, (Yogyakarta; Karya Bakti Makmur, 2025), hlm 23

<sup>7</sup> Nur Dalilah Harahap, Rahmi Syahriza, and Azhari Akmal Tarigan, 'Studi Kontekstual Akuntansi Syariah : Perspektif Q . S Al-Baqarah Ayat 282', *Journal of Social Science Research*, 5 (2025), 4301–13.

Lemahnya transparansi pengelolaan dana PKK tidak hanya menunjukkan fenomena di Desa Sruni, hal tersebut juga terjadi di kabupaten Tebo, Jambi, yang terdapat dugaan korupsi dana hibah PKK sebesar Rp 1,7 miliar yang hingga akhir tahun 2024 penanganannya masih belum tuntas, meskipun beberapa saksi telah diperiksa oleh kepolisian.<sup>8</sup> Pengelolaan dana publik oleh organisasi masyarakat dari kasus tersebut memperlihatkan bahwa sangat rentan terhadap penyalahgunaan apabila tidak ada system pencatatan, pelaporan, dan pengawasan yang transparan dan akuntabel.

Sejalan dengan hal tersebut, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menemukan suatu masalah yang sama dalam pengelolaan PKK. Penelitian yang dilakukan oleh Jessica Aaranda Windartik dan Abu Darim, juga menunjukkan pembukuan kas PKK belum sepenuhnya menerapkan sistem akuntansi yang baik, seperti informasi keuangan yang sulit untuk diakses ketika dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.<sup>9</sup> Adapun penelitian yang dilakukan oleh Lidia Pratiwi dkk lebih terfokus juga pada fungsi BKU sebagai sarana untuk mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran yang rutin, serta sebagai bukti tertulis untuk realisasi APBDesa, sehingga memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Jambiupdate, 'Kasus Korupsi Dana PKK Tebo Tahun 2023 Senilai Rp1,7 M, Polisi Sudah Periksa 17 Orang Saksi', 2024, p. 1 <<https://www.jambiupdate.co/read/2024/09/22/115602/kasus-korupsi-dana-pkk-tebo-tahun-2023-senilai-rp-17-m-polisi-sudah-periksa-17-orang-saksi/>>.

<sup>9</sup> Jessica Aranda Windartik and Abu Darim, 'Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Dalam Pembukuan Kas PKK Di Dusun Sumur Pandan', *Manajemen Kreatif Jurnal*, 1.4 (2023), 239–48 <<https://doi.org/10.55606/makreju.v1i4.2172>>.

<sup>10</sup> Lidia Pratiwi, Nuraisyiah, Masnawaty, and Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa, *Jurnal Sains Riset* 14, No. 1, 223-224

Tetapi, penelitian yang berfokus pada TP PKK yang merupakan organisasi masyarakat perempuan yang juga mengelola dana publik masih sangat terbatas. Dimana, TP PKK juga memiliki peran strategis untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga melalui program-program yang memerlukan pengelolaan dana yang transparan, akuntabel, dan sesuai syariah sangat dibutuhkan.

Oleh karena itu, masih ada kekurangan yang signifikan, yakni minimnya penelitian yang menghubungkan prinsip akuntansi syariah dengan praktik pengelolaan dana TP PKK di tingkat desa. Hal ini menjadikan penelitian mengenai integrasi prinsip akuntansi syariah dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana TP PKK Desa Sruni sangat penting untuk dilakukan. Melalui penelitian ini, diharapkan muncul kesadaran bahwa pengelolaan keuangan bukan sekedar kewajiban administratif, melainkan bentuk ibadah dan pertanggungjawaban spiritual kepada Allah .

Dengan demikian, penelitian ini menekankan tiga fokus utama, yakni pertama, melihat sejauh mana praktik transparansi pengurus TP PKK Desa Sruni dalam menyampaikan informasi keuangan kepada anggota, Masyarakat, serta pemerintah desa. Kedua, bagaimana melihat tingkat akuntabilitas pengurus dalam mempertanggungjawabkan dana organisasi. Ketiga, mengkaji bagaimana prinsip akuntansi syariah dapat diintegrasikan dalam pengelolaan dana PKK supaya tidak hanya memenuhi aspek administratif, melainkan, integrasi ini mencakup beberapa proses seperti perencanaan, pencatatan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban dana PKK agar tidak hanya

memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai syariah seperti amanah, shidiq, tabligh, dan fathonah. Melalui integrasi prinsip akuntansi syariah ke dalam tata kelola keuangan, berharap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana PKK dapat lebih optimal, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memperkuat peran PKK dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga di Desa Sruni.

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa masalah yang perlu diteliti secara mendalam dan rinci. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik transparansi dalam pengelolaan dana PKK pada TP PKK Desa Sruni?
2. Bagaimana tingkat akuntabilitas pengurus TP PKK Desa Sruni dalam mempertanggungjawabkan dana organisasi kepada anggota, Masyarakat, dan Pemerintah Desa?
3. Bagaimana integrasi prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan dana PKK di Desa Sruni?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan fokus penelitian yang telah disampaikan, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui praktik transparansi dalam pengelolaan dana PKK pada TP PKK Desa Sruni.

2. Mengkaji tingkat akuntabilitas pengurus TP PKK Desa Sruni dalam mempertanggungjawabkan dana organisasi kepada anggota, Masyarakat, dan pemerintah desa.
3. Untuk mengetahui bagaimana prinsip akuntansi syariah dapat diintegrasikan ke dalam pengelolaan dana PKK di Desa Sruni.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat dapat berupa manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat praktis, seperti manfaat bagi peneliti, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. manfaat penelitian harus realistis.

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi terkait penelitian tersebut. Berikut adalah kegunaan dari penelitian ini :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu akuntansi syariah, khususnya dalam pengelolaan dana publik di organisasi masyarakat. Hasilnya dapat menjadi referensi akademis yang menghubungkan prinsip akuntansi syariah dengan pengelolaan dana TP PKK.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a) Bagi Peneliti**

- 1) Penelitian ini memberikan pengalaman empiris bagi peneliti dalam mengkaji praktik pengelolaan keuangan PKK

- 2) Melatih kemampuan analisis peneliti dalam mengaitkan teori akuntansi syariah dengan realitas lapangan.

b) Bagi UIN KHAS Jember

Peneliti memiliki harapan besar agar penelitian ini dapat bermanfaat sebagai penambah literatur guna kepentingan akademik perpustakaan UIN KH. Achmad Siddiq Jember serta dapat menjadi referensi bagi mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana PKK berdasarkan prinsip akuntansi syariah.

c) Bagi Lembaga

- 1) Memberikan masukan praktis bagi TP PKK Desa Sruni dalam memperbaiki system pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan prinsip akuntansi syariah dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas.

- 2) Memberikan masukan positif dalam meningkatkan kesadaran kader PKK akan nilai-nilai dalam akuntansi syariah dalam pengelolaan dana PKK.

d) Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana PKK, sekaligus memberikan pemahaman bahwa pencatatan keuangan yang baik merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan spiritual.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.

Istilah-istilah yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut.

### 1. Integrasi

Menurut Wedawaty dalam buku yang ditulis Trianto, integrasi memiliki sinonim dengan perpaduan, penyatuan, atau penggabungan, dari 2 objek atau lebih. Begitu juga menurut Poerwadarminta dalam buku yang ditulis Trianto, yakni menjelaskan integrasi merupakan penyatuan supaya menjadi suatu kebulatan atau menjadi utuh.<sup>11</sup>

Dalam konteks penelitian ini, integrasi dimaknai sebagai penyatuan prinsip akuntansi syariah ke dalam tata kelola keuangan PKK. Hal ini dimaksudkan bahwa nilai-nilai syariah seperti pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi juga diimplementasikan secara praktis dalam proses pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana PKK.

### 2. Prinsip Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah memiliki prinsip dasar yang membedakannya dari akuntansi konvensional, yaitu prinsip pertanggungjawaban, keadilan,

---

<sup>11</sup> Trianto Ibnu Badar Al-Tabany, *Desain Pengembangan Pembelajaran Tematik* (Jakarta: Kencana, 2011)  
<[https://www.google.co.id/books/edition/Desain\\_Pengembangan\\_Pembelajaran\\_Tematik/LFFADwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=PENGERTIAN+INTEGRASI&pg=PA107&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Desain_Pengembangan_Pembelajaran_Tematik/LFFADwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=PENGERTIAN+INTEGRASI&pg=PA107&printsec=frontcover)>.

dan kebenaran.. Dalam konteks pengelolaan dana PKK, prinsip pertanggungjawaban menuntut agar setiap penerimaan dan pengeluaran dana dicatat serta dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan yang jelas. Dalam prinsip keadilan, agar tidak menimbulkan kerugian atau kesalahpahaman bagi anggota dan masyarakat, pengurus PKK di haruskan bersikap jujur dan transparan dalam pencatatan serta penyampaian informasi. Begitu juga dalam pengelolaan dana, Sementara itu, prinsip kebenaran mendorong PKK untuk melakukan pengelolaan secara tepat dalam pengakuan, pengukuran, dan pelaporan, sehingga tercipta keadilan dalam pemanfaatan dana untuk mendukung program-program kesejahteraan keluarga.<sup>12</sup>

### 3. Transparansi

Transparansi memberikan penjelasan mengenai proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Dengan tingkat transparansi yang tinggi, organisasi dapat membangun kepercayaan dengan para pemangku kepentingan serta mengurangi risiko terjadinya korupsi dan penyalahgunaan.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini, transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengelolaan dana PKK kepada anggota maupun pihak terkait.

<sup>12</sup> Zulhelmy & Suhendi, *Dasar-Dasar Akuntansi Islamic* (Indramayu: Adanu Abimata, 2021) <[https://www.google.co.id/books/edition/DASAR\\_DASAR\\_AKUNTANSI\\_ISLAMIC\\_VIEW/5SVQEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=prinsip+akuntansi+syariah&pg=PA28&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/DASAR_DASAR_AKUNTANSI_ISLAMIC_VIEW/5SVQEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=prinsip+akuntansi+syariah&pg=PA28&printsec=frontcover)>.

<sup>13</sup> Rachmawati Novaria dkk, *Pengantar Administrasi Publik*, ( Cendikia Mulia Mandiri, 2024), 61-62

#### 4. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan suatu pemerintahan atau tata kelola. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN), akuntabilitas mengharuskan seorang pimpinan atau unit organisasi untuk memberikan laporan, penjelasan, maupun jawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak tau kewenangan menjadi salah satu prinsip pokok dalam penerapan *good governance*.<sup>14</sup> Khususnya dalam penelitian ini, akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab pengurus TP PKK setiap pengambilan keputusan, tindakan, serta penggunaan sumber daya kepada pihak yang memiliki hak untuk mengetahuinya.

#### 5. Dana PKK

Dana PKK adalah seluruh sumber keuangan yang dimiliki oleh organisasi PKK yang dapat dinilai dengan uang dan digunakan untuk mendukung kegiatan organisasi. Sumber dana tersebut dapat berasal dari APBN, APBD, APBDes, swadaya masyarakat, maupun bantuan lain yang sah dan tidak mengikat. Dalam penelitian ini, dana PKK yang dikaji merupakan dana yang dikelola oleh TP PKK Desa Sruni untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan organisasi yang berasal dari APBDes.

---

<sup>14</sup> Tati & dkk Sarihati, *Tata Kelola Dan Pemerintahan Akuntabilitas Publik* (Sumedang, 2023).

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Dalam bagian ini, peneliti menyertakan berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan lalu menyusun dan meringkasnya.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan yang terkait dengan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Qoo'idahtul Ufairah Ariibah, dkk dalam jurnal yang berjudul “Analisis Sistem Akunatnsi penerimaan Kas pada PKK RT 02 RW 03, Daerah Kedung Baruk, Surabaya Timur-Jawa Timur”. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kader PKK masih menggunakan system akuntansi penerimaan kas secara manual, hal tersebut terjadi karena keterbatasan literasi akuntansi dan teknologi serta mengandalkan kebiasaan lama. Selanjutnya tidak ada dokumentasi yang lengkap, dikarenakan terdapat beberapa transaksi yang tidak dilengkapi dengan bukti fisik serta kurangnya staf pkk dalam memahami pentingnya dokumentasi keuangan. Terakhir tugas bendahara yang masih sederhana, hal itu disebabkan karena SDM yang terbatas.<sup>16</sup>
2. Sinta Suciana dkk dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dombo Dengan

---

<sup>16</sup> Ariibah and others hlm 46.

Good Governance sebagai variabel Intervening”. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif pendekatan deskriptif. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa secara signifikan dipengaruhi oleh tingkat transparansi dan akuntabilitas, hal itu ditunjukkan dengan semakin tinggi keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban, semakin baik pula pengelolaan dana desa. Hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa *good governance* berkontribusi positif terhadap pengelolaan dana desa, sekaligus berperan sebagai variabel mediasi yang signifikan dalam hubungan antara transparansi dan akuntabilitas dengan pengelolaan dana desa. Temuan ini menegaskan bahwa implementasi tata kelola pemerintahan yang baik merupakan faktor krusial dalam meningkatkan efektivitas serta akuntabilitas pengelolaan keuangan di tingkat desa.<sup>17</sup>

3. Lidia Pratiwi dkk dalam jurnal yang berjudul “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan Keuangan Desa”. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah deskriptif kualitatif. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan Desa Ajakkan telah sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Dalam konteks penatausahaan, penelitian tersebut mengidentifikasi bahwa Buku Kas Umum (BKU) digunakan oleh bendahara desa untuk mencatat seluruh

---

<sup>17</sup> Sinta Suciana, C. Tri Widiastuti, and Rita Meiriyanti Suciana, Sinta, C. Tri Widiastuti, ‘Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dombo Dengan Good Governance Sebagai Variabel Intervening’, *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 4.1 (2025), 223–36.

penerimaan dan pengeluaran rutin, serta sebagai bukti tertulis realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang mendukung penyusunan laporan pertanggungjawaban. Namun pada tahap pelaporan ditemukan bahwa prinsip transparansi belum tercapai sepenuhnya karena terdapat indikator yang tidak terealisasi, sehingga dinilai cukup sesuai dalam aspek transparansi.<sup>18</sup>

4. Jessica Aranda Windartik dan Abu Darim dalam jurnal yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Akuntansi dalam Pembukuan Kas PKK Dusun Sumur Pandan”. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa di Dusun Sumur Pandan, pembukuan kas PKK belum sepenuhnya menerapkan sistem akuntansi yang baik. Hal itu disebabkan karena pencatatan kas tidak dilakukan secara periodik bulanan, melainkan dilakukan pada akhir tahun yang menyebabkan sulit untuk mengakses informasi keuangan ketika pengambilan keputusan. Selain itu, ditemukan bahwa saldo kas tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, yang disebabkan karena pencatatan pengeluaran kas yang dipinjamkan tidak dimasukkan ke dalam pembukuan.<sup>19</sup>
5. Poppy Indrihastuti dkk dalam jurnal yang berjudul “Penyajian Laporan Keuangan di Kantor Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten

---

<sup>18</sup> Lidia Pratiwi, Nuraisyiah Nuraisyiah, and Masnawaty S, ‘Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa’, *Jurnal Sains Riset*, 14.1 (2024), 220–29 <<https://doi.org/10.47647/jsr.v14i1.2245>>.

<sup>19</sup> Jessica Aranda Windartik and Abu Darim hlm 246.

Malang”. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kantor Desa Kalisongo memanfaatkan system aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa), sehingga penyajian laporan keuangan berjalan dengan baik dan efektif. Penyusunan laporan keuangan meliputi APBDesa, Buku Kas Umum, Buku Pajak, Buku Bank, serta Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Penyajian laporan keuangan tersebut mampu mneingkatkan kredibilitas serta akurasi data laporan keuangan desa, karena sudah dinilai transparan, akuntabel, disusun secara tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 113 Tahun 2014.<sup>20</sup>

6. Miseri Cordia Tongotongo dkk dalam jurnal yang berjudul “Penerapan Tranparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kupa-Kupa Selatan Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara”. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif deskriptif. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pemerintah Desa Kupa-Kupa masih tergolong rendah meskipun telah berupaya mengikuti tahapan pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri Nomer 20 Tahun 2018. Dalam menerapkan transparansi melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANG Desa) yang melibatkan berbagai komponen masyarakat menjadi salah satu upaya desa dalam mengimplementasikan tahap perencanaan yang baik. Namun, terdapat kendala yang dialami

---

<sup>20</sup> Poppy Indrihastuti, ‘Penyajian Laporan Keuangan Di Kantor Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang’, *Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 11.2 (2023), 197–207.

pemerintah desa pada tahap pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Hal itu disebabkan oleh pemerintah desa yang belum sepenuhnya melakukan keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat, minimnya partisipasi penduduk dalam pelaksanaan ADD, serta bendahara desa yang mengalami kendala dalam membuat laporan, karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang menjadikan indikator rendahnya transparansi dan akuntabilitas.<sup>21</sup>

7. Nirmalasari dalam skripsi yang berjudul “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Desa Berdasar Tripologi Islam (Studi pada Kantor Desa Nepo Kec. Mallusetasi Kab. Barru)”. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan studi kasus. Penelitian tersebut menunjukkan partisipasi aktif masyarakat dalam musyawarah desa (musrenbangdes) serta ketersediaan informasi melalui papan informasi dan baliho mengenai jadwal dan realisasi program yang di danai dana desa, menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan Desa Nepo dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Penyaluran dana desa kepada masyarakat yang membutuhkan dengan disertai bukti pencatatan seperti nota dan kuitansi, salah satu usaha yang dilakukan untuk memastikan terwujudnya sifat amanah dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Disisi lain pengeimplementasian sifat

---

<sup>21</sup> M C Tongotongo, J J Tinangon, and ..., ‘Penerapan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kupa-Kupa Selatan Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara’, *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)* 62 (2023) 1231-40  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/45343%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/download/45343/41207>.

shidiq dan tablig dilakukan dengan menyampaikan informasi anggaran dana desa secara transparan melalui pelaporan triwulan serta tahunan. Hal tersebut menunjukkan integrasi nilai-nilai islam dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel di tingkat desa.<sup>22</sup>

8. Andela dalam skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Pemerintahan Desa Tibawan Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu”. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah deskriptif dengan mengumpulkan data primer dan sekunder melalui wawancara langsung dan dokumentasi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kurangnya kepatuhan desa Tibawan terhadap prinsip akuntansi dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Ditemukan bahwa Desa Tibawan masih belum melakukan pemisahan pencatatan kas masuk dan keluar ke dalam buku besar, tidak menyajikan neraca saldo, serta tidak melakukan penyesuaian terhadap persediaan dan penyusutan asset tetap. Sebagai alat pencatatan utama Desa Tibawan menggunakan buku kas umum, namun ditemukan bahwa dalam pencatatan belum dilakukan secara terpisah antara penerimaan dan pengeluaran kas.<sup>23</sup>
9. Brenda Ratnasari dkk dalam jurnal yang berjudul “Analisis Akuntabilitas Transparansi Pengelolaan Dana Desa”. Metode yang digunakan dalam

---

<sup>22</sup> Nirmalasari, ‘Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasar Tripologi Islam (Studi Pada Kantor Desa Nepo Kec. Mallusetasi Kab. Barru), (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2021), 1–113.

<sup>23</sup> A Andela, ‘Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Pemerintahan Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu’, 2020 <<http://repository.uir.ac.id/id/eprint/11760%0Ahttps://repository.uir.ac.id/11760/1/155310126.pdf>>

penelitian tersebut ialah kualitatif deskriptif. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sesuai pedoman tahun 2015 melalui lima tahapan: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, Desa Nglawak, Ngnajuk sudah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Hal tersebut diperlihatkan dengan proses yang terstruktur, terdokumentasi, melibatkan masyarakat dalam musyawarah, dan informasi anggaran secara terbuka.

10. Faris Sabili dkk dalam jurnal yang berjudul “Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Masjid (Studi Kasus Masjid Jogokariyan Yogyakarta)”. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah deksriptif kualitatif. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun belum sepenuhnya berpedoman pada ISAK 35, laporan keuangan Masjid Jogokariyan telah disajikan secara transparan dan akuntabel. Dalam aspek akuntabilitas, bendahara menyadari dengan menyusun laporan keuangan secara rinci yang menunjukkan kelengkapan dan akurasi informasi, bukan hanya bentuk pertanggungjawaban kepada donatur, melainkan juga kepada Allah yang sejalan dengan etika akuntansi syariah. Selain itu, para jamaah dan donatur dengan mudah mengakses informasi keuangan melalui papan informasi, situs web, dan bulletin Idul Fitri, serta adanya pengaduan yang efektif membuat terwujudnya transparansi.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Faris Sabili, Dadang Romansyah, and Roni Hidayat, ‘Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Masjid (Studi Kasus Masjid Jogokariyan Yogyakarta)’, *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 11.2 (2023), 233–49 <<https://doi.org/10.35836/jakis.v11i2.626>>.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu**

| No | Nama                                                                                                                                                                                                   | Persamaan                                                                                                                                                      | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Sinta Suciana, C. Tri Widiastuti, dan Rita Meiriyanti (2025) “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dombo Dengan Good Governance Sebagai Variabel Intervening | Persamaannya adalah menyoroti pentingnya aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik di tingkat desa                                    | Penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan SmartPLS, dan sata dianalisis secara statistik, sedangkan peneliti menggunakan kualitatif studi kasus dengan analisis mendalam melalui wawancara, observasi dan dokumen keuangan |
| 2  | Qoo’idahtul Ufairo Aribah dkk (2025) “Analisis Sistem Akunatnsi penerimaan Kas pada PKK RT 02 RW 03, Daerah Kedung Baruk, Surabaya Timur-Jawa Timur”                                                   | Persamaannya adalah sama-sama membahas organisasi PKK dalam pengelolaan keuangan                                                                               | Penelitian ini berfokus pada system akuntansi pendapatan PKK dan kelemahan teknis pencatatan, sedangkan peneliti berfokus pada transparansi dan akuntabilitas berdasarkan prinsip akuntansi syariah.                           |
| 3  | Lidia Pratiwi, Nuraisyah, dan Masnawaty (2024) “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan Keuangan Desa”                                                                               | Persamaannya adalah menyoroti aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik di tingkat desa dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif | Penelitian ini berfokus pada tata kelola pemerintah desa, sedangkan peneliti fokus pada pemberdayaan Perempuan melalui organisasi PKK                                                                                          |
| 4  | Jessica Aranda Wirdantik, dan Abu Darim (2023) “Analisis Penerapan Sistem Akuntansi dalam Pembukuan Kas PKK Dusun                                                                                      | Persamaannya adalah berfokus pada pengelolaan/pencatatan keuangan PKK                                                                                          | Penelitian ini berfokus pada penerapan system akuntansi dalam pembukuan kas, sedangkan peneliti berfokus pada kesesuaian dengan prinsip akuntansi syariah                                                                      |

|   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Sumur Pandan”                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5 | Poppy Indrihastuti dkk (2023) “Penyajian Laporan Keuangan di Kantor Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang”                                                                                                        | Persamaannya adalah sama-sama menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik di tingkat desa | Penelitian ini berfokus pada penyajian laporan keuangan desa (APBDesa, BKU, Buku pajak, Buku Bank, LRA) sesuai Permendagri No. 113/2014, sedangkan peneliti berfokus pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana PKK berdasarkan prinsip akuntansi syariah                                       |
| 6 | Miseri Cordia Tongotongo, Jantje J Tinangon, dan Robert Lambey (2023) “Penerapan Tranparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kupa-Kupa Selatan Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara | Persamaannya adalah menyoroti aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik di tingkat desa                       | Penelitian ini berfokus pada pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan regulasi formal Permendagri No 20 Tahun 2018, peneliti menitikberatkan pada pengelolaan dana PKK dengan menggunakan prinsip akuntansi syariah                                                                                      |
| 7 | Nirmalasari (2021) “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Desa Berdasar Tripologi Islam (Studi pada Kantor Desa Nepo Kec. Mallusetasi Kab. Barru)”                                                          | Persamaannya adalah sama-sama berfokus pada transparansi dan akuntabilitas dana di tingkat desa dengan nilai islam               | Penelitian ini menggunakan landasan teoritis tripologi islam ( <i>shiddiq, amanah, tabligh</i> ), serta mengacu pada regulasi formal (permendagri No.113/2014), sedangkan peneliti menggunakan berfokus pada dana PKK sebagai organisasi Masyarakat Perempuan dengan pendekatan prinsip akuntansi syariah |
| 8 | Andela (2020) “Analisis Penerapan                                                                                                                                                                                         | Persamaannya adalah sama-sama mengkaji akuntansi di tingkat                                                                      | Penelitian ini berfokus pada kerangka acuan prinsip akuntansi (PABU) dan                                                                                                                                                                                                                                  |

|    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Akuntansi Keuangan Pada Pemerintahan Desa Tibawan Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu                                                                         | desa dan menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas melalui penggunaan Buku Kas Umum                                                     | lingkup entitas yang lebih spesifik, sedangkan peneliti berfokus pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana PKK dengan pendekatan prinsip syariah dalam pencatatan keuangan                                |
| 9  | Brenda Ratnasari, Mia Ika Rahmawati (2020) “Analisis Akuntabilitas Transparansi Pengelolaan Dana Desa”.                                                      | Persamaannya adalah menyoroti transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana di tingkat desa                                               | Penelitian ini mengacu pada Pentunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa 2015, sedangkan peneliti menggunakan prinsip akuntansi syariah sebagai pijakan utama dalam pengelolaan dana PKK |
| 10 | Faris Sabili, Dadang Romansyah, dan Roni Hidayat (2019) “Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Masjid (Studi Kasus Masjid Jogokariyan Yogyakarta)” | Persamaannya adalah sama-sama berfokus pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dengan menekankan pencatatan keuangan yang baik | Penelitian ini menggunakan instrument laporan kas masjid dan sistem pertanggungjawaban internal, sedangkan peneliti berfokus pada pengelolaan dana PKK berdasarkan prinsip akuntansi syariah                         |

Sumber: Data diolah penulis 2025

Penelitian ini memiliki kebaruan yang terletak pada fokus kajian yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Pada penelitian sebelumnya lebih banyak menitikberatkan pada analisis sistem pencatatan kas maupun pengelolaan dana desa, dan organisasi kemasyarakatan dalam kerangka menilai sejauh mana prinsip transparansi dan akuntabilitas dijalankan.

Penelitian ini secara khusus menghadirkan perspektif baru dengan mengintegrasikan prinsip akuntansi syariah ke dalam transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan dana PKK pada tingkat desa, yakni TP PKK Desa Sruni Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang. Melalui pendekatan ini, transparansi dan akuntabilitas tidak lagi hanya memberikan pemahaman tentang sebatas kapatuhan teknis terhadap sistem pencatatan dan pelaporan, tetapi memberikan pemahaman melalui nilai-nilai etika syariah seperti keadilan, amanah, shidiq, dan tabligh. Integrasi ini memberikan landasan normatif dan moral yang lebih kuat. Sehingga pengelolaan dana PKK akuntabel dihadapan masyarakat, pemerintah, dan juga berorientasi pada pertanggungjawaban spiritual kepada Allah .

Deangan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan pada upaya menghadirkan tata kelola keuangan organisasi perempuan desa yang berlandaskan etika syariah. Pendekatan ini memperluas cakupan penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada aspek teknis, sekaligus memberikan kontribusi baik secara konseptual maupun praktis dalam menciptakan model pengelolaan dana PKK yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan nilai-nilai islam.

## **B. Kajian Teori**

Landasan teoritis pada bagian ini sangat membantu untuk mempelajari hal-hal baru dan dapat menjadi panduan umum bagi peneliti. Hal ini agar peneliti lebih muda dalam melakukan penelitian.

### **1. Integrasi**

Menurut Wedawaty dalam buku yang di tulis Trianto, integrasi memiliki sinonim dengan perpaduan, penyatuan, atau penggabungan, dari

2 objek atau lebih. Begitu juga menurut Poerwadarminta dalam buku yang ditulis Trianto, yakni menjelaskan integrasi merupakan penyatuan supaya menjadi suatu kebulatan atau menjadi utuh.<sup>25</sup>

Dalam konteks penelitian ini, integrasi dimaknai sebagai penyatuan prinsip akuntansi syariah ke dalam tata kelola keuangan PKK. Hal ini dimaksudkan bahwa nilai-nilai syariah seperti pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi juga diimplementasikan secara praktis dalam proses pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana PKK.

Prinsip integrasi ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah ayat 282, yang mengajarkan agar setiap transaksi hutang-piutang dicatat dengan adil, jelas, dan disaksikan oleh orang lain. Ayat ini menunjukkan bahwa mencatat keuangan bukan sekadar tugas administratif, tapi juga merupakan perintah dalam syariah untuk menjaga keadilan dan menghindari konflik. Dengan begitu, penerapan prinsip syariah dalam akuntansi memberikan nilai spiritual yang mendukung praktik transparansi dan tanggung jawab yang dijalankan oleh organisasi non-profit seperti PKK.<sup>26</sup>

Seperti yang dijelaskan oleh Triuwono, bahwa aspek penting dalam akuntansi syariah adalah konsep keseimbangan.<sup>27</sup> Dalam penelitian

---

<sup>25</sup>Trianto Ibnu Badar Al-Tabany, *Desain Pengembangan Pembelajaran Tematik* (Jakarta: Kencana, 2011)

<sup>26</sup> Saiful Muchlis, Nurul Jihan Hasril et al, *Akuntansi Syariah Konsep Dan Praktik Dalam Era Kontemporer* (Malang: Pustaka Peradaban, 2024).

<sup>27</sup> Iwan Triuwono, *Perspektif Metodologi Dan Teori Akuntansi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006).

ini prinsip tersebut diintegrasikan dengan konsep transparansi dan akuntabilitas yang menjadi fondasi utama dalam tata kelola organisasi non-profit. Integrasi ini sangat penting mengingat prinsip akuntansi syariah juga memberikan landasan moral dan spiritual, berbeda dengan konsep transparansi dan akuntabilitas yang hanya bentuk pertanggungjawabann, yang menekankan pelaksanaan kepentingan atau intruksi dari atasan sebagai principal atas kewajiban bawahan.

Dalam Pengelolaan dana PKK, integrasi prinsip akuntansi syariah terlihat jelas dalam beberapa hal seperti:

- a. Pertama, pencatatan kas dilakukan dengan rapi dan teratur, selalu disertai bukti transaksi sebagai bentuk tanggung jawab
- b. Kedua, transparansi dijaga dengan rutin menyampaikan laporan keuangan kepada anggota PKK, masyarakat, dan pemerintah desa.
- c. ketiga, akuntabilitas ditegakkan dengan memastikan dana digunakan sesuai dengan tujuan sosial organisasi, bukan untuk kepentingan pribadi pengurus.

Dengan demikian, prinsip akuntansi syariah tidak hanya menjadi pedoman, tetapi juga menciptakan cara kerja yang memperkuat kepercayaan dan keterleibatan Masyarakat dalam kegiatan PKK.

## 2. Akuntansi Syariah

### a. Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah merupakan sistem akuntansi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang mengatur proses pengakuan,

pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi. Pencatatan seluruh aktivitas ekonomi yang dicatat sesuai dengan ketentuan Allah merupakan tujuan utama untuk memastikan keadilan dalam penyajian hak dan kewajiban.<sup>28</sup>

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah akuntansi syariah merupakan proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah.<sup>29</sup>

QS. Al-Baqarah ayat 282 menjadi prinsip dasar akuntansi syariah yang menekankan pencatatan transaksi secara adil, benar, dan transparan untuk melindungi hak-hak pihak yang bertransaksi. Akuntansi syariah dilandasi prinsip utama antara lain akuntabilitas, transparansi, kebenaran, dan kehalalan. Penerapan prinsip tersebut bertujuan agar setiap transaksi ekonomi tidak merugikan pihak manapun, serta mencerminkan tanggung jawab manusia tidak hanya kepada sesama, tetapi juga kepada Tuhan dan lingkungan.<sup>30</sup>

#### b. Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah

Salah satu aspek yang ditampilkan akuntansi syariah adalah nilai keadilan yang ditegaskan dalam QS Al-Baqarah ayat 282 tentang pencatatan yang adil serta dalam QS Yasin ayat 36 yang menunjukkan konsep keseimbangan melalui penciptaan segala sesuatu secara berpasangan. Secara epistemologis, konsep

<sup>28</sup> Ihsan & Kusmilawaty Rambe, *Akuntansi Syariah Teori Dasar Dan Implementasinya* (Medan: UMSU Press, 2022).

<sup>29</sup> Sri & Wasilah Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, 3rd edn (Jakarta: Salemba Empat, 2014).

<sup>30</sup> Muchlis hlm, 50.

berpasangan ini merefleksikan bahwa keadilan dalam akuntansi syariah diwujudkan melalui upaya menyeimbangkan berbagai dimensi yang berbeda namun saling melengkapi. Misalnya antara egoistik dengan altruistic, kepentingan material dengan spiritual, internalitas dengan eksternalitas, serta aspek kuantitatif dengan kualitatif.<sup>31</sup>

Nilai yang terkandung dalam QS Al-Baqarah ayat 282 terdapat tiga prinsip umum akuntansi syariah yang dimana menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi syariah. Berikut uraian ketiga prinsip yang terdapat dalam surat Al-Baqarah: 282 yakni sebagai berikut:

#### 1) Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban atau akuntabilitas (*accountability*) merupakan konsep yang tidak asing lagi di

kalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang Khalik mulai dari alam kandungan. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai Khalifah di muka bumi. Manusia dibebani amanah oleh Allah untuk menjalankan fungsi-fungsi kekhalifahannya. Inti kekhalifahannya adalah menjalankan atau menunaikan amanah.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Iwan hlm, 396.

<sup>32</sup> Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2005).

Banyak Al-Qur'an yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah di muka bumi. Seperti dalil Allah dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Qs. An-Nisa:58)

Ayat ini mengajarkan pentingnya menyampaikan dan menunaikan amanat kepada pihak yang berhak menerimanya. Amanat di sini bermakna segala sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dijaga dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Makna amanat ini sangat luas — mencakup amanat dari Allah kepada hamba-Nya, amanat antarsesama manusia, bahkan amanat terhadap diri sendiri. Amanat Allah kepada hamba-Nya diwujudkan dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Segala nikmat yang diberikan Allah seharusnya kita gunakan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya (taqarrub)..<sup>33</sup>

<sup>33</sup> Departemen Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, QS. An-Nisa:58 <https://quran.kemenag.go.id/> diakses 5 Februari 2026

## 2) Prinsip Keadilan

Jika ditafsirkan lebih lanjut, ayat 282 surat Al-Baqarah mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara *inheren* melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya.<sup>34</sup>

Dengan demikian, kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu: *pertama*, berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran, yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Kedua, kata adil bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral). Sesuai dengan dalil Allah dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

إِنَّهُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

Artinya: Ia (Al-Qur'an itu) tidak lain, kecuali wahyu yang disampaikan (kepadanya) (Qs. An-Najm:4).

Dalam ayat ini, Allah menegaskan kembali penjelasan sebelumnya bahwa Nabi Muhammad hanya menyampaikan apa

---

<sup>34</sup> Muhammad. Hlm 11

yang diperintahkan oleh Allah secara sempurna, tanpa menambah ataupun mengurangi isi wahyu yang diterimanya.<sup>35</sup>

### 3) Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh misalnya, dalam akuntansi kita selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Kebenaran dalam Al-Qur'an tidak diperbolehkan untuk dicampur adukkan dengan kebatilan. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُنُوا لِلْحَقِّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan<sup>21)</sup> dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(-nya).(QS Al-Baqarah:42)<sup>36</sup>

### 3. Transparansi

#### a. Pengertian Transparansi

Transparansi adalah prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang menekankan ketersediaan informasi yang cukup akurat, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

<sup>35</sup> Departemen Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, QS. An-Najm: 4 <https://quran.kemenag.go.id/> diakses 5 Februari 2026

<sup>36</sup> Departemen Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, QS. Al-Baqarah:42 <https://quran.kemenag.go.id/> diakses 5 Februari 2026

Melalui transparansi masyarakat berhak mengetahui kebijakan, pelaksanaan, serta hasil pengelolaan dana desa sehingga memungkinkan adanya pengawasan dan akuntabilitas.<sup>37</sup>

Dalam menjalankan pemerintah, transparansi mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, seperti masyarakat luas. Untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai, transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang. Pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah, transparansi sangat penting diterapkan dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, yang mengharuskan pemerintah menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa saja yang dikerjakan.<sup>38</sup>

b. Indikator Transparansi

- 1) Keterbukaan Informasi, fondasi utama dalam transparansi adalah keterbukaan kepada masyarakat guna memberikan informasi bagaimana sumber daya publik digunakan dan bagaimana keputusan di ambil.

<sup>37</sup> Sri Wahyuni, and Darmawan Sriyanto, *Pengelolaan Dana Desa Demi Kesejahteraan Masyarakat* (PT Inovasi Pratama Internasional) <[https://books.google.co.id/books?id=EZyvEAAAQBAJ&newbks=1&newbks\\_redir=0&dq=Pengertian+transparansi&hl=id&source=gbs\\_navlinks\\_s](https://books.google.co.id/books?id=EZyvEAAAQBAJ&newbks=1&newbks_redir=0&dq=Pengertian+transparansi&hl=id&source=gbs_navlinks_s)>.

<sup>38</sup> Weny Ultrafiah, 'Pengaruh akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan', (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017).

- 2) Akseibilitas, transparansi tidak hanya tersedia secara formal, dimana akseibilitas adalah kunci untuk memastikan transparansi juga secara praktis dapat diakses oleh masyarakat luas.
- 3) Keterlibatan publik, partisipasi masyarakat menjadi aspek penting dari transparansi, karena memberikan suara kepada masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- 4) Kejujuran dan keandalan, elemen kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah adalah kejujuran dan keandalan informasi yang dihasilkan.
- 5) Responsivitas, selain itu juga, pemerintah atau organisasi dituntut untuk tanggap terhadap kebutuhan informasi serta masukan dari masyarakat. Responsivitas tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk berinteraksi secara terbuka dan konstruktif dengan masyarakat.<sup>39</sup>

#### 4. Akuntabilitas

##### a. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa inggris adalah *accountability* yang berarti keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Akuntabilitas dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu akuntabilitas horizontal

---

<sup>39</sup> Racmawati Novaria, Siti Nurjannah et al, *Pengantar Administrasi Publik* (Cendikia Mulia Mandiri, 2024).

dan akuntabilitas vertikal. Akuntabilitas horizontal tertuju pada hubungan pertanggungjawaban dengan kedudukan sejajar, dimana saling memberikan pengawasan dan memberikan reaksi terhadap tindakan yang dilakukan. Disisi lain, akuntabilitas vertikal terbagi menjadi dua bentuk, yakni akuntabilitas vertikal ke bawah, yang menekankan pelaksanaan kepentingan atau intruksi dari atasan sebagai principal atas kewajiban bawahan. Akuntabilitas vertikal ke atas, yakni tuntutan pertanggungjawaban dari pemimpin atau yang berkuasa terhadap masyarakat atau pihak yang tidak memiliki posisi kepemimpinan.<sup>40</sup>

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan suatu pemerintahan atau tata kelola. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN), akuntabilitas mengharuskan seorang pimpinan atau unit organisasi untuk memberikan laporan, penjelasan, maupun jawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak tau kewenangan menjadi salah satu prinsip pokok dalam penerapan *good governance*.<sup>41</sup>

Akuntabilitas juga dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan, menjelaskan, serta melaporkan seluruh aktivitas yang menjadi tanggung jawab pengambil Keputusan kepada

---

<sup>40</sup> Manggaukang Raba, *Akuntabilitas Konsep Dan Implementasi* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020) <<https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=UKLzDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Akuntabilitas+secara+harfiah+dalam+Bahasa+Inggris+disebut+dengan++accountability++yang++artinya++sebagai++hal++yang++dapat++dipertanggungjawabkan.+Akuntabilitas+adalah+suatu+kewaj>>.

<sup>41</sup> Sarihati hlm, 14.

pihak yang mempunyai kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Prinsip akuntabilitas dalam praktik pada instansi pemerintah tercermin melalui beberapa hal, antara lain: (1) terdapat arahan dari pemimpin beserta seluruh jajaran dalam mewujudkan visi dan misi yang dapat dipertanggungjawabkan; (2) mampu mengelola sumber daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) kepastian terhadap ketercapaian visi dan sasaran yang telah direncanakan; (4) fokus pada tujuan organisasi agar hasil yang diperoleh sesuai dengan harapan; (5) serta menerapkan nilai kejujuran, objektivitas, transparansi dan inovasi sebagai pendorong pengelolaan lembaga, yang menghasilkan laporan melalui mekanisme evaluasi yang sistematis.<sup>42</sup>

b. Indikator Akuntabilitas

- 1) Proses pembuatan sebuah Keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga yang membutuhkan dengan setiap Keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku.
- 2) Akurasi kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
- 3) Kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil dan dikomunikasikan

---

<sup>42</sup> Riana Mayasari, *Indikator Kinerja Pemerintah Daerah dan Model Penilaiannya* (Sleman: CV Budi Utama, 2022).

- 4) Kelayakan dan konsistensi dari target operasional maupun prioritas
- 5) Akses public pada informasi atas suatu Keputusan setelah Keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan Masyarakat.<sup>43</sup>

## 5. Perberdayaan Dana PKK

### a. Sumber Dana PKK

Sumber dana TP PKK berasal dari APBN, APBD Provinsi/Kab/Kota/Desa, Swadaya Masyarakat, dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.<sup>44</sup>

### b. Mekanisme Pengelolaan Dana PKK

Pengelolaan keuangan merupakan mekanisme yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelola keuangan TP PKK adalah bendahara TP PKK.

#### 1) Perencanaan

Perencanaan keuangan TP PKK merupakan perencanaan penggunaan atau pengalokasian sumber dan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Perencanaan keuangan TP PKK dilaksanakan bersamaan dengan perencanaan kegiatan TP PKK tiap tahunnya. Adapun tata cara pengajuan anggaran sebagai berikut:

<sup>43</sup> L Laolo Krina, 'Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi (Cendikia Mulia Mandiri, 2024)', *Sekretariat Good Public Governance BPPN*, 2003, 1.

<sup>44</sup> Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Tim Penggerak PKK Pusat, 'Juknis Tata Kelola Gerakan PKK', 2021, 1–23.

- a) Setiap pengajuan anggaran harus melalui proses perencanaan dengan Menyusun program kerja dan anggaran dalam jangka waktu tertentu, yang disetujui dan ditetapkan dalam rapat pleno, kemudian diajukan kepada pihak sumber dana yang ada.
- b) Proses selanjutnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku/ yang ditetapkan oleh pemberi dana.

## 2) Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan TP PPK merupakan penggunaan sumber dana tiap program kegiatan.

### a) Penerimaan uang

Penerimaan uang untuk dan atas nama TP PKK hanya dapat dilakukan oleh Ketua Umum di tingkat pusat maupun Ketua di tingkat daerah, yang selanjutnya wajib menyerahkan dana tersebut kepada bendahara dengan disertai bukti penerimaan

sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

### b) Pengeluaran uang

Pengeluaran uang dilakukan oleh bendahara dan disetujui oleh Ketua Umum di Pusat/ Ketua Daerah.<sup>45</sup>

- (1) Tanda bukti pengeluaran ditandatangani oleh yang menerima dan bendahara yang mengeluarkan serta diketahui dan disetujui oleh Ketua Umum/ Ketua di Daerah, dibuat rangkap tiga.

<sup>45</sup> Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Tim Penggerak PKK Pusat hlm, 54.

(2) Penulisan kwitansi harus jelas. Tulisan menerima, agar disebutkan menerima dari Ketua Umum TP PKK di Pusat dan Ketua TP PKK di Provinsi sampai dengan Desa/Kelurahan.

### 3) Penatausahaan

Penatausahaan keuangan TP PKK dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku keuangan TP PKK.

#### a) Buku keuangan TP PKK meliputi:

- (1) Buku Kas Umum;
- (2) Buku Kas Harian, jika diperlukan;
- (3) Buku Bank, jika diperlukan, dan
- (4) Buku Bantu lainnya, sesuai kebutuhan.

#### b) Pencatatan pada buku keuangan TP PKK ditutup setiap akhir bulan.

### 4) Pelaporan

- a) Pelaporan keuangan TP PKK dilaksanakan pada akhir tahun
- b) Pelaporan tersebut meliputi laporan pelaksanaan keuangan dan realisasi kegiatan<sup>46</sup>

### 5) Pertanggungjawaban

- a) Ketua PKK menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada ketua Pembina

<sup>46</sup> Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Tim Penggerak PKK Pusat hlm, 55.

- b) Pelaporan pertanggungjawaban keuangan TP PKK dilakukan pada tiap akhir tahun.
- c) Surat pertanggungjawaban (SPJ) ditandatangani oleh bendahara dan diketahui Ketua Umum di Pusat atau Ketua di Daerah atau yang ditudjuk.
- d) Ketentuan-ketentuan mengenai SPJ agar dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e) Pertanggungjawaban keuangan tahunan dan pada waktu serah terima Ketua Umum/ Ketua di Daerah perlu didahului dengan verifikasi.
- f) Verifikasi pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Tim internal yang terdiri dari para ketua bidang/ wakil ketua.<sup>47</sup>
- c. Format dan Tata cara Penggunaan BKU

| BUKU KEUANGAN |                       |             |        |                 |                         |        |                       |             |        |                 |                          |
|---------------|-----------------------|-------------|--------|-----------------|-------------------------|--------|-----------------------|-------------|--------|-----------------|--------------------------|
| NO            | TANGGAL, BULAN, TAHUN | SUMBER DANA | URAIAN | NOMOR BUKTI KAS | JUMLAH PENERIMAAN (Rp.) | NO     | TANGGAL, BULAN, TAHUN | SUMBER DANA | URAIAN | NOMOR BUKTI KAS | JUMLAH PENGELUARAN (Rp.) |
| 1             | 2                     | 3           | 4      | 5               | 6                       | 7      | 8                     | 9           | 10     | 11              | 12                       |
|               |                       |             |        |                 |                         |        |                       |             |        |                 |                          |
|               |                       |             |        |                 |                         |        |                       |             |        |                 |                          |
|               |                       |             |        |                 |                         |        |                       |             |        |                 |                          |
|               |                       |             |        |                 |                         |        |                       |             |        |                 |                          |
| JUMLAH        |                       |             |        |                 |                         | JUMLAH |                       |             |        |                 |                          |

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan sebagai berikut:

Sisa Buku Kas Umum: .....

Terdiri dari:

a. Sisa Bank Rp. ....

b. Sisa Kas/Tunai Rp. ....

TOTAL Rp. ....

Mengetahui  
Ketua Umum/Ketua  
Tanda tangan  
Nama Jelas

Nama Kota, ... tanggal ... bulan ... tahun

Bendahara  
Tanda tangan  
Nama Jelas

Gambar 2.1

<sup>47</sup> Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Tim Penggerak PKK Pusat, 'Juknis Tata Kelola Gerakan PKK', 2021, 56-57.

**Tabel 2.2**  
**Cara Pengisian Buku Keuangan**

| <b>Kolom</b> | <b>Penjelasan</b>                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 1.           | Diisi dengan nomor urut penerimaan                           |
| 2.           | Diisi dengan tanggal dan tahun penerimaan uang               |
| 3.           | Diisi dengan sumber dana (asal penerimaan uang dari mana)    |
| 4.           | Diisi dengan uraian saldo bulan lalu dan untuk apa           |
| 5.           | Diisi dengan nomor bukti surat kas penerimaan                |
| 6.           | Diisi dengan besarnya jumlah uang yang diterima              |
| 7.           | Diisi dengan nomor urut pengeluaran                          |
| 8.           | Diisi dengan tanggal bulan dan tahun pengeluaran             |
| 9.           | Diisi dengan sumber dana (asal uang yang keluar dari mana)   |
| 10.          | Diisi dengan penjelasan untuk apa uang tersebut di keluarkan |
| 11.          | Diisi dengan nomor bukti kas pengeluaran uang                |
| 12.          | Diisi dengan jumlah/banyaknya uang yang dikeluarkan          |

*Sumber: Jukis Tata Kelola Kelembagaan Gerakan PKK*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis dan faktual melalui uraian kata-kata, narasi, maupun dokumentasi visual. Pemilihan jenis penelitian ini disebabkan oleh penerepan metode kualitatif, di mana informasi yang diperoleh dari lapangan menjadi kunci dalam memahami objek yang diteliti.<sup>48</sup>

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian studi kasus bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu atau lebih orang. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktifitas dan peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan dalam waktu berkesinambungan.<sup>49</sup>

##### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah suatu objek yang dituju oleh penulis untuk mendapatkan data dan dokumen pendukung. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya).

Objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti berlokasi di Desa Sruni di Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang. Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini, adalah TP PKK Desa Sruni secara aktif mengelola dana kegiatan

---

<sup>48</sup> Fuazia Hamid Wada, Anna Pertiwi et al, *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, 1st edn (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

serta memiliki struktur organisasi yang jelas, sehingga relevan untuk diteliti dalam konteks transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Kemudian berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di desa tersebut bahwa Laporan keuangan hanya disampaikan kepada pihak desa dan kecamatan setahun sekali, sedangkan akses anggota maupun masyarakat masih terbatas dan bersifat pasif. Alasan lain karena PKK sendiri memiliki peran strategis dalam pemberdayaan keluarga dan masyarakat desa, sehingga pengelolaan dana transparan dan akuntabel menjadi sangat penting.

### C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau narasumber, bagaimana data akan dicari dan dijaring sehingga kesahihannya dapat dijamin.

Peneliti dalam menentukan sumber data menggunakan *purposive*.

*Purposive* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, seperti orang yang dianggap penting dan memiliki pengetahuan tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin orang yang berkuasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.<sup>50</sup>

Informan/subyek penelitian yang dituju dalam penelitian ini diantaranya adalah:

---

<sup>50</sup> Sugiyono hlm, 133 .

1. Susmita Audina, selaku Ketua TP PKK Sruni.
2. Rosidah, selaku Sekretaris TP PKK Sruni.
3. Nor Amirah, selaku Bendahara TP PKK Sruni.
4. Yuliatin, selaku anggota pokja 1
5. Hasanah, selaku anggota pokja 2
6. Marti'a, selaku anggota pokja 3
7. Suciati, selaku anggota pokja 4
8. Masyarakat desa Sruni
9. Pemerintah Desa Sruni
10. Arief Mashudi, Selaku Ketua TP PKK Kec. Klakah

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam menganalisis dan menafsirkan data yang akurat dan terpercaya serta sesuai dengan studi lapangan maka teknik pengumpulan data menjadi langkah yang paling utama dalam penelitian.<sup>51</sup>

Terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tanpa mengetahui Teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditentukan. Berbagai metode yang harus dilakukan dalam Teknik pengumpulan data ini adalah:

##### **1. Observasi**

Observasi awal dilakukan dengan terlebih dahulu mengikuti beberapa kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh TP PKK Desa Sruni, seperti pertemuan berkala, kegiatan layanan masyarakat, serta program

---

<sup>51</sup> Sugiyono, *hlm 194*

kerja Pokja terkait. Kehadiran dalam kegiatan tersebut memberikan gambaran umum mengenai struktur organisasi, alur koordinasi, serta pola pelaksanaan program PKK di tingkat desa. Melalui proses pengenalan langsung ini, peneliti memperoleh pemahaman awal mengenai peran masing-masing pengurus serta bagaimana aktivitas organisasi dijalankan secara operasional. Selanjutnya, observasi diperluas pada aspek administrasi dan pengelolaan keuangan untuk melihat prosedur pencatatan serta pelaporan yang diterapkan.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah Teknik percakapan dengan tujuan tertentu. Dimana percakapan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak yang memiliki kepentingan. Yaitu narasumber dan pewawancara atau penanya.

Penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur.

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara dimana pewawancara lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden dan dianalisis setiap jawaban, sehingga peawawancara dapat mengajukan pertanyaan berikutnya yang lebih terarah. Wawancara tidak terstruktur juga sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau yang lebih mendalam tentang responden.<sup>52</sup>

Dengan menggunakan Teknik wawancara ini peneliti dapat memperoleh informasi dan data sebagai berikut:

---

<sup>52</sup>Sugiyono, hlm 195

- a. Mekanisme pengelolaan dana PKK
  - b. Struktur Organisasi TP PKK
  - c. Persepsi dan kendala yang dihadapi TP PKK
3. Dokumentasi

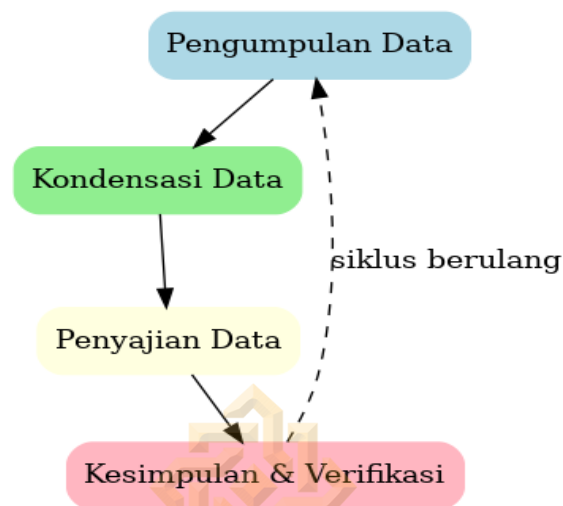
Dokumentasi merupakan mencari informasi mengenai suatu hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan lain sebagainya. Hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan dana PKK merupakan data gambaran umum. Adapun yang dikumpulkan dengan cara ini adalah:

- a. Buku Kas Umum PKK
- b. Laporan pertanggungjawaban (SPJ)
- c. Notulen rapat atau agenda kegiatan
- d. Dokumen pendukung lainnya.
- e. Struktur pengurus TP PKK Desa Kudus

Peneliti melakukan Teknik dokumentasi untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, dengan mempelajari dan menganalisis berbagai dokumen agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

#### **E. Analisis Data**

Langkah selanjutnya setelah terkumpulnya data-data lapangan adalah analisis data. Pada metode kualitatif analisis data dapat dilakukan sesuai bagan berikut:



Gambar 3.1  
Siklus Analisis Data

### 1. Pengumpulan data

Mengumpulkan data merupakan kegiatan utama pada setiap penelitian. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data didapat dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi bahkan gabungan dari ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari bahkan berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti. Semua yang dilihat dan didengar direkam. Dengan demikian peneliti mendapatkan data yang banyak dan sangat bervariasi.<sup>53</sup>

### 2. Kondensasi data

Proses ini merupakan proses awal setelah didapatkan data primer dan sekunder. Proses ini merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan,

<sup>53</sup> Sugiyono, hlm 294

penyederhanaan, pengabstraksian dan atau transformasi data yang muncul dalam korpus lengkap (isi) catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan materi empiris lainnya.<sup>54</sup> Data primer diperoleh dari hasil wawancara, dan observasi langsung untuk memperoleh informasi mengenai praktik transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana PKK berdasarkan prinsip akuntansi syariah. Data sekunder di dapat dari dokumen atau catatan tertulis terkait pengelolaan dana PKK.

### 3. Penyajian data

Penyajian data merupakan proses menyajikan data yang diperoleh sesuai kategori masing-masing. Dalam proses ini didasari oleh keterkaitan antara satu data dengan data lainnya. Proses ini dilakukan dengan mendeskripsikan hasil pengolahan data berdasarkan hasil wawancara dan observasi serta mampu mengklasifikasikan sesuai dengan kriteria masing-masing. Pemetaan pada penelitian ini lebih ditekankan pada tingkat transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan dana PKK.

### 4. Kesimpulan dan verivikasi

Kesimpulan dan Verivikasi adalah memberikan gambaran terkait seluruh data setelah proses kondensasi. Maka pada tahap ini kesimpulan sudah ditemukan sesuai dengan bukti-bukti data yang diperoleh di lapangan secara akurat dan faktual. Proses terakhir yakni proses

<sup>54</sup> a. Michael Huberman and Matthew B. Miles, 'Introduction', *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, 47.Suppl 4 (2014), 3–16 <<http://www.uk.sagepub.com/books/Book239534?siteId=sage-uk>>.

konklusi dari awal sampai akhir yaitu dengan mampu menyimpulkan tingkat diterapkannya prinsip akuntansi syariah pada pengelolaan dana PKK.

#### **F. Keabsahan Data**

Untuk memperoleh data yang benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan, pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan. Pada penelitian ini menggunakan triangulasi sebagai keabsahan data. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.<sup>55</sup>

Pada penelitian ini menggunakan dua triangulasi dapat dioperasionalkan dalam menguji keabsahan data yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber, berarti upaya untuk memperoleh data dari sumber yang berbeda-beda, tetapi menggunakan teknik yang sama. Pengecekan ini dilakukan dengan mencari data melalui beberapa sumber diantaranya, pengurus TP PKK, anggota, Masyarakat, pemerintah desa, serta ketua TP PKK Kecamatan Klakah.
2. Triangulasi Teknik, artinya peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk memperoleh informasi dari dari sumber yang sama. untuk membandingkan pernyataan narasumber dengan bukti lain seperti bukti dokumentasi, wawancara, dan observasi.<sup>56</sup>

Hal ini dapat dicapai dengan cara berikut:

---

<sup>55</sup>Sugiyono, hlm 368

<sup>56</sup>Sugiyono, hlm 315

- a. Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara. Komparasi data tersebut berupa hasil pengamatan secara langsung terkait pengelolaan dana PKK di Desa Sruni dengan hasil wawancara langsung baik dari pihak pengurus PKK, anggota PKK, atau masyarakat sekitar.
- b. Membandingkan hasil apa yang dilihat secara pribadi dengan pernyataan orang di depan umum. Perbandingan ini bersifat subjektif, dipengaruhi oleh perspektif peneliti dalam menilai pengelolaan dana PKK.
- c. Membandingkan pernyataan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dilakukan orang sepanjang waktu. Perbandingan ini bersifat subjektif dari informan terkait pengelolaan dana PKK dengan hasil observasi dari awal hingga akhir.
- d. Membandingkan situasi dan cara pandang seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain. Perbandingan ini berdasarkan perspektif informan memandang serta menilai pengelolaan dana PKK.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen terkait. Perbandingan ini lebih bersifat fleksibel dalam menentukan hasil, perbandingan pandangan informan tentang pengelolaan dana PKK dan dokumen atau data yang kita peroleh.

#### **G. Tahap- Tahap Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penlitit terdapat beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

## 1. Tahap pra-lapangan

Tahap pertama yang dilakukan peneliti dalam hal ini adalah mencari beberapa permasalahan yang ada, setelah itu dilanjutkan dengan mencari referensi yang berhubungan dengan penelitian peneliti. Peneliti mengambil permasalahan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana PKK dengan mengangkat judul **“INTEGRASI PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH DALAM TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA PKK: STUDI TIM PENGGERAK PKK DESA SRUNI KEC. KLAKAH LUMAJANG”**

Tahapan Pra Lapangan adalah sebagai berikut:

### a. Menentukan Lokasi penelitian

Pada tahap ini, peneliti menetapkan lokasi penelitian yaitu TP PKK Desa Sruni Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang.

Pemilihan lokasi didasarkan pada bahwa TP PKK Desa Sruni merupakan organisasi perempuan yang secara aktif mengelola dana publik untuk mendukung program kesejahteraan keluarga. Dengan memilih lokasi ini, peneliti dapat memperoleh data yang relevan mengenai transparansi, akuntabilitas, serta integrasi prinsip akuntansi syariah dalam tata kelola keuangan PKK.

### b. Mengembangkan desain penelitian

Peneliti menyusun desain penelitian yang sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian. Desain penelitian yang

digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pendekatan studi kasus. Hal ini dipilih karena peneliti ingin memperoleh gambaran mendalam mengenai praktik tata kelola keuangan PKK di Desa Sruni, khususnya dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan penerapan prinsip akuntansi syariah.

c. Kelola izin

Sebelum memasuki lapangan, peneliti mengurus perizinan resmi kepada pihak-pihak terkait. Izin diajukan melalui lembaga akademik (fakultas/universitas) kemudian diteruskan kepada pemerintah desa setempat dan pengurus TP PKK Desa Sruni. Pengelolaan izin ini penting agar peneliti mendapatkan legalitas dan akses resmi dalam melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi.

d. Mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam penelitian

Peneliti mempersiapkan berbagai peralatan dan perlengkapan yang mendukung kelancaran penelitian. Peralatan tersebut meliputi pedoman wawancara, alat tulis, buku catatan lapangan, serta perangkat elektronik seperti perekam suara dan kamera untuk dokumentasi. Persiapan ini dilakukan agar proses pengumpulan data berlangsung efektif dan hasil penelitian lebih valid serta dapat dipertanggungjawabkan.

## 2. Tahap Implementasi

Peneliti akan memasuki objek penelitian setelah mendapat izin dan mengumpulkan data dengan cara observasi dan wawancara untuk memperoleh informasi terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana PKK.

## 3. Tahap Persiapan Laporan

Setelah peneliti mendapatkan data, langkah selanjutnya data tersebut dianalisis, dan membuat laporan penelitian. Kemudian laporan penelitian diserahkan kepada pembimbing yaitu Putri Kamilatul Rohmi, S.E.Sy., M.E.



## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Obyek Penelitian**

##### **1. Sejarah TP PKK**

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berawal dari Seminar Home Economic di Bogor tahun 1957 yang merumuskan 10 Segi Kehidupan Keluarga. Rumusan ini kemudian dijadikan Kurikulum Pendidikan Kesejahteraan Keluarga tahun 1961, dan pada 1962 disebarluaskan melalui pembentukan Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat (PLPM) di Magelang.

Pada 1967, kondisi kemiskinan dan kasus Honger Odeem di Jawa Tengah mendorong Ibu Isriati Moenadi, istri Gubernur, untuk membentuk PKK dari tingkat provinsi hingga desa. Keberhasilan PKK di Jawa Tengah membuat Presiden RI menginstruksikan penerapannya secara nasional. Pada 1972, nama PKK resmi menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.

Tahun 1978, lahir 10 Program Pokok PKK yang menjadi dasar gerakan hingga kini. Melalui berbagai Rakernas sejak 1982—dipimpin Ketua Umum PKK dari masa ke masa—PKK memperkuat kelembagaan, administrasi, program kerja, dan mendapatkan berbagai penghargaan nasional serta internasional. Tahun 1993 ditetapkan 27 Desember sebagai Hari Kesatuan Gerak PKK (diubah menjadi 4 Maret pada Rakernas 2010).

Sebagai respon dinamika pembangunan, pada 2000 nomenklatur berubah menjadi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, menegaskan orientasi pemberdayaan masyarakat. Dasar hukum PKK semakin kuat dengan terbitnya Permendagri No. 1 Tahun 2013, kemudian Perpres No. 99 Tahun 2017, dan Permendagri No. 36 Tahun 2020 sebagai pedoman operasional PKK.<sup>57</sup>

Rakernas IX Tahun 2021 menetapkan empat dokumen penting: Rencana Induk PKK 2020–2024, Strategi Gerakan PKK, Tata Kelola PKK, dan Program Prioritas 2021–2024, yang menegaskan kembali bahwa PKK adalah gerakan pemberdayaan berbasis partisipasi masyarakat, dari, oleh, dan untuk masyarakat.

## 2. Visi dan Misi TP PKK

### a. Visi

Terwujudnya Keluarga Sehat, Cerdas, Berdaya, Beriman dan Bertaqwa menuju Indonesia Maju di tahun 2024

### b. Misi

- 1) Membentuk karakter keluarga melalui pola asuh yang sesuai dengan nilai dasar Pancasila.
- 2) Meningkatkan pendidikan dan ekonomi keluarga.
- 3) Memperkuat ketahanan keluarga melalui pemenuhan pangan, sandang, rumah sehat layak huni serta tata laksana rumah tangga.

<sup>57</sup> Tim Penggerak PKK, 'Berkenalan Dengan Tim Penggerak PKK', 2024 <<https://tppkpusat.org/tentangkami/>>.

- 4) Meningkatkan Kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat.
- 5) Modernisasi organisasi PKK dengan memanfaatkan teknologi informasi.

### 3. Gambaran umum TP PKK Desa Sruni

Sejalan dengan visi dan misi TP PKK secara nasional, pelaksanaan program pemberdayaan keluarga di tingkat daerah turut diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional tersebut. Hal ini juga berlaku pada TP PKK Desa Kudus yang menjadi objek penelitian, di mana berbagai kebijakan dan program kerja disusun dengan mengacu pada pedoman nasional namun tetap disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Implementasi ini berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong pemberdayaan keluarga dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya untuk menyikapi dari Visi Nasional tersebut dengan mewujudkan rumusan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Lumajang dengan Visi Lumajang Sehat 2024. Dengan hal itu, TP PKK Desa Sruni sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Sruni Nomor: 188.45/01//427.99.10/2023 berupaya untuk mendukung peningkatan SDM terutama kaum perempuan yang dilaksanakan secara terpadu dan dengan meningkatkan kesadaran, kemauan dan semangat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat, lingkungan dan kesejahteraan yang optimal, sesuai dengan

dasar acuannya yaitu paradigma sehat, Pembangunan berwawasan lingkungan keluarga berkualitas dan Sejahtera. TP PKK Desa Sruni berprioritas pada beberapa hal diantaranya:

- a. Peningkatan Sumber Daya Manusia di Desa Sruni
- b. Memberdayakan SDM khususnya kaum Perempuan
- c. Meningkatkan kesejahteraan keluarga
- d. Meningkatkan kebersihan dan Kesehatan lingkungan.<sup>58</sup>

Tujuan dari TP PKK Desa Sruni sendiri untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan semangat dalam mewujudkan derajat kesehatan dan lingkungan dengan mengindikasikan pada lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat serta mutu dan kualitas SDM yang ada di Desa Sruni. Melalui gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ini kegiatan diarahkan pada peningkatan SDM yang berkualitas dan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Selain itu, berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak pengurus, struktur kepengurusan TP PKK Desa Sruni pada umumnya mengikuti masa jabatan kepala desa. Artinya, pergantian kepengurusan PKK dilakukan bersamaan dengan pergantian kepala desa yang menjabat. Hal ini menegaskan bahwa keberlangsungan organisasi PKK di desa sangat terkait dengan dinamika pemerintahan desa dan kebijakan kepala desa yang sedang memimpin.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> TP PKK Desa Sruni 2024

<sup>59</sup> TP PKK Desa Sruni 2024

#### 4. Struktur TP PKK Desa Sruni



Gambar 4.1  
Struktur TP PKK Desa Sruni

#### 5. Program Kerja TP PKK Desa Sruni

##### a. POKJA 1

Berupa penghayatan dan pengamalan pancasila dan gotong royong, dan kegiatannya yang dilakukan ialah:

##### 1) Pengajian rutin

Kegiatan pengajian dilaksanakan secara berkala sebagai wadah pembinaan mental dan spiritual bagi anggota PKK. Melalui pengajian ini, anggota memperoleh materi keagamaan sekaligus memperkuat hubungan sosial antar anggota.

##### 2) Arisan

merupakan kegiatan rutin yang tidak hanya diikuti oleh anggota PKK, tetapi juga terbuka bagi masyarakat Desa Sruni. Kegiatan ini berfungsi sebagai sarana siaturahmi sekaligus memperkuat kebersamaan antara anggota PKK dan warga. Selain itu, arisan

menjadi media pembiasaan pengelolaan keuangan sederhana di tingkat Masyarakat, karena di dalamnya terdapat proses pencatatan iuran, daftar hadir, serta mekanisme pengundian yang dilakukan secara bergiliran dan transparan.

### 3) Khatmil Qur'an

Kegiatan yang dilakukan oleh TP PKK Dsea Sruni untuk memperkuat nilai keagamaan dan meningkatkan kebersamaan dalam komunitas perempuan desa. Kegiatan tersebut dilakukan dengan membaca ayat Al-Qur'an hingga khatam sebagai kegiatan spiritual bersama.<sup>60</sup>

#### b. POKJA 2

Berupa Pendidikan dan Keterampilan dan Pengembangan Kehidupan berkoperasi. Kegiatan yang dilakukan berupa penyuluhan yang ditujukan ke Lembaga pendidikan anak usia dini, yaitu PAUD.

Penyuluhan ini berupa materi terkait Pembiasaan perilaku Hidup Bersih dan sehat (PHBS) bagi anak, serta penguatan peran orang tua dalam mendukung proses belajar anak.

#### c. POKJA 3

Pangan, Sandang, serta Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga. Program yang dilakukan di TP PKK Desa Sruni berupa PESAT (Pekarangan Sehat) sebagai bagian dari upaya penenuhan kebutuhan pangan keluarga dan peningkatan kemandirian rumah

---

<sup>60</sup> TP PKK Desa Sruni, 2024

tangga. Program ini dilakukan melalui kegiatan penanaman sayuran, tanaman obat keluarga (Toga), serta tanaman konsumsi lainnya di pekarangan rumah masing-masing warga. Kegiatan pekarangan sehat ini sejalan dengan visi Lumajang sehat yang menekankan pemanfaatan lahan pekarangan secara produktif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.

d. POKJA 4

Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat.

Kegiatan pada TP PKK Desa Sruni yakni:

1) Posyandu, dilakukan dengan mendukung layanan Kesehatan dasar bagi balita, ibu hamil, dan lansia, termasuk pemantauan tumbuh kembang pembagian vitamin dan makanan tambahan, serta penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat.

2) PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk), kegiatan ini dilakukan melalui 3M plus, pemeriksaan jentik oleh kader, pembagian ikan pemakan jentik di tempat-tempat penampungan air, penyuluhan kebersihan lingkungan serta kerja bakti warga untuk mencegah penyakit berbasis lingkungan seperti DBD.

Seluruh kegiatan ini menunjukkan komitmen ke-4 POKJA dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta menciptakan lingkungan desa yang lebih bersih dan sehat.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> TP PKK Desa Sruni, 2024

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Tahap berikutnya dalam penyusunan skripsi ini adalah memaparkan hasil data yang telah diperoleh selama proses penelitian. Setelah pengumpulan data di lapangan dilakukan dan dirasa informasi yang terkumpul sudah memadai. Selanjutnya data akan disajikan berupa pengelolaan dana TP PKK Desa Sruni sebagai berikut:

### **1. Praktik Transparansi Dalam Pengelolaan Dana TP PKK Desa Sruni**

#### **a. Transparansi Pada Tahap Perencanaan**

Dalam konteks TP PKK Desa Sruni, transparansi pada tahap perencanaan mengacu pada bagaimana informasi mengenai rencana kegiatan dan alokasi dana disampaikan kepada anggota dan pihak yang berkepentingan. Berdasarkan hasil penelitian transparansi pada tahap perencanaan dapat ditinjau melalui beberapa indikator, yaitu keterbukaan informasi, aksesibilitas, keterlibatan public, kejujuran dan keandalan.

##### **1. Keterbukaan Informasi**

Keterbukaan informasi dalam tahap perencanaan pada TP PKK Desa Sruni mengacu pada sejauh mana pengurus TP PKK memberikan akses informasi mengenai rencana kegiatan dan alokasi dana kepada anggota maupun pihak terkait. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan ibu Susmita Audina selaku ketua TP PKK Desa Sruni beliau mengatakan bahwa: “Rencana kegiatan itu *dok*, biasanya lewat rapat pengurus setelah kegiatan

rutin, jadi sambil kumpul-kumpul kita bahas kegiatan apa saja atau ada masukan kita sampaikan disitu, tetapi tidak sampai membahas terkait dana.”<sup>62</sup>

Hal yang sama diungkapkan oleh ibu Rosidah selaku sekretaris TP PKK Desa Sruni beliau berkata bahwa: “Kalau untuk rencana kegiatan itu tidak sampai membahas dana *mbak* dan biasanya dilakukan waktu kita kumpul-kumpul seperti tadi setelah khotmil Qur'an *mbak*.”<sup>63</sup>

Begitu juga hal yang sama diungkapkan oleh ibu Nor Amirah selaku bendahara TP PKK Desa Sruni yaitu: “Rencana kegiatan itu *mbak* biasanya di sampaikan waktu kita ada kegiatan rutin seperti selesai senam, selesai pengajian itu *diomongin* kalau ada kegiatan baru atau masukan baru.”<sup>64</sup>

Ibu Yuliatin selaku ketua POKJA 1 TP PKK Desa Sruni

beliau menyampaikan hal serupa:

kalau rencana kegiatan itu jarang *mbak* soalnya untuk kegiatannya setiap tahun sama, tapi kalau ada yang baru atau masukan dari masyarakat atau anggota itu baru dibicarakan dan diskusikan, itupun tidak formal hanya waktu kita ada kegiatan kumpul-kumpul<sup>65</sup>

Begitupun tanggapan dari Ibu Hasanah selaku Ketua POKJA 2 TP PKK Desa Sruni beliau berkata:

Kalau rencana kegiatan biasanya selalu mengikuti dari tahun-tahun sebelumnya *mbak*, misal ada masukan senam 2

<sup>62</sup> Susmita Audina, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 2 Desember 2025.

<sup>63</sup> Rosidah, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 2 Desember 2025.

<sup>64</sup> Nor Amiroh, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 2 Desember 2025.

<sup>65</sup> Yuliatin, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 4 Desember 2025

kali dalam seminggu yang awalnya senam satu kali seminggu, itu *diomongin* dan didiskusikan, untuk dananya itu kita tidak tahu *mbak*, kita percaya sama ibu ketua.<sup>66</sup>

Hal itu juga disampaikan oleh ibu mar'tia selaku ketua

POKJA 3 TP PKK Desa Sruni beliau berkata:

lebih tepatnya kita itu mendiskusikan masukan dari anggota atau masyarakat mbak terkait kegiatan yang sudah berjalan, untuk rencana kegiatan setiap tahun sama karena programnya turunan, dan terkait dananya kita mengikuti dari pengurus mbak<sup>67</sup>

Hal yang serupa disampaikan oleh ibu Suciati selaku ketua

POKJA 4 TP PKK Desa Sruni yaitu: “itu biasanya dilakukan waktu berkumpul mbk, dan masalah dana kita tidak tahu kita serahkan ke ibu ketua saja.”<sup>68</sup>

Berdasarkan jawaban informan di atas dapat disimpulkan bahwa menunjukkan pola yang sama. Keterbukaan informasi dalam perencanaan kegiatan dan perencanaan keuangan pada TP PKK Desa Sruni masih bersifat terbatas dan informal. Informasi mengenai rencana kegiatan umumnya hanya disampaikan ketika pengurus sedang berkumpul setelah kegiatan rutin seperti arisan, khotmil Qur'an, senam, atau pengajian. Tidak terdapat forum perencanaan yang bersifat formal dan terjadwal khusus, sehingga penyebaran informasi sangat bergantung pada siapa yang hadir pada saat itu.

<sup>66</sup> Hasanah, diwawancarai oleh penulis, Sruni 4 Desember 2025

<sup>67</sup> Mar'tia, diwawancarai oleh penulis, Sruni 4 Desember 2025.

<sup>68</sup> Suciati, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 4 Desember 2025.

Selain itu, seluruh informan menyampaikan bahwa pembahasan mengenai rencana kegiatan tidak disertai dengan penjelasan alokasi atau rincian dana. Informasi terkait keuangan sepenuhnya berada pada pengurus inti, khususnya ketua dan bendahara, sementara anggota POKJA hanya menerima keputusan yang sudah ditetapkan dan mengikuti arahan tanpa mengetahui detailnya. Dengan demikian, pada tahap perencanaan keterbukaan informasi di TP PKK Desa Sruni belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi karena informasi yang disampaikan belum mencakup aspek keuangan secara menyeluruh.

Hal tersebut diperkuat melalui hasil observasi langsung yang dilakukan peneliti pada saat kegiatan TP PKK Desa Sruni. Berdasarkan hasil observasi, penyampaian rencana kegiatan memang dilakukan secara lisan setelah kegiatan perkumpulan, tanpa forum perencanaan khusus. Kondisi ini dapat dilihat pada Gambar 4.2 yang menunjukkan diskusi pengurus TP PKK setelah kegiatan khotmil Qur'an.



Gambar 4.2  
Diskusi pengurus TP PKK setelah Khotmil Qur'an

## 2. Aksesibilitas

Aksesibilitas menekankan bahwa transparansi tidak hanya diwujudkan melalui penyediaan informasi secara formal, tetapi juga melalui kemudahan bagi pihak yang berhak untuk mengaksesnya. Dengan demikian, informasi mengenai perencanaan kegiatan dan keuangan tidak hanya tersedia, tetapi juga harus mudah dijangkau, dipahami, dan dimanfaatkan oleh para anggota maupun masyarakat. Temuan lapangan berikutnya menggambarkan bagaimana penerapannya di TP PKK Desa Sruni, sebagaimana dijelaskan oleh ibu Susmita Audina selaku ketua TP PKK Desa Sruni beliau mengatakan:

Informasi kegiatan sudah pasti saya sampaikan *dok* waktu *kumpul* itu, nanti disampaikan lagi di grub WA. Untuk akses keuangan sebenarnya anggota jarang sekali yang bertanya, bahkan hampir tidak ada. Kalau ada yang tanya ya saya pasti kasih tau, saya jelaskan. Tapi selama ini anggota itu lebih banyak percaya sama saya sebagai ketua. Jadi mereka tidak terlalu menanyakan soal keuangan. Intinya kalau memang ada yang ingin tahu, pasti saya sampaikan, tapi rata-rata memang dipercayakan ke saya.<sup>69</sup>

Menurut ibu Rosidah selaku sekretaris TP PKK Desa Sruni beliau juga berkata: “Informasinya lewat kumpul-kumpul itu *mbk*, kalau mengakses terkait keuangan yang terlalu dalam itu anggota jarang *mbak*, meskipun dikasi tau mereka juga bilanganya tidak mengerti.”<sup>70</sup>

<sup>69</sup> Susmita Audina, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 2 Desember 2025

<sup>70</sup> Rosidah, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 2 Desember 2025.

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Nor Amirah selaku bendahara TP PKK Desa Sruni beliau berkata:

jarang sekali *mbak* kalau mau tau tentang keuangan itu, kebanyakan dipercayakan ke mbk dina ketua nya itu, tapi kalau mau tau ya pasti dikasi tau sama mbak dina itu. Soalnya saya sendiri juga gatau laptop-laptop gitu mbk, tpi kalau diminta bantuan ya tak bantu sebisa saya.<sup>71</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Yuliatin selaku ketua POKJA 1 TP PKK Desa Sruni beliau berkata: “untuk aksesnya tidak pernah mbak, saya sendiri tidak pernah. kalau kegiatannya sudah dikasi tau di awal.”<sup>72</sup>

Begitu juga menurut ibu Hasanah selaku ketua POKJA 2 TP PKK Desa Sruni beliau berkata: “kita tau biasanya waktu rapat pleno itu *mbk*, itu kan penyampaian RAB juga. Kalau kegiatan setiap tahun hampir sama hanya menyesuaikan kondisi aja sebenarnya.”<sup>73</sup>

Penyampaian ibu Mar'tia selaku ketua POKJA 3 TP PKK Desa Sruni beliau berkata: “kalau akses-akses itu tidak pernah *mbak*, tpi ya dikasi tau misal selesai kerja bakti itu kan ada konsumsinya itu habis berapa gitu. Kalau untuk dana kegiatan-kegiatan apa kata mbk Dina wes.”<sup>74</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Suciati selaku ketua POKJA 4 TP PKK Desa Sruni: “rencana kegiatan sama

<sup>71</sup> Nor Amirah, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 2 Desember 2025.

<sup>72</sup> Yuliatin, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 2 Desember 2025.

<sup>73</sup> Hasanah, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 2 Desember 2025.

<sup>74</sup> Mar'tia, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 2 Desember 2025.

rencana keuangan itu biasanya disampaikan di rapat pleno itu *mbak*, jadi kita tau dari situ, meskipun tidak terlalu rinci tapi disampaikan disitu.”<sup>75</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua TP PKK, sekretaris, bendahara, serta para ketua pokja, dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas informasi dalam perencanaan kegiatan dan keuangan di TP PKK Desa Sruni masih terbatas dan bersifat pasif. Informasi mengenai rencana kegiatan umumnya disampaikan melalui rapat pleno dan grup WhatsApp sehingga anggota tetap memperoleh gambaran umum terkait kegiatan yang akan dijalankan. Namun, akses terhadap informasi keuangan tidak berjalan secara aktif karena sebagian besar anggota tidak pernah meminta penjelasan lebih lanjut, bahkan beberapa menyatakan tidak memahami aspek keuangan meskipun telah dijelaskan.

Dalam praktiknya, anggota lebih memilih menyerahkan sepenuhnya urusan perencanaan dan pengelolaan dana kepada ketua, sehingga mekanisme aksesibilitas berlangsung bukan karena adanya sistem keterbukaan yang terbentuk, tetapi karena kepercayaan internal terhadap ketua. Kondisi ini menyebabkan aksesibilitas informasi keuangan tidak terwujud secara optimal, karena hanya akan diberikan apabila ada permintaan dari anggota yang faktanya hampir tidak pernah terjadi.

---

<sup>75</sup> Suciati, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 2 Desember 2025.

Dengan demikian, dapat dilihat dari sisi aksesibilitas hanya di ketahui oleh anggota yang hadir dalam kegiatan rutin PKK mengenai informasi rencana kegiatan. Hal itu tidak menunjukkan adanya media tertulis atau forum resmi yang memungkinkan anggota mengakses informasi secara berkelanjutan. Dalam hal ini menunjukkan kondisi bahwa akses informasi masih bersifat langsung dan situasional, dimana anggota yang tidak hadir dalam pertemuan berpotensi tidak memperoleh informasi yang sama.

Dalam hal tersebut peneliti menelaah dokumen perencanaan keuangan berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) TP PKK Desa Sruni Tahun 2024. Dokumen ini disusun oleh pengurus inti sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan perencanaan penggunaan dana, sebagaimana disajikan pada

Gambar 4.3

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP PKK)**  
**DESA SRUNI KECAMATAN KLAKAH**  
**TAHUN 2023**

| NO | URAIAN                          | VOLUME | RINCIAN PERHITUNGAN |           | TOTAL             |
|----|---------------------------------|--------|---------------------|-----------|-------------------|
|    |                                 |        | SATUAN              | HARGA     |                   |
| 1  | Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) |        |                     |           | 980.000           |
|    | a. Kertas HVS Folio 70 grm      | 1      | Rim                 | 50.000    | 50.000            |
|    | b. Buku folio bergaris          | 20     | Buah                | 20.000    | 400.000           |
|    | c. Sampul Buku                  | 1      | Paket               | 65.000    | 65.000            |
|    | d. Buku kwitansi                | 10     | Buah                | 10.000    | 100.000           |
|    | e. Bolpoin Hitam                | 2      | Pak                 | 25.000    | 50.000            |
|    | f. Staples                      | 5      | Pak                 | 3.000     | 15.000            |
|    | g. Tinta Stempel                | 5      | Buah                | 10.000    | 50.000            |
|    | h. Materai                      | 20     | Buah                | 10.000    | 200.000           |
|    | i. Tipe X                       | 5      | Buah                | 10.000    | 50.000            |
| 2  | Belanja Cetak dan Penggandaan   |        |                     |           | 500.000           |
|    | a. Fotocopy dan Penjilidan      | 1      | Tahun               | 500.000   | 500.000           |
| 3  | Pawon Urip                      |        |                     |           | 3.000.000         |
|    | a. Pembuatan Pawon Urip         | 1      | Kegiatan            | 3.000.000 | 3.000.000         |
| 4  | Belanja Makanan dan Minuman     |        |                     |           | 2.520.000         |
|    | a. Rapat Pleno                  | 126    | OK                  | 15.000    | 1.890.000         |
|    | b. Rapat Pengurus               | 42     | OK                  | 15.000    | 630.000           |
| 5  | Kegiatan Pokja                  |        |                     |           | 3.000.000         |
|    | a. Kegiatan Pokja-pokja         | 4      | Pokja               | 750.000   | 3.000.000         |
|    | <b>JUMLAH</b>                   |        |                     |           | <b>10.000.000</b> |

Sruni, 2 Januari 2023  
 Bendahara  
 TP PKK Desa Sruni  
**Ny. NOR AMIROH**

Mengetahui  
 Kepala Desa Sruni  
**ILAHINA KUSUMAWATI**

Ny. SUSMITA AUDINA

Gambar 4.3

Rencana Anggaran Biaya TP PKK Desa Sruni 2024

### 3. Keterlibatan Publik

Partisipasi masyarakat menjadi aspek penting dari transparansi, karena memberikan suara kepada masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan memastikan bahwa Keputusan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Berdasarkan data lapangan keterlibatan publik dalam perencanaan kegiatan maupun keuangan TP PKK Desa Sruni keterlibatan warga maupun anggota masih bersifat pasif, hal itu disampaikan oleh ibu

Susmita Audina selaku ketua TP PKK Desa Sruni dimana beliau berkata:

Sebenarnya kalau soal rencana kegiatan PKK di Sruni itu banyak yang tidak ikut memikirkan, namun ada sedikit masukan seperti kegiatan ini ditambah ini itu gitu. Warga di sini kebanyakan sibuk bertani, jadi jarang ada yang mau terlibat langsung. Biasanya saya sendiri yang memikirkan apa yang perlu dilakukan, nanti tinggal disampaikan saat pertemuan, kalau program turunan itu pasti sudah setiap tahun di adakan seperti PESAT itu kan dari kabupaten.<sup>76</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Rosidah selaku sekretaris TP PKK Desa Sruni beliau berkata: “warga sini itu mengikuti *mbak* soalnya kan rata-rata disini bertani, jadi warga itu hanya terlibat saat kegiatan saja. kalau merencanakan itu kurang lebihnya anggota internal saja *mbak*”<sup>77</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Nor Amiroh selaku Bendahara TP PKK Desa Sruni beliau berkata: “warga sini tidak terlalu mengurus hal itu *mbak*, jadi warga itu hanya kalau ada kegiatan dari PKK ya mengikuti”<sup>78</sup>

Begitu juga penyampaian dari ibu Yuliatin selaku ketua POKJA 1 TP PKK Desa Sruni, beliau berkata: “tidak ada *mbak*, ada arahan ya di ikuti sama warga kalau gada ya diem, anggota PKK sendiri mengikuti arahan dari ketuanya itu tpi ada sedikit masukan dari teman-teman itu, terus didiskusikan”<sup>79</sup>

<sup>76</sup> Susmita Audina, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 2 desember 2025.

<sup>77</sup> Rosidah, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 2 Desember 2025.

<sup>78</sup> Nor Amirah, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 2 Desember 2025.

<sup>79</sup> Yuliatin, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 4 Desember 2025.

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Hasanah selaku ketua POKJA 2 TP PKK Desa Sruni beliau berkata: “yang merencanakan kegiatan sama rencana dananya itu ya mbak dina itu, nanti disampaikan ke anggotanya waktu pertemuan, kalau warga tinggal mengikuti arahan saja mbak.”<sup>80</sup>

Hal sama juga disampaikan oleh ibu Mar'tia selaku ketua POKJA 3 TP PKK Desa Sruni beliau berkata:

saya kan sudah lama gabung di PKK ini mbak, dan yang paling aktif kegiatan ini ya semenjak mbak dina jadi ketuanya, dari dulu memang kalau warga itu ya tinggal mengikuti arahan saja, ada kegiatan ya di ikuti gada kegiatan ya diam, mengingat kan disini bertani mbak jadi ya tidak mikir lainnya wes<sup>81</sup>

Begitu juga sama seperti yang disampaikan oleh ibu Suciati selaku ketua POKJA 4 TP PKK Desa Sruni beliau berkata: “kalau warga tidak ikut-ikut *mbak*, jadi tinggal mengikuti arahan, misal seperti kegiatan senam, nanti siapa yang lowong boleh ikut mbak”<sup>82</sup>

Penyampaian oleh salah satu warga Sruni oleh ibu Umiatun beliau mengatakan bahwa: “tidak tahu ya mbak, kalo ada kegiatan pkk disuru ikut ya ikut mbk di suru gini ya ikut gitu”<sup>83</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus TP PKK Desa Sruni, ketua POKJA, serta salah satu warga, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan publik dalam perencanaan

<sup>80</sup> Hasanah, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 4 Desember 2025.

<sup>81</sup> Mar'tia, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 4 Desember 2025.

<sup>82</sup> Suciati, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 4 Desember 2025.

<sup>83</sup> Umiatun, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 4 Desember 2025.

kegiatan dan pengelolaan keuangan TP PKK Desa Sruni masih tergolong rendah dan bersifat pasif. Masyarakat dan sebagian besar anggota PKK belum terlibat secara aktif dalam proses perumusan rencana kegiatan maupun pengambilan keputusan terkait keuangan.

Perencanaan kegiatan dan program PKK lebih banyak didominasi oleh ketua TP PKK bersama pengurus internal, sementara anggota dan warga cenderung berperan sebagai pelaksana kegiatan. Keterlibatan masyarakat umumnya terbatas pada tahap perencanaan, yaitu mengikuti kegiatan yang telah ditetapkan, tanpa keterlibatan signifikan dalam tahap perencanaan atau evaluasi.

Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi masyarakat Desa Sruni, di mana sebagian besar warga berprofesi sebagai petani sehingga memiliki keterbatasan waktu dan minat untuk terlibat langsung dalam proses perencanaan organisasi. Meskipun demikian, terdapat ruang diskusi terbatas di tingkat pengurus dan anggota PKK, di mana sesekali muncul masukan yang kemudian didiskusikan secara internal.

Dengan demikian, indikator keterlibatan publik dalam TP PKK Desa Sruni belum sepenuhnya mencerminkan partisipasi aktif masyarakat, melainkan masih bersifat satu arah, yaitu mengikuti arahan dari pengurus, khususnya ketua TP PKK. Hal

ini menunjukkan perlunya upaya peningkatan mekanisme partisipasi agar keterlibatan publik tidak hanya terjadi pada tahap pelaksanaan, tetapi juga dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

#### **b. Transparansi Pada Tahap Pelaksanaan Keuangan**

Dalam konteks TP PKK Desa Sruni, transparansi pada tahap pelaksanaan mengacu pada bagaimana informasi mengenai pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana disampaikan serta diterapkan dalam praktik kegiatan yang berlangsung. Tahap pelaksanaan merupakan realisasi dari rencana kegiatan dan anggaran yang telah disusun sebelumnya, sehingga transparansi pada tahap ini dapat dilihat dari kesesuaian antara rencana dengan praktik penggunaan dana di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, transparansi pada tahap pelaksanaan dianalisis melalui beberapa indikator, yaitu keterbukaan informasi, aksesibilitas, keterlibatan publik, kejujuran dan keandalan, serta responsivitas.

##### **1) Keterbukaan Informasi**

Keterbukaan informasi dalam tahap pelaksanaan pada TP PKK Desa Sruni mengacu pada sejauh mana pengurus TP PKK memberikan akses informasi mengenai pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana kepada anggota maupun pihak terkait. Pada tahap ini, keterbukaan informasi tercermin dari praktik

penyampaian informasi kepada anggota yang terlibat dalam kegiatan, baik terkait kegiatan yang dilaksanakan maupun dana yang digunakan selama kegiatan berlangsung. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap ibu Audina Susmita selaku ketua TP PKK Desa Sruni, beliau berkata:

dari berbagai kegiatan yang sudah terlaksana ya *dok*, yang mengatur semua pengeluaran untuk kebutuhan kegiatan yang berlangsung itu saya, misal konsumsi untuk kegiatan senam, nah itu nanti saya tinggal berikan uangnya yang sudah saya *ancang-ancang* perkiraan habis berapa ke POKJA 1 untuk di belanjakan dan nanti jika ada lebihnya dikembalikan ke saya, jadi temen-temen itu hanya menerima uang untuk dibelanjakan, terkadang ya saya sendiri yang membelanjakan. dan untuk anggota hanya tinggal menikmati konsumsi itu, sejauh ini tidak ada yang tanya terkait habis berapa, terkadang saya juga sampaikan konsumsinya habis 250 di akhir kegiatan itu.<sup>84</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Rosidah selaku sekretaris TP PKK Desa Sruni, beliau berkata:

selama kegiatan yang membutuhkan dana itu mbak dinanya yang *ngereng-reng* mbak, misal kegiatan POKJA 2 itu pernah ada kegiatan pembinaan UP2PK, itu kan ada konsumsinya, nanti mbk dina tinggal ngasi uang ke ketua POKJA 1 untuk di belanjakan konsumsinya gitu, dari situ kan mereka tau untuk konsumsinya habis berapa gitu, disampaikan jarang si mbak karena anggota juga ga pernah tanya perihal itu mereka mengikuti saja.<sup>85</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Nor Amirah selaku bendahara TP PKK Desa Sruni, beliau berkata: “selama ini yang saya tau jarang *mbak* dana kegiatan itu disampaikan habis

<sup>84</sup> Susmita Audina, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 2 Desember 2025

<sup>85</sup> Rosidah, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 2 Desember 2025

berapa gitu, biasanya waktu kegiatan yang ada konsumsinya itu disampaikan langsung sama mbak dina<sup>86</sup>

Wawancara juga dilakukan penulis terhadap ibu Yuliatin selaku ketua POKJA 1 TP PKK Desa Sruni, beliau berkata:

kadang ya disampaikan langsung sama mbk dina, kadang engga mbak, misal kaya kegiatan di POKJA 1 pengajian itu biasanya jadi satu sama arisan, khotmil Qur'an gitu, nah kan pasti ada konsumsinya mbak, itu saya dikasi uang sama mbak dina wes dan belanjanya itu sudah mbak dina yang ngatur jadi saya tinggal jalan, dan disitu saya sudah tau habis berapa, kadang saya juga sampaikan ke temen-temen anggota lainnya, kalau tadi saya beli nasi kotaknya habis berapa gitu, jadi cuma mulut ke mulut mbak<sup>87</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Hasanah selaku ketua POKJA 2 TP PKK Desa Sruni, beliau berkata:

anggota lainnya tau biasanya dari ketua POKJA nya yang punya kegiatan mbak soalnya kan yang dikasi uang sama mbak Dina itu ketua Pokjanya, tpi kadang juga disampaikan sama mbk Dina diakhir kegiatan waktu makan gitu.<sup>88</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Mar'tia selaku ketua POKJA 3 TP PKK Desa Sruni, beliau berkata:

jarang si mbak kalau disampaikan secara langsung, misal ini kaya kegiatan PESAT kalo taun kemarin kan Pawon Urip itu sama cuma beda namanya saja mbak, PESAT itu kan butuh bibit sayur bibit obat-obatan dan itu per rumah mbak, tpi kalo obat-obatan warga banyak punya jadi tidak perlu beli, nah yang beli itu bibit sayur, nah kemarin ini beli bibit terong, kangkung, cabe, tomat seinget saya itu, nah yang belanja ketuanya itu saya juga ikut jadi saya tau habis berapa, nanti ada temen-temen yang tanya saya kasih tau, jadi taunya lewat situ si mbak.<sup>89</sup>

<sup>86</sup> Nor Amirah, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 2 Desember 2025

<sup>87</sup> Yuliatin, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 4 Desember 2025

<sup>88</sup> Hasanah, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 4 Desember 2025

<sup>89</sup> Mar'tia, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 4 Desember 2025

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Suciati selaku ketua POKJA 4 TP PKK Desa Sruni, beliau berkata:

kalau penggunaan dana setiap kegiatan itu jarang mbak anggota yang tahu dan ketuanya juga jarang mau menyampaikan karena tidak ada yang bertanya dan kebanyakan percaya saja karena kegiatannya kan jalan, seperti kegiatan pembinaan pola pangan 3B ada konsumsinya jadi mereka tahu dananya buat konsumsi gitu.<sup>90</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus dan ketua POKJA TP PKK Desa Sruni, keterbukaan informasi pada tahap pelaksanaan kegiatan telah berlangsung secara terbatas dan bersifat informal. Informasi mengenai pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana umumnya diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat langsung, terutama ketua TP PKK dan ketua POKJA yang menerima atau mengelola dana kegiatan. Penyampaian informasi terkait penggunaan dana lebih sering dilakukan secara lisan pada saat maupun setelah kegiatan berlangsung dan belum menggunakan mekanisme penyampaian yang terstruktur kepada seluruh anggota.

Anggota yang terlibat dalam kegiatan atau berada di bawah koordinasi ketua POKJA pada umumnya mengetahui penggunaan dana kegiatan. Informasi tersebut diperoleh melalui penjelasan langsung ketua TP PKK, ketua POKJA, atau komunikasi antaranggota. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses

---

<sup>90</sup> Suciati, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 4 Desember 2025

informasi mengenai penggunaan dana kegiatan belum disampaikan secara menyeluruh dan rutin kepada seluruh anggota dan masih bergantung pada keterlibatan dalam kegiatan serta inisiatif penyampaian informasi. Keterbukaan informasi pada tahap pelaksanaan telah terlaksana dalam bentuk penyampaian langsung kepada pihak terkait dan berlangsung secara situasional tanpa pola penyampaian informasi yang sistematis.

## 2) Aksesibilitas

Aksesibilitas informasi dalam tahap pelaksanaan pada TP PKK Desa Sruni mengacu pada kemudahan anggota dalam memperoleh informasi yang telah disampaikan oleh pengurus terkait pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana. Pada tahap ini, aksesibilitas informasi tercermin dari saluran penyampaian informasi serta jangkauan informasi tersebut kepada anggota yang terlibat dalam kegiatan selama proses pelaksanaan berlangsung.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada ibu Susmita Audina selaku ketua TP PKK Desa Sruni, beliau berkata:

sebenarnya mudah anggota saya untuk mengetahui penggunaan dana kegiatan, saya juga pernah bicara misal ada yang mau ditanyakan perihal dana kegiatan bisa langsung tanya saya, pasti saya kasih tau semuanya tanpa saya tutupi, kan ada SPJ itu *dok* tinggal saya tunjukkan nota dan kwitansi nya. Tapi sejauh ini jarang ada yang tanya mereka percaya katanya, selain itu juga mereka pasti tau dari ketua POKJA-nya.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Susmita Audina, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 2 Desember 2025

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Rosidah selaku sekretaris TP PKK Desa Sruni, beliau berkata:

untuk melihat belanjanya apa saja bisa dilihat di RAB itu mbak, di RAB yang tidak ada rincian dana itu kegiatan per POKJA, itu bisa ditanyakan ke ketuanya ataupun saya, pasti dijawab mbak, soalnya kan yang mengatur uangnya itu ketuanya karena memang cuma ketuanya yang kuliah, tpi saya tau keluarnya kemana saja karena koordinasinya pasti sama saya, dan selama ini teman-teman kalau ditanya itu percaya saja ke mbak Dina gitu, dan mereka selama ini juga aktif dan semangat untuk ikut dan memerikan kegiatan PKK.<sup>92</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Nor Amirah selaku bendahara TP PKK Desa Sruni, beliau berkata:

bertanya langsung kepada ketuanya pasti dijawab mbak, dan setau saya selama ini anggota lainnya percaya semua ke ketuanya termasuk saya juga. Kadang juga tau dari mbk dina langsung, kadang tau dari mulut ke mulut gitu mbak kalo ada kegiatan apa aja pengeluarannya gitu.<sup>93</sup>

Wawancara juga dilakukan terhadap ibu Yuliatin selaku ketua POKJA 1 TP PKK Desa Sruni, beliau berkata:

seperti yang sudah saya sampaikan barusan mbak, bisa langsung tanya ke mbk Dina pasti dikasi tau, pernah dulu ada yang tanya dikasi tau sama ketuanya, tpi kebanyakan percaya aja si mbak, saya juga gitu.<sup>94</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Hasanah selaku ketua POKJA 2 TP PKK Desa Sruni, beliau berkata:

biasanya ketuanya itu nawarin mbak kalau ada yang mau tanya terkait pengeluaran dana misal untuk kegiatan pembinaan UP2KP suruh langsung tanya, kadang juga langsung dikasih tau habis berapa gitu. tapi selama ini menurut saya mbk Dina itu jujur mbak, Sudah 3 tahunan

<sup>92</sup> Rosidah, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 2 Desember 2025

<sup>93</sup> Nor Amirah, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 2 Desember 2025

<sup>94</sup> Yuliatin, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 4 Desember 2025

jadi ketua PKK Sruni dan aktif gitu lah mbak buat kegiatan ibu-ibu meskipun ga besar , jadi temen-temen disini percaya.<sup>95</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Mar'tia selaku ketua POKJA 3 TP PKK Desa Sruni, beliau berkata: “kalau pengen tahu ya tinggal tanya ke mbak Dina itu ketuanya, kalau untuk melihat laporannya ga pernah mbk. Disisi lain saya percaya mbk karena kegiatannya terus berjalan meskipun bukan kegiatan yang besar”<sup>96</sup>

Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Ibu Suciati selaku ketua POKJA 4 TP PKK Desa Sruni, beliau mengatakan bahwa: “biasanya bisa tanya langsung ke mbak Dina, tapi kalau saya ga pernah mbk liat laporannya itu, biasanya hanya tau habis berapa dan untuk apa saja gitu”<sup>97</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus inti dan ketua POKJA TP PKK Desa Sruni, dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas informasi pada tahap pelaksanaan kegiatan telah tersedia melalui jalur komunikasi langsung antara pengurus dan anggota. Anggota memiliki kemudahan untuk memperoleh informasi terkait pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana dengan cara bertanya langsung kepada ketua TP PKK, sekretaris, bendahara, maupun ketua POKJA masing-masing. Informasi yang diberikan meliputi penggunaan dana kegiatan, alokasi belanja,

<sup>95</sup> Hasanah, diwawancarai oleh Penulis, Sruni, 4 Desember 2025

<sup>96</sup> Mar'tia, diwawancarai oleh Penulis, Sruni, 4 Desember 2025

<sup>97</sup> Suciati, diwawancarai oleh Penulis, Sruni, 4 Desember 2025

serta bukti pendukung seperti nota dan kwitansi apabila diperlukan.

Saluran penyampaian informasi yang digunakan bersifat informal, yaitu komunikasi lisan secara langsung dan penyampaian dari mulut ke mulut melalui ketua POKJA. Jangkauan informasi mencakup anggota yang terlibat dalam kegiatan, terutama melalui koordinasi internal antar pengurus. Kepercayaan anggota terhadap ketua TP PKK menjadi faktor yang mendukung kemudahan akses informasi, sehingga anggota merasa cukup mengetahui informasi penggunaan dana tanpa harus melihat laporan tertulis secara langsung.

Dengan demikian, pada tahap pelaksanaan, aksesibilitas informasi di TP PKK Desa Sruni telah berjalan melalui kemudahan komunikasi dan keterbukaan pengurus dalam memberikan penjelasan kepada anggota yang membutuhkan informasi.

### **3) Keterlibatan Publik**

Keterlibatan publik dalam tahap pelaksanaan pengelolaan dana TP PKK Desa Sruni menunjukkan sejauh mana anggota PKK dan masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, baik dalam bentuk partisipasi fisik maupun nonfisik. Pada tahap ini, keterlibatan publik tidak hanya diukur dari keikutsertaan dalam kegiatan, tetapi juga dari pemahaman

anggota terhadap penggunaan dana selama kegiatan berlangsung. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan terhadap ibu Susmita Audina selaku ketua TP PKK Desa Sruni, beliau menyampaikan:

kalau teman-teman anggota sangat antusias sekali kalau ada kegiatan PKK meskipun ada beberapa yang nakal gitu lah, tapi mereka kompak. Seperti PESAT kemarin ini ya mereka antusias bantu warga, begitu juga warga ada yang nurut ada yang masih sibuk Bertani jadi menyesuaikan yang punya rumah, sebenarnya disini ya yang susah itu mengajak warga untuk ikut kegiatan misal ada kegiatan senam, pengajian, pembinaan, itu mereka banyak yang tidak hadir dan alasannya kalau pagi pergi ke sawah cari rumput gitu meskipun ada beberapa warga yang antusias ikut, sebenarnya permasalahan lokal di desa sruni itu.<sup>98</sup>

Sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Rosidah selaku sekretaris TP PKK Desa Sruni, beliau berkata:

pasti dilibatkan semua mbak kalau anggota itu, dan pasti ada yang beralasan tidak hadir, tapi banyak yang antusias juga, kalau warga sedikit mbak alasannya itu wes bertani, kalau orang sini kebanyakan mencari rumput mbak buat sapi itu, jadi kalau ada kegiatan pagi-pagi itu susah yang mau ikut, sumber penhasilannya dari situ.<sup>99</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Nor Amirah selaku bendahara TP PKK Desa Sruni, beliau berkata: “pasti selalu ikut mbak kalau anggota, kalau warga jarang karena sibuk bertani kalo disini, macem-macem cari rumput kebanyakan”<sup>100</sup>

Wawancara juga dilakukan kepada Ibu Yuliatin selaku ketua POKJA 1 TP PKK Desa Sruni, beliau berkata:

<sup>98</sup> Susmita Audina, diwawancarai oleh Penulis, Sruni, 2 Desember 2025

<sup>99</sup> Rosidah, diwawancarai oleh Penulis, Sruni, 2 Desember 2025

<sup>100</sup> Nor Amirah, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 2 Desember 2025

kalau saya selalu ikut mbak, lumayan ada kegiatan, dulu sebelum mbak Dina jadi ketua jarang ada kegiatan perkumpulan ibu-ibu, Sekarang setiap minggu ada. Saya juga sudah lama di PKK ini mbak. tapi ya namanya ibuk - ibuk ya gitu wes mbak kalau udah punya anak kecil jarang sudah untuk hadir tpi masih ikut kegiatan gitu, apalagi warga sini mbak bisa dihitung yang ikut karena sibuk ke sawah semua kalo pagi.<sup>101</sup>

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Ibu Hasanah selaku ketua POKJA 2 TP PKK Desa Sruni, beliau berkata: “selalu dilibatkan mbak semua anggota, terutama saya juga aktif, kalau warga ada yang ikut tapi kebanyakan ga ikut mbak soalnya disini mbaknya tau sendiri pekerjaan utamanya itu tani ya itu kendalanya wes.”<sup>102</sup>

Pengalaman yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Mar'tia selaku ketua POKJA 3 TP PKK Desa Sruni, beliau menyampaikan:

misal ada kegiatan pembinaan itu dibagi tugasnya sama ketunya biasanya yang beli konsumsinya ketua POKJA nya tpi hanya tinggal ngambil gitu yang mesenkan ketuanya, jadi anggotanya hanya tinggal menjalankan arahan gitu, warga juga sama tinggal mengikuti kegiatannya tapi jarang ada yang mau ikut karena keterbatasan waktu.<sup>103</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Suciati selaku ketua POKJA 4 TP PKK Desa Sruni, beliau berkata: “selalu aktif ikut mbak, dan dilibatkan semuanya, kan juga ada absensinya,

<sup>101</sup> Yuliati, diwawancarai oleh Penulis, Sruni, 4 Desember 2025

<sup>102</sup> Hasanah, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 4 Desember 2025

<sup>103</sup> Mar'tia, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 4 Desember 2025

kalau warga setau saya jarang si mbak kecuali PESAT itu kan memang dirumah warga masing-masing”<sup>104</sup>

Wawancara juga dilakukan terhadap salah satu warga Desa Sruni Ibu Hamidah, beliau berkata: “kegiatan di balai desa itu ya *dok*, jarang saya ikut karena kalau pagi ke sawah”<sup>105</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus TP PKK Desa Sruni, ketua Pokja, serta perwakilan warga, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan publik pada tahap pelaksanaan pengelolaan dana PKK lebih banyak ditunjukkan melalui partisipasi aktif anggota PKK dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Anggota PKK secara umum terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan, menjalankan tugas yang telah ditetapkan oleh pengurus, serta menunjukkan antusiasme dalam mengikuti program-program PKK yang berlangsung secara rutin.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas di antara pengurus dan anggota, di mana peran anggota lebih difokuskan pada pelaksanaan teknis kegiatan sesuai arahan ketua. Keterlibatan anggota dalam aspek pengambilan keputusan maupun pengelolaan dana pada tahap pelaksanaan belum menjadi bagian dari peran yang dijalankan, sehingga pemahaman anggota terhadap penggunaan dana bersifat terbatas pada kebutuhan kegiatan yang dilaksanakan.

<sup>104</sup> Suciati, diwawancarai oleh Penulis, Sruni, 4 Desember 2025

<sup>105</sup> Hamidah, diwawancarai oleh Penulis, Sruni, 4 Desember 2025

Keterlibatan masyarakat atau warga Desa Sruni dalam pelaksanaan kegiatan PKK menunjukkan tingkat partisipasi yang relatif rendah. Kehadiran warga dalam kegiatan PKK umumnya dipengaruhi oleh kondisi pekerjaan utama sebagai petani, sehingga keterlibatan warga lebih bersifat situasional dan menyesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatan. Partisipasi warga lebih terlihat pada kegiatan tertentu yang dilaksanakan langsung di lingkungan rumah warga.

Secara keseluruhan, keterlibatan publik pada tahap pelaksanaan pengelolaan dana TP PKK Desa Sruni tercermin melalui keikutsertaan aktif anggota PKK dalam menjalankan kegiatan yang telah direncanakan serta keterlibatan terbatas masyarakat dalam kegiatan tertentu. Pola keterlibatan ini menggambarkan bahwa pelaksanaan kegiatan PKK telah didukung oleh partisipasi internal organisasi, sementara keterlibatan masyarakat berlangsung sesuai dengan kondisi dan karakteristik sosial ekonomi setempat.

#### **4) Kejujuran dan Keandalan**

Kejujuran dan keandalan dalam tahap pelaksanaan pengelolaan dana TP PKK merupakan aspek penting yang menentukan tingkat kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan yang sedang berlangsung. Pada tahap ini, kejujuran tercermin dari kesesuaian antara rencana

kegiatan dan realisasi pelaksanaan, termasuk penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan kegiatan di lapangan.

Sementara itu, keandalan ditunjukkan melalui kemampuan pengurus dalam menyampaikan informasi pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana secara benar, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan selama kegiatan berlangsung.

Maka dari itu berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Ibu Susmita Audina selaku ketua TP PKK Desa Sruni, beliau menyampaikan:

tidak semua kegiatan yang dilaksanakan itu sesuai sama rencana kadang juga ada kegiatan yang mendadak, seperti kegiatan pembinaan pola pangan 3B, itu tidak ada di rencana, jadi dananya juga menyesuaikan sekiranya tidak membengkak, kegiatan yang dadakan itu biasanya saya sebarikan lewat grup WA kemudian kita bahas waktu ada perkumpulan rutin.<sup>106</sup>

Sejalan dengan pernyataan tersebut Ibu Rosidah selaku

sekretaris TP PKK Desa Sruni juga menyampaikan bahwa:

semua kegiatan sudah jalan seperti yang direncanakan mbak, seperti pengajian, senam, kerja bakti, PESAT, Posyandu. Adapun kegiatan yang tidak terencana tapi terlaksana seperti kegiatan pembinaan, dananya juga menyesuaikan dan terkait yang menulis setiap kebutuhan dana kegiatannya itu mbak Dina.<sup>107</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Nor Amirah

selaku bendahara TP PKK Desa Sruni, beliau berkata:

selama ini semua kegiatannya terlaksana, dan ada yang tidak terlaksana, misal senam itu kan setiap minggu satu

<sup>106</sup> Susmita Audina, diwawancarai oleh Penulis, Sruni, 2 Desember 2025

<sup>107</sup> Rosidah, diwawancarai oleh Penulis, Sruni, 2 Desember 2025

kali, nah kadang minggu berikutnya libur gitu aja sebenarnya, kalau yang lain terlaksana karena dipantau juga sama PKK Kecamatan mbak, kembali lagi urusan pencatatan dana saya tidak ikut-ikut mengerjakan tpi saya tau.<sup>108</sup>

Wawancara juga dilakukan terhadap Ibu Yuliatin selaku ketua POKJA 1 TP PKK Desa Sruni, beliau menyampaikan: “selama kegiatan berlangsung pasti dikasi tau mbak kegiatannya seperti apa. Selama kegiatanpun saya melihat kegiatannya sesuai dengan yang disampaikan sama ketuanya”<sup>109</sup>

Sejalan dengan pernyataan tersebut Ibu Hasanah selaku ketua POKJA 2 TP PKK Desa Sruni juga menyampaikan bahwa:

kegiatannya kan memang sudah rutin mbak, jadi ya menurut saya selama ini terlaksana, walaupun ada kegiatan dadakan kita dikasih tau. Urusan uangnya juga selama ini meskipun saya tidak tau detailnya, tapi saya percaya lewat kegiatan-kegiatan yang aktif dijalankan itu sudah keliatan dananya lari kemana.<sup>110</sup>

Pandangan yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Mar'tia selaku ketua POKJA 3 TP PKK Desa Sruni, beliau berkata: “kalau kegiatannya selama ini yang saya rasakan berjalan sesuai rencana si mbak di tingkat desa lo ya, dan juga kegiatan rutin juga, urusan danapun saya percaya lewat kegiatan-kegiatan yang aktif dijalankan.”<sup>111</sup>

<sup>108</sup> Nor Amirah, diwawancara oleh Penulis, Sruni, 2 Desember 2025

<sup>109</sup> Yuliatin, diwawancara oleh penulis, Sruni, 4 Desember 2025

<sup>110</sup> Hasanah, diwawancara oleh penulis, Sruni, 4 Desember 2025

<sup>111</sup> Mar'tia, diwawancara oleh Penulis, Sruni, 4 Desember 2025

Pengalaman yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Suciati selaku ketua POKJA 4 TP PKK Desa Sruni, beliau berkata:“selama ini kegiatannya aktif-aktif saja mbak, terutama di POKJA 4 yang membidangi kesehatan seperti posyandu gitu”<sup>112</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus TP PKK Desa Sruni dan para ketua Pokja, dapat disimpulkan bahwa kejujuran dan keandalan pada tahap pelaksanaan pengelolaan dana tercermin melalui pelaksanaan kegiatan yang berjalan sesuai dengan kondisi lapangan serta penyampaian informasi yang disesuaikan dengan realisasi kegiatan. Pelaksanaan kegiatan rutin dan kegiatan tambahan yang bersifat insidental dilaksanakan dengan penyesuaian terhadap kebutuhan aktual, sehingga penggunaan dana mengikuti dinamika pelaksanaan kegiatan.

Pengurus TP PKK menyampaikan informasi pelaksanaan kegiatan dan kebutuhan dana kepada anggota melalui media komunikasi yang tersedia serta forum pertemuan rutin. Pencatatan pengeluaran dana dilakukan berdasarkan kebutuhan kegiatan yang dilaksanakan dan disesuaikan dengan realisasi di lapangan. Informasi mengenai pelaksanaan kegiatan juga dapat dipahami oleh pengurus Pokja dan anggota melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan yang berlangsung.

---

<sup>112</sup> Suciati, diwawancari oleh Penulis, Sruni, 2 Desember 2025

Keandalan pengelolaan dana pada tahap pelaksanaan ditunjukkan melalui konsistensi pelaksanaan kegiatan yang dapat diamati secara langsung oleh anggota serta adanya pencatatan penggunaan dana oleh pengurus yang berwenang. Kepercayaan pengurus Pokja terhadap pengelolaan dana tumbuh seiring dengan keberlangsungan kegiatan yang berjalan aktif dan sesuai dengan informasi yang disampaikan selama pelaksanaan.

Secara keseluruhan, indikator kejujuran dan keandalan pada tahap pelaksanaan pengelolaan dana TP PKK Desa Sruni tercermin dari kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dan informasi yang disampaikan oleh pengurus, serta dari pencatatan penggunaan dana yang mengikuti realisasi kebutuhan kegiatan di lapangan.

#### **5) Responsivitas**

Responsivitas pada tahap pelaksanaan pengelolaan dana TP PKK Desa Sruni menunjukkan sejauh mana pengurus mampu menanggapi kebutuhan informasi, saran, serta masukan yang muncul selama kegiatan berlangsung. Pada tahap ini, responsivitas tidak hanya berkaitan dengan penerimaan masukan, tetapi juga mencakup proses komunikasi aktif antara pengurus dan anggota dalam pelaksanaan kegiatan serta penggunaan dana. Pengurus diharapkan mampu memberikan penjelasan, klarifikasi, maupun penyesuaian apabila terdapat pertanyaan, keluhan, atau

usulan dari anggota maupun masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan dan realisasi penggunaan dana. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap Ibu Susmita Audina selaku ketua TP PKK Desa Sruni, beliau menyampaikan:

kalau masukan dari anggota itu hanya tentang kegiatannya dok dan mereka tidak pernah memberi masukan tentang penggunaan uangnya itu, tapi ya misal ada masukan ya saya terima dan perlu didiskusikan, dan selama ini aman-aman saja tidak ada yang bertanya perihal itu.<sup>113</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Rosidah selaku sekretaris TP PKK Desa Sruni, beliau berkata: “selama ini tidak ada *mbak* anggota itu tanya-tanya atau beri masukan uangnya itu untuk apa saja, seperti yang saya katakan mereka percaya saja sama ketuanya”<sup>114</sup>

Pandangan yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Nor Amirah selaku bendara TP PKK Desa Sruni, beliau menyampaikan: “tidak ada *mbak* teman-teman anggota itu hanya tinggal ikut melaksanakan kegiatan saja, masukan ya masukan kecil tentang kegiatannya saja”<sup>115</sup>

Wawancara juga dilakukan terhadap Ibu Yuliatin selaku ketua POKJA 1 TP PKK Desa Sruni, beliau berkata: “selama ini teman-teman aman-aman saja tidak ada masukan, hanya ada

<sup>113</sup> Susmita Audina, diwawancarai oleh Penulis, Sruni, 2 Desember 2025

<sup>114</sup> Rosidah, diwawancarai oleh Penulis, Sruni, 2 Desember 2025

<sup>115</sup> Nor Amirah, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 2 Desember 2025

masukan kecil terkait kegiatan, mereka termasuk saya percaya karena yang sekolah tinggi itu cuma ketuanya.”<sup>116</sup>

Pandangan yang sama juga di ungkapkan oleh Ibu Hasanah selaku ketua POKJA 2 TP PKK Desa Sruni, beliau menyampaikan: “adanya hanya masukan kecil kalau ada kegiatan itu mbak, masukan uang kita gada yang berani itu apa kata mbak Dina wes, soalnya ketuanya itu yang pintar”<sup>117</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Mar'tia selaku ketua POKJA 3 TP PKK Desa Sruni, beliau berkata: “kita, dan termasuk saya mbak kalau soal uangnya itu diserahkan ke mbak Dina itu ketuanya, karena menurut saya bisa dipercaya, dan yang sekolah sampai kuliah cuma ketuanya”<sup>118</sup>

Pengalaman yang sama juga disampaikan oleh Ibu Suciati selaku ketua POKJA 4 TP PKK Desa Sruni, beliau berkata:

meskipun saya dekat sama ketuanya, kalau urusan dana tidak pernah ikut-ikutan, intinya kita tinggal mengikuti arahan di setiap kegiatan, masukan pasti ada tetapi hanya tentang kegiatannya ditambah ini, ditambah itu, cuma gitu”<sup>119</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua, sekretaris, bendahara, serta ketua POKJA TP PKK Desa Sruni, dapat disimpulkan bahwa responsivitas pada tahap pelaksanaan pengelolaan dana lebih banyak terlihat dalam aspek pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan pengelolaan dan penggunaan dana.

<sup>116</sup> Yuliatin, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 4 Desember 2025

<sup>117</sup> Hasanah, diwawancarai oleh Penulis, Sruni, 4 Desember 2025

<sup>118</sup> Mar'tia, diwawancarai oleh Penulis, Sruni, 4 Desember 2025

<sup>119</sup> Suciati, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 4 Desember 2025

Masukan dari anggota maupun pengurus POKJA umumnya disampaikan dalam bentuk usulan teknis kegiatan, seperti penambahan atau penyesuaian pelaksanaan aktivitas di lapangan. Sementara itu, masukan, pertanyaan, maupun diskusi terkait penggunaan dana hampir tidak ditemukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi dan respons pengurus terfokus pada kelancaran kegiatan, sedangkan aspek pendanaan sepenuhnya dipercayakan kepada ketua TP PKK. Tingkat kepercayaan anggota dan pengurus POKJA terhadap ketua menjadi faktor utama yang memengaruhi minimnya masukan terkait pengelolaan dana pada tahap pelaksanaan. Dengan demikian, responsivitas pada tahap pelaksanaan tercermin dari keterbukaan pengurus dalam menerima dan menindaklanjuti masukan terkait kegiatan, sementara responsivitas terhadap kebutuhan informasi penggunaan dana belum menjadi bagian yang aktif dalam interaksi antara pengurus dan anggota.

### **c. Tranparansi Tahap Penatausahaan**

Penatausahaan keuangan TP PKK dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku keuangan TP PKK. Di TP PKK Desa Sruni dilakukan melalui pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dana ke dalam buku keuangan TP PKK. Pencatatan

tersebut mencakup dana yang diterima dari APBDES serta pengeluaran yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PKK di tingkat desa. Dalam praktiknya, seluruh proses penatausahaan keuangan dikoordinasikan dan dikerjakan langsung oleh ketua TP PKK Desa Sruni.

Buku keuangan yang digunakan dalam penatausahaan keuangan TP PKK Desa Sruni berupa buku kas umum yang berfungsi sebagai sarana utama pencatatan arus kas masuk dan keluar. Pencatatan dalam buku kas umum dilakukan secara berkelanjutan dan ditutup pada setiap akhir bulan sebagai bentuk penertiban administrasi keuangan. Selain itu, dana operasional yang diterima oleh TP PKK Desa Sruni dalam satu tahun anggaran dicairkan sebanyak dua kali dan dicatat dalam buku kas umum sesuai dengan waktu penerimaan dana. Pola penatausahaan ini memudahkan pengurus dalam memantau kondisi keuangan serta menelusuri penggunaan dana selama periode kegiatan berlangsung.

Transparansi pada tahap penatausahaan dianalisis melalui indikator kejujuran dan keandalan karena tahap ini berkaitan langsung dengan proses pencatatan dan pengadministrasian keuangan, sehingga kualitas informasi keuangan menjadi aspek utama dalam menilai transparansi.

### 1) Kejujuran dan Keandalan

Dalam pelaksanaan penatausahaan tersebut, kualitas pencatatan keuangan menjadi aspek penting yang menentukan tingkat transparansi pengelolaan dana TP PKK Desa Sruni. Oleh karena itu, indikator kejujuran dan keandalan menjadi penting untuk memastikan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana dilakukan secara benar, dapat dipercaya, serta mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Berdasarkan wawancara terhadap Ibu Susmita Audina selaku ketua TP PKK Desa Sruni, beliau menyampaikan:

semua penerimaan dan pengeluaran dana PKK dicatat di BKU *dok*, penerimaannya berupa pencairan dana dari APBDES tidak ada lagi dan semua pengeluarannya baik untuk kegiatan atau untuk membeli peralatan selalu disertai dengan nota dan kwitansi beserta absensi dan kehadiran anggota yang ikut. Dan itu semua saya yang mengerjakan sebenarnya ini tugas bendahara namun karena tidak bisa mengoperasikan laptop dan sejenisnya jadi saya yang mengerjakan, namun sekretaris dan bendahara tau alur uangnya ini.<sup>120</sup>

Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Ibu Rosidah selaku sekretaris TP PKK Desa Sruni, beliau berkata: “semua yang mencatat dan mengerjakan laporan itu ketuanya *mbak*, hal itu karena bendaharanya punya keterbatasan di bidang laptop, tpi saya tau *mbak* pencatatan uangnya itu.”<sup>121</sup>

<sup>120</sup> Susmita Audina, diwawancarai oleh Penulis, Sruni, 2 Desember 2025

<sup>121</sup> Rosidah, diwawancarai oleh Penulis, 2 Desember 2025

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Nor Amirah selaku bendahara TP PKK Desa Sruni, beliau menyampaikan:

penerimaan dan pengeluaran uang PKK itu yang mengerjakan mbak Dina, meskipun saya bendaharanya saya hanya formalitas saja untuk tanda tangan dan lainnya karena saya tidak tau mbak mengoperasikan kayak gitu, tapi saya tau alur dananya itu.<sup>122</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua, sekretaris, dan bendahara TP PKK Desa Sruni, penatausahaan keuangan pada tahap pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana telah dilaksanakan secara konsisten dan terbuka. Seluruh penerimaan dana yang bersumber dari APBDes serta pengeluaran yang digunakan untuk mendukung kegiatan PKK dicatat ke dalam buku kas umum sebagai media utama pencatatan keuangan. Pencatatan tersebut dilakukan secara berkelanjutan dan dilengkapi dengan bukti transaksi berupa nota, kwitansi, serta dokumen pendukung lainnya.

Indikator kejujuran tercermin dari praktik pencatatan seluruh arus kas tanpa adanya sumber dana lain di luar yang telah ditetapkan, sehingga informasi keuangan yang dicatat mencerminkan kondisi penerimaan dan pengeluaran dana yang sebenarnya. Keseragaman informasi yang disampaikan oleh ketua, sekretaris, dan bendahara menunjukkan bahwa tidak

---

<sup>122</sup> Nor Amirah, diwawancarai oleh penulis, 2 Desember 2025

terdapat perbedaan pemahaman terkait alur keluar masuk dana PKK.

Disisi lain, indikator keandalan ditunjukkan melalui kelengkapan bukti transaksi serta keteraturan pencatatan dalam buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan. Pengetahuan pengurus inti terhadap alur pengelolaan dana memperkuat bahwa informasi keuangan yang dicatat dapat dipahami dan dipercaya sebagai dasar penelusuran penggunaan dana selama kegiatan berlangsung.

Untuk memperkuat hasil wawancara tersebut, peneliti menelaah dokumen pendukung penatausahaan keuangan berupa Buku Kas Umum (BKU) TP PKK Desa Sruni sebagai sumber data tertulis yang mencatat rinci penerimaan dan pengeluaran dana.

## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Buku Kas Umum (BKU)  
TP PKK Desa Sruni Tahun 2024

| RUBRIK-APSA |            |             | URAIAN                                 | PENERIMAAN (Rp) | PENGELUARAN (Rp) | SALDO (Rp)   |
|-------------|------------|-------------|----------------------------------------|-----------------|------------------|--------------|
| NO          | TANGGAL    | NO. KONTANG |                                        |                 |                  |              |
| 1           | 01-04-2024 |             | Saldo Bulan Baru                       | 0               | 0                | 0            |
| 2           | 03-04-2024 |             | Penerimaan Hibah Nasional              | 5.500.000,00    |                  | 5.500.000,00 |
| 3           | 09-04-2024 |             | Belanja ATK                            |                 | 500.000,00       | 4.900.000,00 |
| 4           | 17-04-2024 |             | Belanja Kebutuhan Umum                 |                 | 250.000,00       | 4.650.000,00 |
| 5           | 26-04-2024 |             | Upacara 100 Hari Kemerdekaan           | 5.000,00        |                  | 4.655.000,00 |
| 6           | 17-04-2024 |             | Obat PPH 23 atau belanja konsumsi umum |                 | 5.000,00         | 4.650.000,00 |
| 7           | 17-04-2024 |             | Obat PPH 23 atau belanja konsumsi umum |                 | 25.000,00        | 4.625.000,00 |
| 8           | 17-04-2024 |             | Obat PPH 23 atau belanja konsumsi umum |                 | 25.000,00        | 4.600.000,00 |
| 9           | 17-04-2024 |             | Obat PPH 23 atau belanja konsumsi umum |                 | 25.000,00        | 4.575.000,00 |
| 10          | 17-04-2024 |             | Obat PPH 23 atau belanja konsumsi umum |                 | 25.000,00        | 4.550.000,00 |
| Jumlah      |            |             |                                        | 5.500.000,00    | 1.180.000,00     | 4.350.000,00 |

Pada hari Selasa, 30 April 2024 Buku Kas Umum ditutup dalam keadaan sebagai berikut:  
 Saldo Saldo Tunai Rp 4.350.000,-  
 Saldo Saldo Bank Rp 0,-  
 Jumlah Rp 4.350.000,-

  
 Bertanggung Jawab TP PKK Desa Sruni  
 Ny. Nur Anisah

Gambar 4.4  
BKU TP PKK Desa Sruni 2024

Dokumen BKU tersebut menunjukkan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana yang dilakukan secara periodik dan sistematis.

#### **d. Transparansi Tahap Pelaporan**

Pelaporan merupakan salah satu tahapan penting dalam pengelolaan dana TP PKK dilaksanakan pada akhir tahun. Pada tahap ini, pengurus menyusun laporan yang mencakup pelaksanaan keuangan serta realisasi kegiatan yang telah dilakukan selama periode tertentu. Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai catatan internal pengurus, tetapi juga menjadi sarana untuk memberikan informasi kepada anggota TP PKK Desa Sruni maupun pihak terkait mengenai penggunaan dana dan pencapaian kegiatan. Dengan demikian, tahap pelaporan menjadi momen penting untuk menilai sejauh mana prinsip transparansi diterapkan dalam pengelolaan dana TP PKK Desa Sruni..

##### **1) Keterbukaan informasi**

Keterbukaan informasi dalam pelaporan menjadi hal yang sangat penting dalam pengelolaan dana terutama pada TP PKK Desa Sruni. Dengan adanya keterbukaan informasi pelaporan bisa dapat dirasakan secara bersama bukan hanya tersedia bagi pihak yang berkepentingan, tetapi juga tersedia bagi anggota atau pihak lain yang berhak untuk mengetahuinya. Dalam hal itu keterbukaan informasi dalam tahap pelaporan perlu dilihat dari praktik yang terjadi di lapangan. Guna mengetahui bagaimana pengurus TP

PKK Desa Sruni menyampaikan informasi pelaporan keuangan dan realisasi kegiatan. Berdasarkan hal itu, wawancara dilakukan terhadap Ibu Susmita Audina selaku ketua TP PKK Desa Sruni, beliau menyampaikan: “penyampaian laporan kegiatan sama keuangan tidak ada *dok*, karena semua saya yang kerjakan, kalau sudah selesai saya arsip”<sup>123</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Rosidah selaku sekretaris TP PKK Desa Sruni, beliau berkata: “tidak ada penyampaian laporan mbak disini, semua dikerjakan sama ketuanya”

Pandangan yang sama juga di ungkapkan oleh Ibu Nor Amirah selaku bendahara TP PKK Desa Sruni, beliau berkata: “kalau laporan selesai langsung di simpan mbak biasanya, jadi tidak ada penyampaian ke anggota, walaupun di adakan rapat itu perkumpulan biasa dan tidak sampai mendalam ke laporan”<sup>124</sup>

Wawancara juga dilakukan terhadap Ibu Yuliatin selaku ketua POKJA 1 TP PKK Desa Sruni, beliau mengatakan: “selama ini tidak ada *mbak*, walaupun kumpul tidak sampai bahas hasil laporan itu”<sup>125</sup>

Pengalaman yang sama juga disampaikan oleh Ibu Hasanah selaku ketua POKJA 2 TP PKK Desa Sruni, beliau

---

<sup>123</sup> Susmita Audina, diwawancari oleh penulis, Sruni, 2 Desember 2025

<sup>124</sup> Nor Amirah, diwawancarai oleh penulis, 4 Desember 2025

<sup>125</sup> Yuliatin, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 4 Desember 2025

berkata: “tidak ada seperti itu *mbak*, saya juga tidak tahu bentuk laporannya itu, rapat juga hanya digunakan bahas kegiatan dan evaluasi”<sup>126</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Mar'tia selaku ketua POKJA 3 TP PKK Desa Sruni, beliau berkata: “laporan yang disampaikan ke anggota itu tidak ada *mbak*, dan yang mengetahui isinya hanya ketuanya”<sup>127</sup>

Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Ibu Suciati selaku ketua POKJA 4 TP PKK Desa Sruni, beliau berkata: “setahu aya laporannya dibuat karena memang disuruh pihak kecamatan *mbak*, jadi hanya formalitas saja penyampaianya tidak formal”<sup>128</sup>

Sejalan dengan pernyataan yang di sampaikan oleh Bapak Adi Antono salah satu perangkat Desa Sruni, beliau menyampaikan: “kalau laporannya lengkap *mbak* ke desa”<sup>129</sup>

Pernyataan yang sama juga di ungkapkan oleh Burda Arief Mashudi selaku ketua TP PKK Kecamatan Klakah, beliau mengatakan: “dari segi pelaporan, Desa Sruni sudah bagus *mbak* administrasinya selalu dikerjakan.”<sup>130</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua, sekretaris, bendahara, ketua Pokja 1 sampai dengan Pokja 4 TP PKK Desa Sruni, pemerintah desa, dan ketua TP PKK Kec. Klakah terlihat

<sup>126</sup> Hasanah, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 4 Desember 2025

<sup>127</sup> Marti'a, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 4 Desember 2025

<sup>128</sup> Suciati, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 4 Desember 2025

<sup>129</sup> Adi Antono, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 5 Desember 2025

<sup>130</sup> Arief Mashudi, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 8 Desember 2025

adanya pola yang sama terkait praktik keterbukaan informasi pada tahap pelaporan. Laporan keuangan dan laporan realisasi kegiatan memang disusun pada akhir periode, namun tidak disampaikan kepada anggota TP PKK secara menyeluruh. Laporan tersebut disimpan dan diarsipkan oleh ketua tanpa adanya mekanisme penyampaian atau sosialisasi isi laporan kepada anggota dalam forum resmi.

Ketiadaan mekanisme penyampaian laporan menyebabkan proses pelaporan hanya berfungsi sebagai arsip internal pengurus. Tidak terdapat forum khusus yang digunakan untuk memaparkan laporan keuangan maupun realisasi kegiatan kepada anggota. Rapat yang dilaksanakan lebih difokuskan pada pembahasan kegiatan dan evaluasi program, tanpa disertai pemaparan hasil pelaporan secara tertulis maupun lisan.

Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya pengetahuan anggota terhadap laporan yang telah disusun. Anggota, termasuk ketua pokja, tidak mengetahui bentuk, format, maupun isi laporan keuangan dan realisasi kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun laporan telah dibuat, informasi pelaporan belum terbuka bagi anggota sebagai pihak yang berhak mengetahui pengelolaan dana TP PKK.

Dengan demikian, keterbukaan informasi pada tahap pelaporan masih terbatas pada pihak tertentu, khususnya ketua

sebagai pengelola laporan. Informasi pelaporan belum dapat diakses dan dipahami secara bersama oleh seluruh anggota TP PKK Desa Sruni, sehingga prinsip keterbukaan informasi dalam pengelolaan dana belum terwujud secara optimal pada tahap pelaporan.

Kondisi tersebut mencerminkan Gambaran umum praktik transparansi dalam pengelolaan dana TP PKK Desa Sruni. Berdasarkan keseluruhan tahapan pengelolaan dana yang telah dianalisis, praktik transparansi dalam pengelolaan dana TP PKK Desa Sruni menunjukkan pola keterbukaan yang berlangsung secara internal melalui komunikasi langsung dan keterlibatan pengurus inti. Informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan lebih banyak disampaikan secara lisan dan situasional, dengan peran ketua yang dominan dalam pengelolaan dan penyampaian informasi. Pencatatan serta pengadministrasian keuangan telah dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif, namun penyampaian informasi tersebut belum menjadi bagian dari mekanisme formal yang dapat diakses secara bersama oleh seluruh anggota TP PKK.

## **2. Tingkat Akuntabilitas Pengurus TP PKK Desa Sruni dalam Mempertanggungjawabkan Dana Organisasi kepada Anggota, Masyarakat, dan Pemerintah Desa**

Akuntabilitas merupakan prinsip yang menekankan kewajiban pengurus organisasi untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan yang diambil, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana organisasi. Dalam konteks TP PKK Desa Sruni, akuntabilitas pengelolaan dana tidak hanya dilihat dari adanya pencatatan dan laporan keuangan, tetapi juga dari proses pengambilan keputusan, kejelasan sasaran penggunaan dana, konsistensi pelaksanaan program, serta akses anggota dan pihak terkait terhadap informasi pertanggungjawaban. Oleh karena itu, tingkat akuntabilitas pengurus TP PKK Desa Sruni dianalisis berdasarkan beberapa indikator yang menggambarkan bagaimana keputusan pengelolaan dana dipertanggungjawabkan kepada anggota, masyarakat, dan pemerintah desa.

### **a. Proses Pengambilan dan pendokumentasian Keputusan Pengelolaan Dana**

Proses pengambilan Keputusan merupakan aspek penting dalam akuntabilitas pengelolaan dana organisasi. Akuntabilitas tercermin apabila keputusan yang diambil berkaitan dengan penggunaan dana dilakukan melalui mekanisme yang jelas, terdokumentasi, serta sesuai dengan nilai dan etika yang berlaku dalam organisasi. Dalam konteks TP PKK Desa Sruni, indikator ini

digunakan untuk melihat bagaimana Keputusan mengenai perencanaan kegiatan dan penggunaan dana dibuat, apakah dituangkan secara tertulis, serta sejauh mana keputusan tersebut dapat ditelusuri sebagai dasar pertanggungjawaban pengurus.

Berdasarkan wawancara terhadap Ibu Sumita Audina selaku ketua TP PKK Desa Sruni, beliau menyampaikan: “Rencana kegiatan itu *dok*, biasanya lewat rapat pengurus setelah kegiatan rutin, jadi sambil kumpul-kumpul kita bahas kegiatan apa saja atau ada masukan kita sampaikan disitu, tetapi tidak sampai membahas terkait dana”<sup>131</sup>

Hal yang sama diungkapkan oleh ibu Rosidah selaku sekretaris TP PKK Desa Sruni beliau berkata: “Kalau untuk rencana kegiatan itu tidak sampai membahas dana *mbak* dan biasanya dilakukan waktu berkumpul seperti tadi setelah khotmil Qur’an *mbak*.”<sup>132</sup>

Begitu juga hal yang sama diungkapkan oleh ibu Nor Amirah selaku bendahara TP PKK Desa Sruni yaitu: “Rencana kegiatan itu *mbak* biasanya di sampaikan waktu kita ada kegiatan rutin seperti selesai senam, selesai pengajian itu diomongin kalau ada kegiatan baru atau masukan baru”<sup>133</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa proses pengambilan keputusan dalam perencanaan kegiatan TP PKK Desa Sruni dilakukan melalui komunikasi lisan dalam forum informal tanpa adanya pencatatan atau dokumen keputusan tertulis. Praktik ini

<sup>131</sup> Susmita Audina, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 2 Desember 2025.

<sup>132</sup> Rosidah, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 2 Desember 2025.

<sup>133</sup> Nor Amiroh, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 2 Desember 2025.

menunjukkan bahwa keputusan yang diambil belum memiliki dasar administrasi yang jelas dan tidak meninggalkan jejak keputusan yang dapat ditelusuri kembali.

Ketiadaan keputusan tertulis berdampak pada lemahnya aspek akuntabilitas, karena tidak terdapat dokumen yang dapat dijadikan rujukan apabila diperlukan klarifikasi, evaluasi, maupun pertanggungjawaban atas keputusan yang telah diambil. Keputusan lebih bergantung pada ingatan pengurus dan kepercayaan anggota terhadap pengurus inti, khususnya ketua, sekretaris, dan bendahara.

Dalam praktiknya, bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana lebih terlihat pada tahap setelah kegiatan dilaksanakan, yaitu melalui penyusunan SPJ dan pencatatan pengeluaran. Namun demikian, dokumen tersebut tidak merepresentasikan proses pengambilan keputusan sejak awal, melainkan hanya menunjukkan realisasi penggunaan dana. Kondisi ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas pengurus lebih bersifat administratif pascakegiatan, belum mencakup akuntabilitas proses pengambilan keputusan.

Meskipun demikian, proses pengambilan keputusan tetap dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika yang berlaku dalam organisasi, seperti musyawarah, kebersamaan, dan rasa saling percaya antar pengurus dan anggota. Namun, tanpa dukungan dokumentasi tertulis, nilai-nilai tersebut belum terintegrasi dalam

mekanisme pertanggungjawaban formal yang dapat diakses apabila dibutuhkan.

**b. Akurasi Kelengkapan Informasi yang berhubungan dengan cara-cara Mencapai Sasaran Suatu Program**

Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana informasi yang disusun oleh pengurus TP PKK Desa Sruni telah akurat dan lengkap dalam menggambarkan cara-cara yang ditempuh untuk mencapai sasaran program. Akuntabilitas dalam indikator ini tidak hanya dilihat dari keberadaan program, tetapi juga dari kejelasan informasi mengenai perencanaan, penggunaan dana, serta pelaksanaan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. Informasi yang akurat dan lengkap menjadi dasar penting dalam menilai kesesuaian antara tujuan program, pelaksanaan kegiatan, dan penggunaan dana organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pengurus inti TP PKK Desa Sruni, mekanisme penggunaan dana dalam melaksanakan kegiatan di TP PKK Desa Sruni dilakukan secara terpusat oleh ketua. Dana kegiatan diberikan kepada ketua pokja untuk keperluan belanja konsumsi, dengan system pengembalian sisa dana setelah kegiatan selesai. Dalam beberapa kegiatan, ketua juga melakukan pembelanjaan secara langsung. Dalam pelaksanaan kegiatannya seluruh penerimaan dan pengeluaran dana dicatat dalam Buku Kas Umum dan dilengkapi dengan bukti pendukung berupa nota, kwitansi, serta daftar

hadir kegiatan. Seperti yang disampaikan oleh ibu Susmita Audina selaku ketua TP PKK Desa Sruni, beliau menyampaikan:

semua penerimaan dan pengeluaran dana PKK dicatat di BKU *dok*, penerimaannya berupa pencairan dana dari APBDES tidak ada lagi dan semua pengeluarannya baik untuk kegiatan atau untuk membeli peralatan selalu disertai dengan nota dan kwitansi beserta absensi dan kehadiran anggota yang ikut. Dan itu semua saya yang mengerjakan sebenarnya ini tugas bendahara namun karena tidak bisa mengoperasikan laptop dan sejenisnya jadi saya yang mengerjakan, namun sekretaris dan bendahara tau alur uangnya ini.<sup>134</sup>

Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Ibu Rosidah selaku sekretaris TP PKK Desa Sruni, beliau berkata: “semua yang mencatat dan mengerjakan laporan itu ketuanya mbak, hal itu karena bendaharanya punya keterbatasan di bidang laptop, tpi saya tau dok pencatatan uangnya itu”<sup>135</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Nor Amirah selaku bendahara TP PKK Desa Sruni, beliau menyampaikan:

penerimaan dan pengeluaran uang PKK itu yang mengerjakan mbak Dina, meskipun saya bendaharanya saya hanya formalitas saja untuk tanda tangan dan lainnya karena saya tidak tau mbak mengoperasikan kayak gitu, tapi saya tau alur dananya itu.<sup>136</sup>

Berdasarkan paparan data tersebut, informasi mengenai penggunaan dana dalam pelaksanaan kegiatan TP PKK Desa Sruni telah disusun secara akurat dan didukung oleh kelengkapan dokumen administrasi. Pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana ke dalam Buku Kas Umum, serta keberadaan nota, kwitansi, dan daftar

<sup>134</sup> Susmita Audina, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 2 Desember 2025

<sup>135</sup> Rosidah, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 2 Desember 2025

<sup>136</sup> Nor Amirah, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 2 Desember 2025

hadir kegiatan menunjukkan bahwa pengurus telah melaksanakan pengelolaan dana secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

Akurasi informasi keuangan juga tercermin dari kejelasan alur penggunaan dana dalam pelaksanaan kegiatan. Dana kegiatan disalurkan kepada ketua pokja untuk keperluan pembelanjaan, dilanjutkan dengan proses pelaksanaan kegiatan, serta pengembalian sisa dana setelah kegiatan selesai. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penggunaan dana dapat ditelusuri dengan jelas oleh pengurus inti TP PKK Desa Sruni dan sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang dilaksanakan.

Dalam praktiknya, informasi yang disusun oleh pengurus lebih menekankan pada pencatatan keuangan dan kelengkapan bukti pengeluaran. Informasi mengenai keterkaitan antara penggunaan dana, pelaksanaan kegiatan, dan pencapaian sasaran program belum dirumuskan dalam satu dokumen tertulis yang terstruktur. Disisi lain, pengelolaan dan pencatatan dana masih terpusat pada peran ketua, sehingga mekanisme akuntabilitas berjalan melalui pengurus inti sebagai pihak yang memahami alur keuangan organisasi.

Dengan demikian, berdasarkan indikator akurasi dan kelengkapan informasi, akuntabilitas pengelolaan dana TP PKK Desa Sruni telah didukung oleh pencatatan keuangan yang tertib dan kelengkapan bukti administrasi. Informasi yang tersedia telah

menggambarkan alur penggunaan dana dalam pelaksanaan kegiatan dan menjadi dasar pertanggungjawaban pengurus inti terhadap pengelolaan dana organisasi.

**c. Kejelasan dari Sasaran Kebijakan yang diambil dan dikomunikasikan**

Indikator kejelasan sasaran kebijakan digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan kebijakan dan program yang dilaksanakan TP PKK Desa Sruni dirumuskan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak yang terlibat, seperti anggota. Kejelasan sasaran kebijakan menjadi penting dalam akuntabilitas karena menentukan arah pelaksanaan kegiatan serta menjadi dasar pertanggungjawaban atas penggunaan dana organisasi.

Berdasarkan wawancara terhadap Ibu Susmita Audina selaku ketua TP PKK Desa Sruni, beliau menyampaikan:

semua tujuannya mengikuti program PKK secara turunan *dok*, namun untuk tingkat desa menyesuaikan kondisi di setiap desa. Kegiatannya disini seperti senam itu supaya ibu-ibu sehat, pengajian untuk menambah ilmu begitu juga kegiatan lainnya, penulisan tujuan kegiatan PKK itu ada secara gambaran umum, namun yang mengarah ke setiap kegiatan itu tidak ada.<sup>137</sup>

Wawancara juga dilakukan terhadap oleh Ibu Rosidah selaku sekretaris TP PKK Desa Sruni, beliau menyampaikan: “sasaran kegiatan di PKK itu dipahami dari kegiatan-kegiatan yang sudah dijalankan sebelumnya mbak, dan tidak ada dalam bentuk tulisan,

---

<sup>137</sup> Susmita Audina, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 2 Desember 2025

dimana kita jala sesuai kebiasaan dan terpenting kegiatannya terlaksana”<sup>138</sup>

Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Ibu Nor Amirah selaku bendahara TP PKK Desa Sruni, beliau menyampaikan: “selama ini sasaran dan tujuan mengikuti kebiasaan saja mbak tidak di tulis, dan sesuai dengan arahan ketuanya.”<sup>139</sup>

Pengalaman yang sama juga diperkuat oleh keterangan para ketua POKJA di TP PKK Desa Sruni. Berdasarkan hasil wawancara POKJA 1 hingga 4 menyampaikan pola jawaan yang sama, yaitu bahwa sasaran dan tujuan kegiatan PKK dipahami secara informal berdasarkan arahan ketua dan kebiasaan pelaksanaan kegiata sebelumnya, tanpa adanya perumusna sasaran kebijakan secara tertulis. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Yuliatin selaku ketua POKJA 1 TP PKK Desa Sruni, beliau berkata: “kita hanya tinggal menjalankan kegiatan dari arahan ketuanya mbak, untuk tujuannya mengikutisaja gitu tidak ditulis, dibicarakan langsung sesuai arahannya biasanya”<sup>140</sup>

Berdasarkan paparan data wawancara, dapat diketahui bahwa sasaran kebijakan dan tujuan kegiatan TP PKK Desa Sruni dipahami secara umum sebagai bagian dari program PKK yang bersifat turunan dan disesuaikan dengan kondisi desa. Tujuan kegiatan seperti senam, pengajian, dan kegiatan pokja dipahami secara substantif oleh pengurus dan anggota sebagai upaya mendukung kesehatan, peningkatan

<sup>138</sup> Rosidah, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 2 Desember 2025

<sup>139</sup> Nor Amirah, diwawancarai oleh penuli, Sruni, 2 Desember 2025

<sup>140</sup> Yuliatin, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 4 Desember 2025

pengetahuan, serta pemberdayaan perempuan. Pemahaman tersebut terbentuk melalui kebiasaan pelaksanaan kegiatan yang telah berlangsung secara berulang serta arahan langsung dari ketua TP PKK dalam setiap kegiatan.

Kejelasan sasaran kebijakan dalam praktiknya disampaikan secara lisan dan bersifat informal, baik kepada pengurus inti maupun kepada ketua pokja. Sasaran kegiatan tidak dirumuskan secara khusus dalam bentuk dokumen tertulis yang menjelaskan tujuan setiap kegiatan secara rinci. Pelaksanaan kegiatan berjalan berdasarkan kebiasaan organisasi dan pengalaman sebelumnya, sehingga arah kegiatan dipahami secara bersama tanpa adanya perumusan sasaran kebijakan yang terdokumentasi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kejelasan sasaran kebijakan dalam pengelolaan kegiatan TP PKK Desa Sruni telah dipahami secara substantif oleh pengurus dan pelaksana kegiatan, meskipun belum didukung oleh mekanisme komunikasi dan perumusan sasaran kebijakan yang bersifat formal dan tertulis. Dalam konteks akuntabilitas, kejelasan sasaran kebijakan masih bergantung pada pemahaman dan arahan individu, terutama ketua, sebagai pusat pengambilan dan penyampaian kebijakan dalam organisasi.

#### **d. Kelayakan dan Konsistensi dari Target Operasional maupun Prioritas**

Indikator kelayakan dan konsistensi target operasional maupun prioritas digunakan untuk menilai sejauh mana target kegiatan yang dilaksanakan TP PKK Desa Sruni ditetapkan secara realistis dan dijalankan secara berkesinambungan sesuai dengan prioritas organisasi. Dalam konteks akuntabilitas, indikator ini berkaitan dengan kesesuaian antara rencana kegiatan, pelaksanaan di lapangan, serta kemampuan pengurus dalam mempertahankan konsistensi pelaksanaan program sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada anggota dan pihak terkait.

Berdasarkan wawancara terhadap Ibu Susmita Audina selaku ketua TP PKK Desa Sruni, beliau menyampaikan:

Target kegiatannya PKK Sruni itu mengikuti kegiatan-kegiatan sebelumnya dok, adapaun ada target yang berubah itu sifatnya arahan dari kabupaten ke kecamatan dan dari kecamatan ke desa, seperti saat ini ada program baru yaitu GEMES yang sudah di sosialisasikan oleh PKK Kecamatan, namun saya sendiri selaku ketua harus melihat kondisi Desa Sruni seperti apa dulu warganya.<sup>141</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Rosidah selaku sekretaris TP PKK Desa Sruni, beliau berkata: “targetnya seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya itu sudah mbak, jadi kita sudah tau kegiatan apa saja yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya”<sup>142</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Nor Amirah selaku bendahara TP PKK Desa Sruni, beliau menyampaikan: “tidak ada target

<sup>141</sup> Susmita Audina, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 2 Desember 2025

<sup>142</sup> Rosidah, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 2 Desember 2025

ya mbak, semuanya jalan mengikuti kegiatan yang sudah jalan, kalau ada kegiatan baru itu biasanya, dari PKK kecamatan sudah menyuruh diterapkan desa gitu”<sup>143</sup>

Pengalaman yang sama juga diungkapkan oleh ketua Pokja 1 hingga Pokja 4 yang menyampaikan pola jawaban serupa, yakni tidak terdapat target operasional yang ditetapkan secara khusus dalam pelaksanaan kegiatan TP PKK Desa Sruni. Kegiatan yang dijalankan umumnya merupakan kelanjutan dari kegiatan yang telah berlangsung sebelumnya, sedangkan kegiatan baru dilaksanakan setelah adanya arahan dari PKK Kecamatan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Mar'tia selaku ketua POKJA 3 TP PKK Desa Sruni, beliau mengatakan: “kegiatanannya ya seperti biasanya itu mbak, tidak ada target khusus, biasanya kegiatan baru dilakukan kalau sudah ada arahan dari PKK Kecamatan”<sup>144</sup>

Berdasarkan paparan data wawancara, dapat diketahui bahwa target operasional dan prioritas kegiatan TP PKK Desa Sruni ditentukan dengan mengacu pada keberlanjutan kegiatan yang telah berjalan sebelumnya. Kegiatan yang dilaksanakan bersifat rutin dan berulang, seperti senam, pengajian, serta kegiatan pokja, sehingga target operasional dipahami sebagai kelanjutan dari pola kegiatan yang sudah ada. Pemahaman tersebut dimiliki secara bersama oleh pengurus inti maupun ketua pokja.

<sup>143</sup> Nor Amirah, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 2 Desember 2025

<sup>144</sup> Marti'a, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 4 Desember 2025

Penetapan target kegiatan juga dipengaruhi oleh arahan dari PKK Kecamatan sebagai tindak lanjut dari program yang berasal dari tingkat kabupaten. Program baru, seperti GEMES, diterapkan setelah adanya sosialisasi dari PKK Kecamatan dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat Desa Sruni. Penyesuaian tersebut dilakukan oleh ketua sebagai pengambil keputusan utama dengan mempertimbangkan kesiapan dan kebutuhan warga desa.

Konsistensi pelaksanaan kegiatan tercermin dari keberlangsungan program rutin yang tetap dijalankan dari waktu ke waktu. Meskipun tidak terdapat penetapan target operasional secara tertulis, pengurus dan pelaksana kegiatan memiliki pemahaman yang sama mengenai kegiatan yang menjadi prioritas organisasi. Pola ini menunjukkan bahwa kelayakan target operasional ditentukan berdasarkan kemampuan organisasi dan kondisi lokal, sementara konsistensi kegiatan dijaga melalui keberlanjutan program yang telah menjadi kebiasaan dalam pelaksanaan kegiatan TP PKK Desa Sruni.

**e. Akses Publik pada Informasi atas suatu Keputusan setelah Keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan Masyarakat**

Akses publik terhadap informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat merupakan salah satu indikator penting dalam menilai akuntabilitas pengelolaan dana organisasi. Indikator ini menekankan pada sejauh mana masyarakat atau anggota organisasi dapat memperoleh informasi terkait keputusan yang telah ditetapkan,

termasuk dokumen perencanaan anggaran dan laporan pertanggungjawaban keuangan. Selain itu, akuntabilitas juga ditunjukkan melalui ketersediaan mekanisme pengaduan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, maupun keluhan atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana. Dalam konteks TP PKK Desa Sruni, indikator ini digunakan untuk melihat apakah informasi keuangan pasca-keputusan dapat diakses secara terbuka serta bagaimana saluran pengaduan disediakan dan dijalankan oleh pengurus.

Berdasarkan wawancara terhadap Ibu Susmita Audina selaku ketua TP PKK Desa Sruni, beliau mengatakan: “Kalau untuk RAB atau laporan SPJ itu tidak ditempel atau dibuka secara umum, biasanya kalau anggota yang tanya, baru dijelaskan, dan selama ini jarang ada yang bertanya bahkan jarang”<sup>145</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Rosidah selaku sekretaris TP PKK Desa Sruni, beliau mengatakan: “tidak ada mbak media untuk melihat RAB atau SPJ, informasinya disampaikan apabila ada yang bertanya”<sup>146</sup>

Pandangan yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Nor Amirah selaku bendahara TP PKK Desa Sruni, beliau berkata: “tempat untuk melihat RAB sama SPJ tidak ada mbak, kalo itu bisa tanya langsung, masukan atau kritikan juga tidak pernah ada”<sup>147</sup>

<sup>145</sup> Susmita Audina, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 2 Desember 2025

<sup>146</sup> Rosidah, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 2 Desember 2025

<sup>147</sup> Nor Amirah, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 2 Desember 2025

Pengalaman serupa juga disampaikan oleh Ketua Pokja 1 hingga Pokja 4 yang pada prinsipnya memberikan jawaban yang hampir sama. Para ketua pokja menjelaskan bahwa tidak tersedia tempat atau media khusus yang dapat digunakan oleh anggota maupun masyarakat untuk mengakses informasi terkait RAB maupun laporan SPJ. Apabila terdapat kebutuhan informasi, akses tersebut hanya dapat diperoleh melalui komunikasi langsung dengan ketua TP PKK. Selain itu, para informan juga menyatakan bahwa selama ini hampir tidak pernah terdapat pengaduan, baik dari warga maupun dari anggota PKK sendiri. Kondisi tersebut terjadi karena adanya tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kepemimpinan ketua, sehingga anggota dan masyarakat cenderung menerima pengelolaan dana sebagaimana adanya tanpa menyampaikan kritik atau keberatan secara formal. Seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu Hasanah selaku ketua POKJA 2 TP PKK Desa Sruni, beliau mengatakan: “Selama ini tidak ada mbak, walaupun ingin tahu langsung tanya ke ketuanya, dan selama ini juga ga pernah ada tempat untuk mengadu atau mengkritik dan tidak ada yang menkritik mbak, kalau anggota semua percaya”<sup>148</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua, sekretaris, bendahara, serta ketua Pokja 1 hingga Pokja 4 TP PKK Desa Sruni, dapat diketahui bahwa akses publik terhadap informasi atas keputusan yang telah dibuat masih bersifat terbatas. Informasi mengenai Rencana

---

<sup>148</sup> Hasanah, diwawancarai oleh penulis, Sruni, 4 Desember 2025

Anggaran Biaya (RAB) maupun laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tidak disediakan melalui media atau tempat khusus yang dapat diakses secara langsung oleh anggota maupun masyarakat. Penyampaian informasi keuangan dilakukan secara lisan apabila terdapat pertanyaan dari anggota, dengan komunikasi yang berlangsung secara langsung kepada ketua atau pengurus inti.

Praktik tersebut menunjukkan bahwa penyebaran informasi pasca-keputusan belum dilakukan secara sistematis melalui mekanisme yang terstruktur. Akses informasi lebih bergantung pada inisiatif individu anggota atau warga untuk bertanya, sementara pengurus belum menyediakan sarana pendukung yang memungkinkan keterbukaan informasi secara berkelanjutan. Kondisi ini juga berdampak pada minimnya interaksi terkait evaluasi atau klarifikasi pengelolaan dana, karena informasi tidak tersedia secara terbuka dalam bentuk dokumen yang dapat ditinjau bersama.

Selain itu, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa mekanisme pengaduan masyarakat belum diformalkan dalam bentuk saluran atau prosedur tertentu. Pengaduan, kritik, maupun masukan disampaikan secara langsung dan bersifat lisan apabila diperlukan. Namun, selama ini hampir tidak pernah terdapat pengaduan baik dari anggota PKK maupun dari masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya tingkat kepercayaan anggota terhadap kepemimpinan ketua

TP PKK, sehingga pengelolaan dana dan pelaksanaan kegiatan diterima tanpa adanya penyampaian keberatan atau kritik secara formal.

Secara keseluruhan, indikator akses publik terhadap informasi keputusan dan mekanisme pengaduan di TP PKK Desa Sruni berjalan berdasarkan hubungan interpersonal dan kepercayaan antar pengurus dan anggota. Pola tersebut membentuk praktik akuntabilitas yang bersifat informal, di mana pertanggungjawaban lebih ditopang oleh kepercayaan daripada oleh sistem dokumentasi dan saluran pengaduan yang terstruktur.

### **3. Integrasi Prinsip Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan Dana TP PKK Desa Sruni**

Integrasi dalam penelitian ini dipahami sebagai penyatuan nilai-nilai akuntansi syariah dengan praktik pengelolaan dana yang dijalankan oleh TP PKK Desa Sruni. Oleh karena itu, pada analisis ini difokuskan sejauh mana prinsip pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran tercermin dalam praktik pengelolaan dana secara keseluruhan. Penyajian data didasarkan pada hasil wawancara yang menggali pemaknaan informan terhadap nilai-nilai syariah, yang selanjutnya dianalisis untuk menilai tingkat keterpaduan antara prinsip akuntansi syariah dan praktik pengelolaan dana TP PKK Desa Sruni.

#### **a. Prinsip Pertanggungjawaban**

Prinsip pertanggungjawaban dalam akuntansi syariah berkaitan erat dengan konsep *amanah*, yaitu tanggung jawab moral dan spiritual

atas kepercayaan yang diberikan. Dalam pengelolaan dana TP PKK Desa Sruni yang dikelola oleh perempuan muslimah, prinsip amanah menuntut pelaksanaan tugas secara jujur dan bertanggung jawab, tidak hanya sebagai kewajiban administratif tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab kepada Allah SWT dan sesama. Berdasarkan pemahaman tersebut, bagian ini menyajikan data hasil wawancara yang menggambarkan bagaimana informan memaknai pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana TP PKK Desa Sruni, yang selanjutnya dianalisis untuk menilai tingkat integrasi prinsip pertanggungjawaban dalam praktik pengelolaan dana. Terkait hal itu, wawancara dilakukan kepada Ketua TP PKK Desa Sruni Ibu Susmita Audina, beliau menyampaikan bahwa:

Sebagai tanggung jawab yang di percayakan oleh ibu kepala desa kepada saya, saya mengelola dana sesuai dengan arahan dan kegiatan yang berjalan *dok*, meskipun semua keuangan saya yang mengatur, saya tetap menjaga alur keuangan secara benar, karena kan selain ke pemerintah desa diaudit juga oleh inspektorat kabupaten, jadi ya saya berusaha agar tidak mengecewakan ibu kepala desa, dan di islam juga diajarkan buat tanggung jawab, dan saya juga takut untuk menyelewengkan dana itu.<sup>149</sup>

Wawancara juga dilakukan terhadap Ibu Rosidah selaku

sekretaris TP PKK Desa Sruni, dimana beliau mengatakan bahwa:

kalau berbicara tentang amanah, selama ini sudah berusaha bertanggung jawab *mbak* atas pengelolaan dana PKK dengan aktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk ibu-ibu, mengingat ini amanah dari kabupaten turun ke kecamatan dari kecamatan turun ke desa.<sup>150</sup>

<sup>149</sup> Susmita Audina, diwawancarai oleh Penulis, Sruni, 2 Desember 2025

<sup>150</sup> Rosidah, diwawancarai oleh Penulis, Sruni, 2 Desember 2025

Pandangan yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Nor Amirah selaku bendahara TP PKK Desa Sruni, dimana beliau menyampaikan bahwa:

amanah dalam pengelolaan dana PKK itu setau saya dengan benar-benar memberikan kegiatan yang bermanfaat untuk ibu-ibu desa dari dana yang sudah di terima, dan selama ini kegiatan di desa juga sudah berjalan. Pelaporan administrasinya juga dikerjakan meskipun bukan saya yang mengerjakan.<sup>151</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara TP PKK Desa Sruni, prinsip pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana dimaknai sebagai amanah yang harus dijalankan secara moral dan spiritual. Para informan memandang pengelolaan dana PKK tidak hanya sebagai tugas organisasi, tetapi juga sebagai tanggung jawab yang berkaitan dengan nilai keagamaan dan kepercayaan yang diberikan oleh pihak desa.

Ketua TP PKK memaknai pertanggungjawaban sebagai kewajiban untuk mengelola dana sesuai dengan arahan dan kebutuhan kegiatan yang berjalan. Pengelolaan keuangan dilakukan dengan menjaga alur penerimaan dan pengeluaran secara benar, disertai kesadaran bahwa dana tersebut merupakan amanah yang akan dipertanggungjawabkan secara administratif kepada pemerintah desa serta secara spiritual kepada Allah SWT. Pemahaman ini menunjukkan bahwa nilai amanah telah tertanam dalam praktik pengelolaan dana yang dijalankan.

---

<sup>151</sup> Nor Amirah, diwawancarai oleh Penulis, Sruni, 2 Desember 2025

Sekretaris TP PKK memandang pertanggungjawaban dana sebagai upaya menjalankan amanah melalui pelaksanaan kegiatan yang aktif dan bermanfaat bagi anggota PKK. Dana yang diterima dipahami sebagai amanah berjenjang dari tingkat kabupaten hingga desa, sehingga pelaksanaan kegiatan diposisikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana yang dikelola.

Sementara itu, bendahara memaknai pertanggungjawaban dana PKK melalui pemanfaatan dana untuk kegiatan yang memberikan manfaat bagi ibu-ibu desa. Pertanggungjawaban juga dipahami dalam bentuk pelaksanaan pelaporan administrasi, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam proses pencatatan keuangan.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa prinsip pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana TP PKK Desa Sruri telah dipahami sebagai amanah yang mengandung nilai moral dan spiritual. Integrasi prinsip pertanggungjawaban akuntansi syariah tercermin dalam kesadaran informan untuk mengelola dana sesuai tujuan, menjaga kepercayaan yang diberikan, serta menjalankan tugas dengan rasa tanggung jawab kepada sesama dan kepada Allah SWT.

#### **b. Prinsip Keadilan**

Prinsip keadilan ini merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara *ineren* melekat dalam fitrah manusia. Dalam konteks akuntansi syariah, prinsip keadilan menekankan adanya

keseimbangan, kesetaraan, serta perlakuan yang proporsional bagi setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan.

Prinsip ini menuntut agar setiap pengelolaan dana dilakukan secara wajar, tidak merugikan pihak tertentu, serta sesuai dengan tujuan dan peruntukannya. Keadilan juga berkaitan dengan kejelasan hak dan kewajiban, serta pengambilan keputusan yang didasarkan pada kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, prinsip keadilan menjadi landasan penting dalam menilai apakah suatu pengelolaan keuangan telah berjalan sesuai dengan nilai-nilai akuntansi syariah. Berdasarkan uraian prinsip keadilan di atas, selanjutnya disajikan hasil wawancara dengan informan untuk menggambarkan bagaimana prinsip keadilan dipahami dan diterapkan dalam pengelolaan dana TP PKK Desa Sruni. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap Ibu Susmita Audina selaku ketua TP PKK Desa Sruni beliau menyampaikan bahwa: “saya selalu berusaha bersikap adil terutama tentang uang, saya Sudah berusaha semua dana yang turun saya salurkan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat sesuai arahan atasan, dan kegiatannya menyesuaikan kondisi desa”<sup>152</sup>

Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Ibu Rosidah selaku Sekretaris TP PKK Desa Sruni, beliau mengatakan bahwa: “bersikap adil itu memang penting *mbak*, terutama mengelola dana yang memang untuk kesejahteraan keluarga desa menurut saya sikap

---

<sup>152</sup> Susmita Audina, diwawancarai oleh Penulis, Sruni, 2 Desember 2025

adil itu terlihat Ketika dana turun kegiatannya jalan yang melibatkan ibu-ibu desa”<sup>153</sup>

Wawancara juga dilakukan terhadap Ibu Nor Amirah selaku bendahara TP PKK Desa Sruni, beliau juga mengatakan bahwa:

saya sebagai bendahara, meskipun tidak ikut melakukan pencatatan *mbk*, tpi selama ini saya juga melihat hasil pencatatan, dan kegiatan juga selalu rutin dijalankan dan saya melihat sikap adil dari ketua itu dari situ, meskipun banyak yang tidak tau, intinya kami sudah berusaha *mbak*.<sup>154</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara TP PKK Desa Sruni, dapat diketahui bahwa prinsip keadilan dalam pengelolaan dana dipahami sebagai sikap adil dalam menggunakan dan menyalurkan dana sesuai dengan tujuan kegiatan PKK. Ketua TP PKK menyampaikan bahwa keadilan diwujudkan melalui penyaluran dana untuk kegiatan yang bermanfaat dan disesuaikan dengan arahan serta kondisi desa. Pemahaman ini menunjukkan adanya kesadaran pengurus bahwa dana yang dikelola memiliki tujuan sosial dan harus digunakan untuk mendukung program kerja PKK.

Sekretaris TP PKK juga memandang keadilan sebagai hal yang penting dalam pengelolaan dana, terutama karena dana tersebut ditujukan untuk kesejahteraan keluarga di desa. Menurutnya, sikap adil dapat dilihat dari terlaksananya kegiatan-kegiatan PKK yang melibatkan ibu-ibu desa setelah dana diterima. Hal ini menunjukkan

<sup>153</sup> Rosidah, diwawancarai oleh Penulis, Sruni, 2 Desember 2025

<sup>154</sup> Nor Amirah, diwawancarai oleh Penulis, Sruni, 2 Desember 2025

bahwa keadilan dipahami melalui keberlangsungan kegiatan dan keterlibatan anggota dalam pelaksanaan program.

Pandangan bendahara memperkuat pemahaman tersebut, dimana keadilan dilihat dari hasil pencatatan dan pelaksanaan kegiatan yang berjalan secara rutin. Meskipun bendahara tidak terlibat langsung dalam proses pencatatan, ia menilai bahwa sikap adil tercermin dari penggunaan dana untuk kegiatan PKK yang terus dilaksanakan. Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam pengelolaan dana TP PKK Desa Sruni lebih dipahami sebagai upaya menyalurkan dana secara merata untuk kegiatan yang bermanfaat bagi anggota dan masyarakat desa.

#### c. **Prinsip Kebenaran**

Kebenaran dalam Al-Qur'an tidak diperbolehkan untuk dicampur adukkan dengan kebathilan. Dalam konteks akuntansi syariah, prinsip kebenaran ini tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan, dimana aktivitas pencatatan apabila dilakukan dengan baik dan berlandaskan kebenaran, kebenaran itu akan menciptakan keadilan dalam mengakui serta melaporkan transaksi-transaksi.

Dalam pengelolaan dana TP PKK Desa Sruni, prinsip kebenaran menjadi dasar penting agar penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan uraian tersebut, selanjutnya disajikan hasil wawancara dengan informan untuk menggambarkan penerapan prinsip kebenaran dalam

pengelolaan dana TP PKK Desa Sruni, seperti yang disampaikan oleh Ibu Susmita Audina selaku ketua TP PKK Desa Sruni, dimana beliau menyampaikan bahwa:

dalam hal kejujurann, saya sudah berusaha mencatat semua pemasukan dan pengeluaran dana yang saya dapat yang disertai dengan bukti nota, kwitansi dan bukti kegiatan yang berjalan, karena hal itu juga dipertanyakan oleh pihak kecamatan dan inspektorat.<sup>155</sup>

Pernyataan yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Rosidah selaku sekretaris TP PKK Desa Sruni, beliau menyampaikan bahwa: “menurut saya *mbak*, kejujuran itu terlihat dari cara ketua PKK melaporkan hasil pencatatan di setiap kegiatan yang sudah terlaksana yang disertai bukti pengeluarannya bukti nota belanja dan lain sebagainya”<sup>156</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Nor Amirah selaku bendahara TP PKK Desa Sruni, beliau juga mengatakan bahwa: “saya memang tidak ikut mencatat *mbak*, tapi saya tau isi laporannya itu lengkap disertai bukti-bukti pengeluaran, saya tau karena saya juga ikut menandatangani untuk kelengkapan SPJ biasanya”<sup>157</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara TP PKK Desa Sruni, prinsip kebenaran dalam pengelolaan dana dipahami sebagai kejujuran dalam mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Ketua TP PKK menyampaikan bahwa setiap transaksi dicatat dan dilengkapi

<sup>155</sup> Susmita Audina, diwawancarai oleh penulis, Srun, 2 Desember 2025

<sup>156</sup> Rosidah, diwawancarai oleh Penulis, Sruni, 2 Desember 2025

<sup>157</sup> Nor Amirah, diwawancarai oleh Penulis, Sruni, 2 Desember 2025

dengan bukti pendukung seperti nota, kwitansi, serta dokumentasi kegiatan. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa pencatatan keuangan harus dilakukan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak terkait.

Sekretaris TP PKK memandang penerapan prinsip kebenaran melalui proses pelaporan hasil pencatatan keuangan pada setiap kegiatan yang telah dilaksanakan. Keberadaan bukti pengeluaran yang menyertai laporan keuangan dipahami sebagai bentuk kejujuran dalam menyampaikan kondisi keuangan yang sebenarnya. Pemahaman ini menunjukkan bahwa kebenaran dalam pencatatan tidak hanya berkaitan dengan angka, tetapi juga dengan kelengkapan bukti pendukung.

Pandangan bendahara memperkuat hal tersebut, dimana prinsip kebenaran tercermin dari kelengkapan laporan pertanggungjawaban yang ditandatangani dan disusun berdasarkan bukti pengeluaran yang ada. Meskipun tidak terlibat langsung dalam proses pencatatan, bendahara mengetahui isi laporan keuangan melalui keterlibatannya dalam proses administrasi pertanggungjawaban. Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa prinsip kebenaran dalam pengelolaan dana TP PKK Desa Sruni diwujudkan melalui pencatatan transaksi yang sesuai dengan kondisi nyata dan didukung oleh bukti administrasi yang lengkap.

### C. Pembahasan Temuan

Pembahasan temuan merupakan pemikiran peneliti yang menghubungkan antara berbagai kategori dan dimensi yang ditemukan, membandingkan posisi hasil penelitian dengan penelitian-penelitian sebelumnya, serta memberikan penafsiran dan penjelasan terhadap hasil yang diperoleh dari lapangan.

#### 1. Praktik Transparansi dalam Pengelolaan Dana TP PKK Desa Sruni

Praktik transparansi pengelolaan dana TP PKK Desa Sruni secara umum menunjukkan pola yang belum sistematis dan masih bergantung pada mekanisme informal. Berdasarkan hasil penelitian, transparansi pada tahap perencanaan masih bersifat informal dan terbatas dalam penyampaian rencana kegiatan, disisi lain informasi mengenai rencana anggaran dan alokasi dana tidak disampaikan kepada anggota maupun POKJA. Perencanaan kegiatan dilakukan secara lisan pada saat perkumpulan rutin tanpa didukung oleh forum formal dan terjadwal,

Jika dibandingkan dengan teori menurut Racmawati, keterbukaan informasi menjadi fondasi utama dalam transparansi guna memberikan informasi bagaimana sumber daya publik digunakan dan bagaimana keputusan diambil.<sup>158</sup> Praktik keterbukaan informasi pada tahap perencanaan menunjukkan ketidaksesuaian dimana informasi rencana anggaran tidak disampaikan kepada anggota.

---

<sup>158</sup> Racmawati Novaria dkk, hlm 63.

Dalam pengelolaan dana TP PKK Desa Sruni aksesibilitas informasi keuangan bersifat pasif dan bergantung pada kepercayaan anggota yang secara langsung menanyakan, sementara dalam praktiknya anggota jarang meminta penjelasan karena merasa tidak memahami urusan keuangan dan telah mempercayakan sepenuhnya kepada pengurus inti. Kepercayaan sosial yang tinggi pada akhirnya menggantikan peran sistem transparansi formal.

Disisi lain, keterlibatan publik dalam tahap perencanaan pengelolaan dana tergolong rendah dan bersifat satu arah. Proses perencanaan didominasi oleh ketua dan pengurus inti, sementara anggota dan masyarakat hanya mengikuti Keputusan yang telah ditetapkan. Pekerjaan warga yang sebagian besar petani menjadi faktor pembatasan partisipasi aktif dalam perencanaan.

Jika dibandingkan dengan teori transparansi menurut Racmawati partisipasi masyarakat menjadi aspek penting dari transparansi, karena memberikan suara kepada masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan memastikan bahwa Keputusan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.<sup>159</sup> Praktik tersebut menunjukkan rendahnya keterlibatan anggota maupun masyarakat dalam perencanaan dana.

Pada tahap pelaksanaan, transparansi penggunaan dana berjalan secara situasional dan lebih dilakukan secara lisan. Penggunaan dana

---

<sup>159</sup> Racmawati Novaria dkk., hlm 63

hanya diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan PKK. Hal tersebut menunjukkan penyampaian yang tidak sistematis kepada seluruh anggota. Meskipun demikian dari sisi kejujuran dan keandalan, pelaksanaan kegiatan relative telah terpenuhi. Pada umumnya kegiatan yang direncanakan terlaksana dengan menyesuaikan kondisi di lapangan, serta ada penilaian wajar dari anggota dikarenakan kegiatan sudah berjalan aktif dan memberikan manfaat. Tidak ditemukan konflik atau keluhan terkait penggunaan dana, dimana kejujuran dan keandalan lebih dinilai berdasarkan hasil kegiatan daripada keterbukaan melalui laporan keuangan. Hal ini menunjukkan transparansi terpenuhi secara substantif, meskipun belum didukung oleh mekanisme transparansi formal.

Responsivitas dalam pengelolaan dana TP PKK Desa Sruni juga masih terbatas. Pada umumnya masukan dan tanggapan dari anggota hanya berkaitan dengan aspek teknis kegiatan, sementara diskusi atau kritik terkait penggunaan dana hampir tidak pernah terjadi. Hal itu didukung adanya kepercayaan penuh kepada ketua sebagai pengambil Keputusan utama.

Jika dibandingkan dengan pernyataan Racmawati, bahwa bagi pemerintah atau organisasi dituntut untuk tanggap terhadap kebutuhan informasi serta masukan masyarakat. Hal itu menunjukkan komitmen pemerintah untuk berinteraksi secara terbuka dan konstruktif dengan

masyarakat.<sup>160</sup> Praktik tersebut menunjukkan interaksi Pengurus Inti TP PKK Desa Sruni yang tidak sepenuhnya berinteraksi secara terbuka dan konstruktif dengan anggota dan masyarakat.

Penatausahaan keuangan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan tahapan pengelolaan keuangan lainnya, karena pada tahap ini tingkat transparansi relatif lebih baik. Hal tersebut tercermin dari adanya pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dana dalam Buku Kas Umum (BKU), yang didukung dengan kelengkapan bukti transaksi. Praktik pencatatan ini menunjukkan adanya upaya pengurus TP PKK Desa Sruni dalam menjaga keterbukaan informasi keuangan, khususnya pada aspek administrasi dan dokumentasi keuangan.

Temuan penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jessica Aranda Windartik dan Abu Darim, yang menyatakan bahwa pembukuan kas PKK di Dusun Sumur Pandan belum sepenuhnya menerapkan sistem akuntansi yang baik. Ketidakterapan tersebut disebabkan oleh pencatatan kas yang tidak dilakukan secara periodik setiap bulan, melainkan hanya dilakukan pada akhir tahun. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat transparansi dan keterlacakan informasi keuangan.

Sebaliknya, dalam penelitian ini, penatausahaan keuangan TP PKK Desa Sruni telah dilaksanakan secara periodik, di mana pencatatan keuangan dilakukan setiap bulan dan dituangkan dalam buku keuangan

---

<sup>160</sup> Racmawati Novaria dkk, hlm 64.

PKK berupa Buku Kas Umum (BKU). Pencatatan yang rutin dan berkelanjutan ini menunjukkan bahwa pada tahap penatausahaan, prinsip transparansi telah diterapkan dengan lebih baik dibandingkan tahap perencanaan dan pelaksanaan.

Penerapan transparansi pada tahap pelaporan menjadi titik terlemah dalam pengelolaan keuangan TP PKK Desa Sruni. Berdasarkan hasil penelitian, laporan keuangan yang disusun lebih difokuskan untuk memenuhi kepentingan administrasi di tingkat desa dan kecamatan. Laporan tersebut tidak disampaikan secara terbuka kepada anggota TP PKK dan juga tidak dibahas dalam forum khusus yang melibatkan pengurus maupun anggota. Kondisi ini menyebabkan akses informasi keuangan menjadi terbatas dan tidak merata.

Temuan ini menunjukkan bahwa transparansi pada tahap pelaporan belum dilaksanakan secara optimal, karena informasi keuangan hanya beredar di lingkup tertentu dan belum mencerminkan keterbukaan kepada seluruh pemangku kepentingan. Padahal, tahap pelaporan memiliki peran penting sebagai sarana pertanggungjawaban atas pengelolaan dana yang telah dilaksanakan pada tahap sebelumnya.

Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan teori transparansi yang dikemukakan oleh Sri Wahyuni dkk., yang menekankan bahwa transparansi merupakan prinsip keterbukaan informasi yang akurat, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dalam konteks ini, keterbukaan tidak hanya dimaknai sebagai tersedianya laporan keuangan secara

administratif, tetapi juga mencakup penyampaian informasi kepada pihak yang berkepentingan serta adanya ruang untuk pembahasan dan pemahaman bersama.

Dengan demikian, meskipun laporan keuangan TP PKK Desa Sruni telah disusun, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi sebagaimana yang diamanatkan dalam teori. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik di lapangan dengan konsep transparansi ideal, khususnya pada tahap pelaporan keuangan.

Dengan demikian, meskipun laporan keuangan telah disusun, praktik transparansi pengelolaan dana PKK Desa Sruni lebih bertumpu pada kepercayaan interpersonal dibandingkan pada sistem keterbukaan yang terstruktur.

## **2. Tingkat Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana TP PKK Desa Sruni**

Berdasarkan teori akuntabilitas menurut Riana Mayasari, akuntabilitas dimaknai sebagai kewajiban pengambil keputusan untuk mempertanggungjawabkan, menjelaskan, serta melaporkan seluruh aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang berwenang, sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Selain itu, prinsip akuntabilitas juga menuntut adanya arahan kepemimpinan, kepastian ketercapaian visi dan sasaran, pengelolaan sumber daya sesuai aturan, serta penerapan nilai-nilai tata kelola yang baik dalam organisasi.<sup>161</sup>

---

<sup>161</sup> Riana Mayasari, hlm 22

Temuan lapangan menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas telah dijalankan dalam pengelolaan dana TP PKK Desa Sruni, namun belum sepenuhnya memenuhi seluruh unsur akuntabilitas sebagaimana dikemukakan oleh Riana Mayasari.

Ditinjau dari kewajiban mempertanggungjawabkan dan melaporkan aktivitas pengelolaan dana, pengurus TP PKK Desa Sruni telah melaksanakan akuntabilitas dalam bentuk pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana melalui Buku Kas Umum serta penyusunan laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang didukung oleh bukti transaksi. Praktik ini menunjukkan bahwa kewajiban pelaporan kepada pihak yang memiliki kewenangan, khususnya pemerintah desa, telah dipenuhi. Dengan demikian, aspek akuntabilitas administratif sebagaimana dimaksud oleh Riana Mayasari telah terlaksana secara parsial.

Namun, jika dikaitkan dengan kewajiban menjelaskan dan mempertanggungjawabkan proses pengambilan keputusan, temuan lapangan menunjukkan adanya keterbatasan. Keputusan terkait perencanaan kegiatan dan penggunaan dana tidak didokumentasikan secara tertulis dan lebih banyak dilakukan melalui komunikasi lisan dalam forum informal. Kondisi ini menyebabkan proses pengambilan keputusan sulit ditelusuri dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip akuntabilitas yang menekankan kejelasan dan keterbukaan proses.

Selanjutnya, prinsip akuntabilitas menurut Riana Mayasari juga menekankan pentingnya arahan dari pemimpin dan jajaran organisasi

dalam mewujudkan visi dan misi yang dapat dipertanggungjawabkan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran kepemimpinan ketua TP PKK Desa Sruni sangat dominan dalam mengarahkan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana. Arahan pimpinan menjadi dasar utama pelaksanaan program, sehingga kegiatan dapat berjalan secara konsisten. Namun, dominasi tersebut belum diimbangi dengan pembagian peran dan dokumentasi yang memadai, sehingga akuntabilitas masih terpusat pada individu tertentu.<sup>162</sup>

Dalam aspek kepastian ketercapaian visi dan sasaran, kegiatan TP PKK Desa Sruni dilaksanakan secara berkelanjutan dan mengikuti program PKK yang bersifat turunan. Sasaran kegiatan dipahami secara substantif oleh pengurus dan pelaksana kegiatan, tetapi tidak dirumuskan secara tertulis dan terukur. Hal ini menyebabkan ketercapaian tujuan organisasi sulit dievaluasi secara objektif, sehingga prinsip kepastian sasaran sebagaimana dijelaskan oleh Riana Mayasari belum sepenuhnya terpenuhi.

Sementara itu, dalam hal pengelolaan sumber daya sesuai dengan peraturan yang berlaku, temuan menunjukkan bahwa pengurus telah berupaya mengelola dana sesuai dengan ketentuan administratif, terutama dalam kaitannya dengan pelaporan keuangan. Akan tetapi, keterbatasan akses publik terhadap informasi keuangan dan belum adanya mekanisme

---

<sup>162</sup> Riana Mayasari, hlm 23

pengaduan yang formal menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan objektivitas masih berjalan secara terbatas.

Nilai-nilai kejujuran dan kepercayaan tercermin dari tingginya tingkat kepercayaan anggota terhadap pengurus TP PKK Desa Sruni, yang menyebabkan minimnya kritik dan pengaduan. Meskipun nilai ini positif dalam membangun harmoni organisasi, dalam perspektif teori akuntabilitas kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas lebih bertumpu pada kepercayaan personal dibandingkan pada sistem pertanggungjawaban yang terbuka dan terstruktur.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana TP PKK Desa Sruni telah memenuhi sebagian prinsip akuntabilitas menurut Riana Mayasari, terutama dalam aspek pelaporan dan peran kepemimpinan. Namun demikian, akuntabilitas tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dalam aspek penjelasan proses, kejelasan sasaran, transparansi informasi, dan mekanisme evaluasi. Dengan demikian, tingkat akuntabilitas yang berjalan cenderung bersifat administratif dan informal, sehingga masih memerlukan penguatan sistem agar selaras dengan prinsip akuntabilitas secara teoritis.

### **3. Integrasi Prinsip Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan Dana TP PKK Desa Sruni**

Pembahasan temuan ini bertujuan untuk mengkaji integrasi prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan dana TP PKK Desa Sruni berdasarkan hasil penyajian data dan analisis sebelumnya. Pembahasan

dilakukan secara terintegrasi dan tidak dipisahkan per prinsip, karena prinsip pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan nilai dalam akuntansi syariah. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai bagaimana nilai-nilai syariah dipahami dan diwujudkan dalam praktik pengelolaan dana di tingkat organisasi desa.

Berdasarkan hasil penelitian, prinsip amanah, keadilan, dan kebenaran dipahami oleh pengurus TP PKK Desa Sruni sebagai nilai moral dan religius yang menjadi pedoman dalam mengelola dana. Amanah dimaknai sebagai tanggung jawab yang harus dijalankan dengan jujur dan penuh kehati-hatian, baik kepada pemerintah desa maupun kepada Allah SWT. Prinsip keadilan dipahami sebagai penggunaan dana untuk kegiatan yang bermanfaat dan melibatkan ibu-ibu desa, sehingga manfaat dana dapat dirasakan secara bersama. Sementara itu, prinsip kebenaran diwujudkan melalui pencatatan dan pelaporan keuangan yang didasarkan pada kondisi yang sebenarnya serta didukung oleh bukti administrasi. Ketiga prinsip tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling menguatkan dalam membentuk sikap pengurus terhadap pengelolaan dana PKK.

Meskipun nilai-nilai akuntansi syariah tersebut telah dipahami dan diyakini oleh pengurus, temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai dan praktik pengelolaan dana. Amanah lebih banyak dipahami sebagai tanggung jawab moral dan spiritual kepada atasan serta kepada Allah SWT, sementara keterbukaan informasi kepada

anggota belum menjadi bagian yang utuh dari praktik pengelolaan. Keadilan dipersepsikan melalui keberlangsungan kegiatan dan pemerataan manfaat, tanpa diikuti dengan keterlibatan anggota dalam akses informasi keuangan. Prinsip kebenaran telah diwujudkan dalam pencatatan dan kelengkapan bukti, namun hasil pencatatan tersebut belum sepenuhnya disampaikan secara terbuka kepada anggota. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah telah hadir pada tingkat kesadaran, namun belum sepenuhnya terimplementasi dalam mekanisme dan sistem pengelolaan keuangan.

Temuan penelitian ini selaras dengan pandangan Iwan Triyuwono yang menyatakan bahwa akuntansi syariah menampilkan konsep keseimbangan sebagaimana ditegaskan dalam QS. Yasin ayat 36 tentang penciptaan segala sesuatu secara berpasangan. Konsep berpasangan tersebut merefleksikan bahwa keadilan dalam akuntansi syariah diwujudkan melalui upaya menyeimbangkan berbagai dimensi yang berbeda namun saling melengkapi, seperti antara kepentingan egoistik dan altruistik, material dan spiritual, internalitas dan eksternalitas, serta aspek kuantitatif dan kualitatif.<sup>163</sup> Dalam konteks pengelolaan dana TP PKK Desa Sruni, keseimbangan ini tampak belum sepenuhnya terwujud secara utuh. Pengurus telah menunjukkan dimensi spiritual melalui kesadaran amanah dan tanggung jawab kepada Allah SWT, serta dimensi material melalui pencatatan keuangan dan kelengkapan bukti administrasi. Namun

---

<sup>163</sup> Iwan Triyuwono, hlm 396.

demikian, keseimbangan dengan dimensi eksternal dan altruistik, khususnya keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban kepada anggota, belum berjalan optimal. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi prinsip akuntansi syariah masih lebih dominan pada aspek internal dan spiritual, sementara aspek eksternal dan sosial belum sepenuhnya terakomodasi, sehingga nilai keadilan sebagaimana dimaksud dalam konsep keseimbangan akuntansi syariah belum tercapai secara menyeluruh.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai “Integrasi Prinsip Akuntansi Syariah dalam Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana PKK: Studi Tim Penggerak PKK Desa Sruni” maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Praktik transparansi pengelolaan dana TP PKK Desa Sruni menunjukkan keterbukaan informasi keuangan kepada anggota TP PKK masih terbatas. Penggunaan dana dan laporan keuangan belum disampaikan secara menyeluruh kepada anggota, sehingga transparansi lebih bersifat internal pengurus dan administrative kepada pemerintah desa, dan kecamatan, belum mencerminkan keterlibatan publik di tingkat organisasi.
2. Tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana TP PKK Desa Sruni juga menunjukkan sudah dilaksanakan secara administrative, namun belum menyentuh seluruh pihak yang berkepentingan. Pencatatan dan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah desa dan kecamatan sudah dilakukan, di sisi lain akuntabilitas kepada anggota belum berjalan secara menyeluruh, karena proses pengambilan Keputusan, penjelasan penggunaan dana, serta evaluasi kegiatan tidak dilakukan secara terbuka dan sistematis. Hal ini akuntabilitas lebih diarahkan ke atas dibandingkan ke bawah.

3. Integrasi prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan dana TP PKK Desa Sruni menunjukkan bahwa prinsip pertanggungjawaban (amanah), keadilan, dan kebenaran telah dipahami dan dihayati oleh pengurus sebagai nilai moral dan spiritual dalam mengelolaa dana. Di sisi lain nilai-nilai tersebut masih lebih dominan pada dimensi internal dan spriritual, sementara aspek keterbukaan dan pertanggungjawaban kepada anggota belum berjalan seimbang. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai akuntansi syariah dan praktik pengelolaan dana yang dilakukan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dna Kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

### **1. Bagi Pengurus TP PKK Desa Sruni**

Pengurus TP PKK Desa Sruni disarankan untuk meningkatkan keterbukaan informasi keuangan kepada seluruh anggota, tidak hanya dalam bentuk pelaporan administrative kepada pihak desa dan kecamatan, tetapi juga melalui penyampaian laporan sederhana yang mudah dipahami. Upaya ini penting untuk memperkuat transparansi dan menumbuhkan kepercayaan anggota sebagai bagian dari pelaksanaan nilai amanah dan akuntabilitas dalam akuntansi syariah

### **2. Bagi Anggota TP PKK Desa Sruni**

Anggota TP PKK diharapkan dapat lebih aktif dalam mengikuti kegiatan serta meminta informasi terkait pengelolaan dana secara santun

dan konstruktif. Keterlibatan anggota dalam mengetahui penggunaan dana dapat mendorong terciptanya keseimbangan antara tanggung jawab pengurus dan hak anggota, sehingga prinsip keadilan dan kebenaran dapat terwujud secara lebih nyata.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji integrasi prinsip akuntansi syariah dengan pendekatan yang lebih luas, seperti melibatkan perspektif anggota TP PKK atau menggunakan metode observasi dan dokumentasi yang lebih mendalam. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengembangkan model pengelolaan dana berbasis akuntansi syariah yang lebih aplikatif dan kontekstual sesuai dengan karakteristik organisasi masyarakat desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Tabany, Trianto Ibnu Badar. *Desain Pengembangan Pembelajaran Tematik*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Andela, A. *Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan pada Pemerintahan Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu*, 2020.
- Apriyanti, Hani Werdi. "Akuntansi Syariah: Sebuah Tinjauan Antara Teori dan Praktik." *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6(2):131–140, 2017.
- Aranda, Jessica Wirdantik, dan Abu Darim. "Analisis Penerapan Sistem Akuntansi dalam Pembukuan Kas PKK di Dusun Sumur Pandan." *Manajemen Kreatif Jurnal*, 1:239–248, 2023.
- Ariibah, Qoo'idahtul Ufairroh, Aisyah Bella Putri Pangestu, Aulia Septi Indira, Dearly Agista Yoliand, Salwa Febianti Anggita, dan Yuli Setiyowati. "Analisis Sistem Akuntansi Penerimaan Kas pada PKK RT 02 RW 03 Kedung Baruk Surabaya Timur." *Public Management and Accounting Review*, 6:38–49, 2025.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Tim Penggerak PKK Pusat. *Juknis Tata Kelola Gerakan PKK*, 2021.
- Harahap, Nur Dalilah, Rahmi Syahriza, dan Azhari Akmal Tarigan. "Studi Kontekstual Akuntansi Syariah: Perspektif Q.S. Al-Baqarah Ayat 282.", 2025.
- Huberman, A. Michael, dan Matthew B. Miles. "Introduction." Dalam *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 2014.
- Indrihastuti, Poppy. "Penyajian Laporan Keuangan di Kantor Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang." *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, 11:197–207, 2023.
- Jambiupdate. "Kasus Korupsi Dana PKK Tebo Tahun 2023 Senilai Rp1,7 Miliar.", 2024.
- Krina, L. Laolo. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Bappenas, 2003.
- Mayasari, Riana. *Indikator Kinerja Pemerintah Daerah dan Model Penilaiannya*. Sleman: CV Budi Utama, 2022.
- Muchlis, Saiful, dkk. *Akuntansi Syariah: Konsep dan Praktik dalam Era Kontemporer*. Malang: Pustaka Peradaban, 2024.
- Muhammad. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, 2005.

- Nirmalasari. 2021. *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasar Tripologi Islam (Studi pada Kantor Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru)*, 2021.
- Novaria, Racmawati, dkk. *Pengantar Administrasi Publik*. Cendikia Mulia Mandiri, 2024.
- Nurhayati, Sri, dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Pratiwi, Lidia, Nuraisyah, dan Masnawaty. “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa.” *Jurnal Sains Riset*, 14:220–229, 2024.
- Raba, Manggaukang. *Akuntabilitas: Konsep dan Implementasi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Rambe, Ihsan, dan Kusmilawaty. *Akuntansi Syariah: Teori Dasar dan Implementasinya*. Medan: UMSU Press, 2022.
- Sabili, Faris, Dadang Romansyah, dan Roni Hidayat. “Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Masjid (Studi Kasus Masjid Jogokariyan Yogyakarta).” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 11:233–249, 2023.
- Sarihati, Tati, dkk. *Tata Kelola dan Pemerintahan Akuntabilitas Publik*. Sumedang, 2023.
- Suciana, Sinta, C. Tri Widiastuti, dan Rita Meiriyanti. “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dombo dengan Good Governance sebagai Variabel Intervening.”, 2025.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Zulhelmy. *Dasar-Dasar Akuntansi Islamic*. Indramayu: Adanu Abimata, 2021.
- Tongotongo, Miseri Cordia, Jantje J. Tinangon, dan Robert Lambey. “Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kupa-Kupa Selatan Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara.”, 2023.
- Trihendrawan, Nuriwan. “Kemendagri Beberkan Sumber Pendanaan PKK di Daerah.”, 2022.
- Ultafiah, Weny. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa*. Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017.
- Wada, Fuazia Hamid, dkk. *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Wahyuni, Sri, dan Dermawan Sriyanto. *Pengelolaan Dana Desa demi Kesejahteraan Masyarakat*. PT Inovasi Pratama Internasional.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## Lampiran 1

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Latifa  
 NIM : 221105030061  
 Jurusan/Prodi : Akuntansi Syariah  
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
 Institut : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
 Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul "Integrasi Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana PKK: Studi Tim Penggerak PKK Desa Sruri Kec. Klakah Lumajang". Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sebagai acuan atau kutipan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Jember, 02 Februari 2026

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER



Latifa  
 NIM 221105030061

## Lampiran 2.

Matriks Penelitian

| Judul                                                                                                                                                    | Fokus                                                                                                                           | Sub fokus                                                                                                                                                                                           | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Metode Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fokus Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Integrasi Prinsip Akuntansi Syariah dalam Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana k PKK: Studi Tim Penggerak PKK Desa Kudus Kec. Klakah Lumajang | 1. Transparansi pengelolaan dana PKK<br><br>2. Akuntabilitas pengelolaan dana PKK<br><br>3. Integrasi Prinsip akuntansi Syariah | 1. Keterbukaan Informasi<br><br>2. Pencatatan dan pelaporan keuangan<br>3. Pertanggungjawaban pengelolaan dana kepada anggota/masyarakat<br><br>4. Nilai dan prinsip syariah dalam pengelolaan dana | 2. Akseibilitas<br>3. Keterlibatan Publik<br>4. Kejujuran dan keandalan<br>5. Responsivitas<br><br>6. Proses pembuatan Keputusan yang tertulis<br>7. Akurasi kelengkapan informasi<br>8. Kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil dan dikomunikasikan<br>9. Prinsip pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran | 1. Pendekatan: Kualitatif<br>2. Jenis Penelitian: Kualitatif Deskriptif<br>3. Lokasi penelitian: Desa Sruni Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang<br>4. Subjek Penelitian: informan merupakan Ketua, Sekretaris, bendahara TP PKK Sruni, anggota pokja 1, anggota pokja 2, anggota pokja 3, anggota pokja 4, pemerintah desa, dan ketua TP PKK Klakah<br>5. Pengumpulan Data: Observasi, wawancara dan dokumentansi<br>6. Analisis Data: Kondensasi data, penyajian data, Kesimpulan<br>7. Keabsahan Data: Triangulasi Teknik, dan Triangulasi Sumber<br>8. Tahap Penelitian: Observasi, lapangan, pelaksanaan penelitian, dan analisis temuan | 1. Bagaimana praktik transparansi dalam pengelolaan dana PKK pada TP PKK Desa Sruni?<br>2. Bagaimana tingkat akuntabilitas pengurus TP PKK Desa Sruni mempertanggungjawabkan organisasi?<br>3. Bagaimana integrasi prinsip akuntansi syariah dalam system pengelolaan dana PKK di Desa Sruni? |

### Lampiran 3.

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Praktik Transparansi dalam Pengelolaan Dana TP PKK Desa Sruni

1. Bagaimana penyampaian rencana kegiatan dan rencana keuangan?
2. Bagaimana akses anggota terkait informasi rencana kegiatan dan rencana keuangan?
3. Bagaimana keterlibatan warga dalam perencanaan kegiatan yang dilakukan?
4. Bagaimana rencana kegiatan dan rencana keuangan disampaikan secara jujur dan benar?
5. Bagaimana tanggapan pengurus TP PKK terhadap masukan dari masyarakat terutama dalam perencanaan kegiatan?
6. Bagaimana pengurus menyampaikan informasi terkait penggunaan dana setiap kegiatan?
7. Apakah anggota dapat dengan mudah memperoleh informasi mengenai penggunaan dana kegiatan?
8. Bagaimana keterlibatan anggota maupun masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana?
9. Bagaimana memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana yang berlangsung disampaikan kepada anggota sesuai kondisi sebenarnya?
10. Bagaimana sikap dan Tindakan pengurus TP PKK Desa Sruni Ketika menerima masukan atau pertanyaan dari anggota terkait penggunaan dana selama kegiatan berlangsung?

### B. Tingkat Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana TP PKK Desa Sruni

1. Bagaimana penyampaian tujuan utama dalam program yang dijalankan TP PKK Desa Sruni?
2. Bagaimana penentuan target kegiatan TP PKK Desa Sruni?
3. Bagaimana perumusan tujuan kegiatan PKK di tingkat desa, dan apakah tujuan tersebut dirumuskan secara khusus untuk setiap kegiatan?
4. Bagaimana penetapan target kegiatan PKK di Desa Sruni, dan sejauh mana target tersebut disesuaikan dengan arahan dari atas serta kondisi masyarakat desa?
5. Bagaimana akses masyarakat atau anggota PKK terhadap informasi keputusan yang telah dibuat, khususnya terkait RAB dan laporan pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan?

### C. Integrasi Prinsip Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan Dana TP PKK Desa Sruni

1. Bagaimana pengelolaan dana PKK dipandang sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan spiritual?
2. Apakah dalam mencatat dan menggunakan dana PKK terdapat kesadaran untuk bersikap adil, jujur, dan tidak merugikan pihak manapun?

3. Apakah pencatatan keuangan selalu dilakukan berdasarkan kondisi yang sebenarnya tanpa mengurangi, menambah dan mengabaikan transaksi tertentu?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## Lampiran 4.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
 Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : **SDY / Un.22/D.5.WD.1/KM.05.00/11/2025** 28 November 2025  
 Lampiran : -  
 Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Ketua TP PKK Desa Sruri Kec. Klakah

Dusun Curah Pakem, Sruri, Kec. Klakah Kabupaten Lumajang

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Latifa  
 NIM : 221105030061  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Jurusan : Ekonomi Islam  
 Prodi : Akuntansi syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai **"Integrasi Prinsip Akuntansi Syariah dalam Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana PKK: Studi TP PKK Desa Sruri Kec. Klakah"** di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER

A.n. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik,



**Nurul Widyawati Islami Rahayu**



## Lampiran 5.



**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
(PKK)  
TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN KLAKAH  
DESA SRUNI**

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 38 /PKK/SR/XII/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : Ny. Susmita Audina  
**Jabatan** : Ketua TP PKK Desa Sruni  
**Alamat** : Dusun Krajan, Sruni, Kec. Klakah Kabupaten Lumajang

Dengan ini menerangkan bahwa :

**Nama Mahasiswa** : Latifa  
**NIM** : 221105030061  
**Program Studi** : Akuntansi Syariah  
**Perguruan Tinggi** : Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember

Telah melaksanakan kegiatan penelitian di TP PKK Desa Sruni, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, terhitung 28 November 2025 hingga selesai, dengan judul penelitian:

*“Integrasi Prinsip Akuntansi Syariah dalam Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana PKK: Studi Tim Penggerak PKK Desa Sruni Kec. Klakah Lumajang”*

Selama melaksanakan penelitian yang bersangkutan telah menunjukkan sikap yang baik, sopan, dan menjalin komunikasi dengan pihak TP PKK Desa Sruni dengan baik.

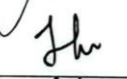
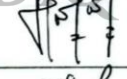
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



## Lampiran 6.

**JURNAL PENELITIAN**

**Integrasi Prinsip Akuntansi Syariah dalam Transparansi dan  
Akuntabilitas Pengelolaan Dana PKK: Studi Tim Penggerak PKK Desa  
Sruni Kec. Klakah Lumajang**

| No  | Tanggal            | Kegiatan                                                            | Paraf                                                                                 |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 28, September 2025 | Penyerahan Surat Izin Penelitian ke TP PKK Desa Sruni               |    |
| 2.  | 02, Desember 2025  | Wawancara dengan Ketua TP PKK Desa Sruni (Susmita Audina)           |    |
| 3.  | 02, Desember 2025  | Wawancara dengan Sekretaris TP PKK Desa Sruni (Rosidah)             |   |
| 4.  | 02, Desember 2025  | Wawancara dengan Bendahara TP PKK Desa Sruni (Nor Amirah)           |  |
| 5.  | 04, Desember 2025  | Wawancara dengan Ketua POKJA 1 (Yuliatin)                           |  |
| 6.  | 04, Desember 2025  | Wawancara dengan Ketua POKJA 2 (Hasanah)                            |  |
| 7.  | 04, Desember 2025  | Wawancara dengan Ketua POKJA 3 (Mar'tia)                            |  |
| 8.  | 04, Desember 2025  | Wawancara dengan Ketua POKJA 4 (Suciati)                            |  |
| 9.  | 04, Desember 2025  | Wawancara dengan Pemerintah Desa (Adi Antono)                       |  |
| 10. | 04, Desember 2025  | Wawancara dengan Warga Desa Sruni                                   |  |
| 11. | 05, Desember 2025  | Wawancara dengan Ketua TP PKK Kec. Klakah (Ny. Burda Arief Mashudi) |  |

## Lampiran 7.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
 Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://uinkhas.ac.id>



**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Latifa  
 NIM : 221105030061  
 Program Studi : Akuntansi Syariah  
 Judul : Integrasi Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana PKK : Studi Tim Penggerak PKK Desa Sruri Kec. Klakah Lumajang

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 19%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 2 Februari 2026

Operator Turnitin  
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Mariyah Ulfah, M.E.I.

197709142005012004



## Lampiran 8.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
 Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 124 /Un.22/D.5.KP.2/KM.05.00/02/2026

Yang bertandatangan di bawah ini Koordinator program Studi Akuntansi Syariah,  
 menerangkan bahwa :

Nama : Latifa  
 NIM : 221105030061  
 Semester : VIII (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai  
 bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan  
 diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 2 Februari 2026

A.n. Dekan

Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER

Nur Ika Mauliyah



## Lampiran 9.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos. 68136 Telp. (0331) 487550  
 Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



**SURAT KETERANGAN**

Kami selaku pembimbing skripsi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Latifa  
 NIM : 221105030061  
 Program Studi/Fakultas : Akuntansi Syariah/Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
 UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melengkapi lampiran naskah skripsi sesuai ketentuan buku pedoman akademik dan berhak diverifikasi untuk mendaftar ujian skripsi, antara lain :

| No | Lampiran                                                                                       | Ada | Tidak |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 1  | Lembar persetujuan Pembimbing                                                                  | ✓   |       |
| 2  | Matrik Penelitian                                                                              | ✓   |       |
| 3  | Surat Pernyataan Keaslian Bermaterai dan ditandatangani                                        | ✓   |       |
| 4  | Pedoman Wawancara/ Angket Penelitian                                                           | ✓   |       |
| 5  | Surat Izin Penelitian                                                                          | ✓   |       |
| 6  | Surat Keterangan Selesai Penelitian                                                            | ✓   |       |
| 7  | Jurnal Kegiatan Penelitian                                                                     | ✓   |       |
| 8  | Dokumentasi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif Data Primer)                                | ✓   |       |
| 9  | Lampiran Data Sekunder (Hasil penghitungan SPSS dll atau penelitian kuantitatif data sekunder) | -   |       |
| 10 | Surat keterangan screening turnitin 25% (Bagian Akademik)                                      | ✓   |       |
| 11 | Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi                                                     | ✓   |       |
| 12 | Mensitasi 5 artikel jurnal dosen FEBI (sesuai dengan topik penelitian)                         | ✓   |       |
| 13 | Biodata                                                                                        | ✓   |       |

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 2 Februari 2026  
 Pembimbing

**Putri Kamilatul Rohmi, S.E.Sy., M.E.**  
 NIP. 199209142020122011



**Lampiran 10.****DOKUMENTASI**

Wawancara dengan Ibu Hasanah selaku ketua POKJA 2 TP PKK Desa Sruni



Wawancara dengan Ibu Mar'tia selaku Ketua POKJA 3 TP PKK Desa Sruni



Wawancara dengan Ibu Arief Mashudi selaku Ketua TP PKK Kecamatan Klakah



Dokumentasi kegiatan POKJA 3 yakni PAWON URIP



Salah satu kegiatan POKJA 4 senam bersama



Salah satu kegiatan POKJA 1 yakni Khotmil Qur'an



Salah satu agenda Bulanan, yakni Rapat Pleno



Undangan kegiatan TP PKK Desa Sruri



Bukti Kwitansi salah satu kegiatan Pengajian TP PKK Desa Sruri

DAFTAR HADIR

| NO | NAMA          | KEHADIRAN | REMARKS |
|----|---------------|-----------|---------|
| 1  | 1. Laila, A.  |           |         |
| 2  | 2. Laila, A.  |           |         |
| 3  | 3. Laila, A.  |           |         |
| 4  | 4. Laila, A.  |           |         |
| 5  | 5. Laila, A.  |           |         |
| 6  | 6. Laila, A.  |           |         |
| 7  | 7. Laila, A.  |           |         |
| 8  | 8. Laila, A.  |           |         |
| 9  | 9. Laila, A.  |           |         |
| 10 | 10. Laila, A. |           |         |
| 11 | 11. Laila, A. |           |         |
| 12 | 12. Laila, A. |           |         |
| 13 | 13. Laila, A. |           |         |
| 14 | 14. Laila, A. |           |         |
| 15 | 15. Laila, A. |           |         |
| 16 | 16. Laila, A. |           |         |
| 17 | 17. Laila, A. |           |         |
| 18 | 18. Laila, A. |           |         |
| 19 | 19. Laila, A. |           |         |
| 20 | 20. Laila, A. |           |         |
| 21 | 21. Laila, A. |           |         |
| 22 | 22. Laila, A. |           |         |
| 23 | 23. Laila, A. |           |         |
| 24 | 24. Laila, A. |           |         |
| 25 | 25. Laila, A. |           |         |
| 26 | 26. Laila, A. |           |         |
| 27 | 27. Laila, A. |           |         |
| 28 | 28. Laila, A. |           |         |
| 29 | 29. Laila, A. |           |         |
| 30 | 30. Laila, A. |           |         |

KORPRI TP PKK Desa Sruri  
KORPRI DESA SRURI

Bukti kehadiran kegiatan pengajian TP PKK Desa Sruri



Salah satu notulen kegiatan TP PKK Desa Sruri

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Salah satu bukti nota kegiatan TP PKK Desa Sruri

## Lampiran 11.

### BIODATA PENULIS



Nama : Latifa  
 NIM : 221105030061  
 Tempat Tanggal Lahir : Lumajang, 27 Agustus 2003  
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
 Program Studi : Akuntansi Syariah  
 Agama : Islam  
 Alamat : Dsn Manggisan, RT/RW 009/002, Desa Kudus,  
 Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang  
 Email : [fatifa2708@gmail.com](mailto:fatifa2708@gmail.com)  
 No. Hp : 081332948061  
 Riwayat Pendidikan :  
 SDN Kudus 01 (2010 - 2016)  
 SMP Muhammadiyah Lumajang (2017 - 2019)  
 SMKN 1 Klakah (2019 - 2022)  
 UIN KHAS Jember (2022 - 2026)